



Filsafat Gerakan **EKONOMI ISLAM INDONESIA**

Gerakan ekonomi secara global mau tidak mau memberi efek kepada rutinitas mikro di seluruh dunia khusus di Indonesia dan beberapa negara Mayoritas penduduk Islam lainnya gerakan ekonomi Islam atau ekonomi syariah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan bahkan ekonomi global memperhitungkan ekonomi Islam menjadi salah satu trend positif dalam pergerakan ekonomi dunia terlepas dari perkembangan yang sangat elastis di sektor mikro.

Peran negara dan masyarakat secara simbiosis harus melahirkan efek positif terhadap perkembangan ekonomi Islam di Indonesia inilah Mengapa kajian-kajian ekonomi Islam akan terus diminati bagi civitas akademika.

Secara global pertarungan eksistensi adidaya di bidang ekonomi membuat negara harus berperan aktif melakukan penguatan di sektor riil, tanpa membelakangi perkembangan secara makro, terus melihat, menganalisis dan menelaah kebutuhan pasar, trend yang terjadi, elastisitas perubahan minat, apalagi terlibatnya secara aktif media teknologi membuat elastisitas perkembangan ekonomi sangat tinggi, cita-cita negara sebagai adidaya ekonomi tidak boleh dipusahkan dari nawacita bangsa.



Penerbit Merdeka Kreasi
Jl. Gagak Hitam, Komplek Bumi Seroja
Permai Villa No 18, Medan Sunggal
Email : Merdekakreasi2019@gmail.com

ISBN:978-623-5408-46-0



Filsafat Gerakan
EKONOMI ISLAM INDONESIA

Dr. Zulham, S.H.I., M.Hum.,
Wulan Dayu, S.E., M.E.



Filsafat Gerakan **EKONOMI ISLAM INDONESIA**

**Dr. Zulham, S.H.I., M.Hum.
Wulan Dayu, S.E., M.E.**

Editor : Zuhdi Hasibuan, M.Ag.

Filsafat Gerakan
EKONOMI ISLAM
INDONESIA

Filsafat Gerakan
**EKONOMI ISLAM
INDONESIA**

**Dr. Zulham, S.H.I., M. Hum.
Wulan Dayu, S.E., M.E.**

**Editor :
Zuhdi Hasibuan, M.Ag**



—Medan: Merdeka Kreasi, 2022
x, 186 hlm., 24 cm.
Bibliografi: hlm. 174
ISBN : 978-623-5408-46-0

Hak Cipta © 2022, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2022.

Dr. Zulham, S.H.I., M. Hum.

Wulan Dayu, S.E., M.E.

Filsafat Gerakan Ekonomi Islam Indonesia

Cetakan ke-1, Oktober 2022

Hak penerbitan pada CV. Merdeka Kreasi Group

Editor : Zuhdi Hasibuan, M.Ag.
Layout : Tim Kreatif Merdeka Kreasi
Desain Cover : Tim Kreatif Merdeka Kreasi

Dicetak di Merdeka Kreasi Group

CV. Merdeka Kreasi Group

Anggota IKAPI No. 048/SUT/2021

Alamat : Jl. Gagak Hitam, Komplek Bumi Seroja Permai

Villa 18, Medan Sunggal 20128

Telepon : 061 8086 7977/082167101076

Email : merdekakreasi2019@gmail.com

Website : merdekakreasi.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Gerakan Ekonomi Islam Indonesia ini dapat diselesaikan.

Buku ini penulis kembangkan dari Silabus, PMP (Pengembangan Mutu Pembelajaran). Buku ini bermanfaat bagi mahasiswa S1 pada khususnya, para guru dan masyarakat pada umumnya yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, terlebih bagi warga negara yang memiliki perhatiannya terhadap pendidikan bangsa yang tidak luput dengan persoalan fundamental pendidikan yang berkaitan dengan pemahaman demokrasi, bela negara, nasionalisme, HAM, sistem pemerintahan dan lain sebagainya. Buku ini disusun dan dikembangkan melalui berbagai sumber, namun demikian masih ada kekurangan, oleh karena itu kepada semua pihak diharapkan memberikan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan buku ini pada masa-masa yang akan datang. Semoga buku ini bermanfaat. Amin...ya rabbal'alam

Medan, 3 Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR - V

DAFTAR ISI - VII

BAB 1. PENERAPAN SISTEM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA - 1

- A. Defenisi Sistem Ekonomi dan Ekonomi Islam - 1
- B. Tujuan Ekonomi Islam - 2
- C. Perbedaan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam - 3
- D. Ayat Dan Hadis Yang Berhubungan Dengan Ekonomi Islam - 4
- E. Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Untuk Memperkuat Perekonomian Indonesia - 12
- F. Sistem Ekonomi Di Indonesia dan Penerapannya - 15
- G. Hubungan Ekonomi dan Politik dalam Konsep Ekonomi Politik - 18
- H. Saatnya sistem ekonomi islam menggantikan sistem ekonomi kapitalisme - 22

BAB 2. KONSEP DEMOKRASI DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM UNTUK MEWUJUDKAN GENERASI CEMERLANG - 38

- A. Pengertian demokratis - 38
- B. Sejarah singkat demokrasi - 40
- C. Norma dan pilar demokrasi - 41
- D. Bentuk-bentuk demokrasi - 42
- E. Ciri-ciri utama sistem ekonomi islam dalam demokrasi - 43
- F. Tujuan ekonomi islam - 44
- G. Demokrasi dalam islam - 46

BAB 3. PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP NEGARA DAN BANGSA INDONESIA - 54

- A. Globalisasi - 54
- B. Negara dan bangsa indonesia - 55
- C. Ciri-ciri utama sistem ekonomi islam dalam demokrasi - 57
- D. Upaya menghadapi globalisasi - 66

BAB 4. PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP NEGARA DAN BANGSA INDONESIA - 68

- A. Dasar dan hakikat keberadaan BUMN - 68
- B. Arti Penting BUMN - 71
- C. Rekomendasi pengelolaan dan pembinaan BUMN - 73
- D. Perkembangan/pembangunan ekonomi di indonesia - 77
- E. Solusi dari permasalahan peran BUMN - 78

BAB 5. GLOBALISASI EKONOMI - 79

- A. Fenomena Globalisasi Ekonomi - 79
- B. Pembangunan Ekonomi Sejak Tahun 1996 - 81
- C. Jenis Dampak Globalisasi Ekonomi - 86
- D. Kebebasan Ekonomi di Kalangan Umat Muslim - 88

BAB 6. MODERNISASI PEMBANGUNAN DAN POLITIK - 92

- A. Konsep modernisasi - 92
- B. Mendefinisikan modernisasi - 97
- C. Pandangan mengenai timbulnya modernisasi - 98
- D. Masyarakat tradisional dan modernisasi - 100
- E. Model dan metode modernisasi - 101

BAB 7. POLITIK MASYARAKAT DALAM EKONOMI ISLAM - 103

- A. Politik ekonomi islam - 103
- B. Politik ekonomi islam dalam negara khilafah - 107
- C. Kekuatan ekonomi islam - 110
- D. Ekonomi sebagai titik berat pembangunan politik - 112
- E. Sistem ekonomi islam - 112
- F. Struktur politik - 113

BAB 8. PERMASALAHAN EKONOMI DAN PERANAN PEMERINTAH - 114

- A. Permasalahan Ekonomi - 114
- B. Peran pemerintah dan sistem pemerintahan dalam bidang ekonomi - 120

BAB 9. POLITIK EKONOMI - 139

- A. Pengertian politik - 139
- B. Teori politik - 140
- C. Politik islam - 140
- D. Islam dan politik indonesia - 143
- E. Isu-isu aktual politik islam di indonesia - 147

BAB 10. HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL - 153

- A. Hukum ekonomi internasional - 153
- B. Perdagangan internasional - 157
- C. Perkembangan ekonomi di indonesia - 162

DAFTAR PUSTAKA - 174

BIOGRAFI PENULIS - 179

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB I

PENERAPAN SISTEM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

A. Defenisi Sistem Ekonomi dan Ekonomi Islam

1. Defenisi Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Suatu sistem dapat di ibaratkan seperti lingkaran-lingkaran kecil yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Lingkaran-lingkaran kecil tersebut merupakan suatu sub sistem. Sub sistem tersebut saling berinteraksi dan akhirnya membentuk suatu kesatuan sistem dalam lingkaran besar yang bergerak sesuai aturan yang ada. Perbedaan penerapan sistem ekonomi dapat terjadi karena perbedaan sistem pemerintahan maupun perbedaan pemilikan sumber daya suatu negara.¹

2. Defenisi Ekonomi Islam

Ekonomi islam adalah usaha-usaha yang membahas aktivitas ekonomi dalam suatu masyarakat Islam dengan bersumber pada ajaran Islam (Al-Qur'an, hadist Nabi, Ijma' dan Qiyas).²Bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya yang langka sesuai dengan tujuan ekonomi islam, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menimbulkan ketidak seimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan keluarga dan solidaritas sosial dan jalinan moral dari masyarakat.

¹ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*(Jakarta : Rajawali Pers, 2003), h.7

² Idri, Titik Triwulan Tutik, *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta :Lintas Pustaka Publisher, 2008), h. 64.

B. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi islam dapat di kelompokkan menjadi³ :

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dalam Negara

Islam memiliki konsep pembangunan tersendiri yang di ilhami dari nilai-nilai dalam ajaran Islam. Dalam hal ini konsep pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh Islam adalah konsep pembangunan yang didasarkan pada landasan filosofis yang terdiri atas *tauhid*, *rububiyah*, *khilafah* dan *tazkiyah*.

2. Mewujudkan kesejahteraan manusia

Konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi, melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spiritual.

Oleh karena itu , konsep kesejahteraan dalam Islam dengan kata lain sebagai upaya untuk menselaraskan kepentingan dunia dan akhirat sekaligus di sisi lain membedakan antara konsep kesejahteraan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain seperti kapitalisme yang berorientasi pada materialisme individual dan sosialisme yang berorientasi pada materialisme kolektif.

3. Mewujudkan sistem distribusi kekayaan yang adil

Dalam hal ini kehadiran ekonomi Islam bertujuan membangun mekanisme distribusi kekayaan yang adil ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat melarang praktik penimbunan (*ikhtikar*) dan monopoli sumber daya alam di sekelompok masyarakat.

Konsep distribusi kekayaan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam dalam hal ini antara lain dengan cara menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Keseimbangan ekonomi hanya akan dapat terwujud manakala kekayaan tidak berputar di sekelompok masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka

³ *Ibid*, h. 12

menciptakan keseimbangan ekonomi, Islam memerintahkan sirkulasi kekayaan haruslah merata tidak boleh hanya berputar di sekelompok kecil masyarakat saja.

C. Perbedaan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam⁴

Perbedaan umum antara ekonomi Islam dan Konvensional yang dapat diterangkan dalam tabel berikut:

Ilmu Ekonomi Islam	Ilmu Ekonomi Konvensional
Manusia sosial namun religius	Manusia sosial
Menangani masalah dengan menentukan prioritas	Menangani masalah sesuai dengan keinginan individu
Pilihan alternatif kebutuhan dituntun dengan nilai Islam	Pilihan alternatif kebutuhan dituntun oleh kepentingan individu/egois
Sistem pertukaran dituntun oleh etika Islami	Pertukaran dituntun oleh kekuatan pasar

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwasanya dalam ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial tetapi juga bakat religius mereka. Perbedaan timbul berkenaan pilihan dimana ilmu ekonomi Islam dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan ekonomi konvensional dikendalikan oleh kepentingan individu.

Ekonomi islam mempunyai pedoman/acuan dalam kegiatan ekonomi yang bersumber dari wahyu ilahi maupun pemikiran para ulama sedangkan ekonomi konvensional didasarkan kepada pemikir yang didasarkan kepada paradigma pribadi mereka masing-masing sesuai dengan keinginannya, dalam ekonomi konvensional menilai bahwa agama termasuk hukum syariah tidak ada hubungannya dengan kegiatan ekonomi.

Dalam ekonomi islam negara berperan sebagai wasit yang adil, maksudnya pada saat tertentu negara dapat melakukan intervensi

⁴ Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 88.

dalam perekonomian dan adakalanya pun tidak diperbolehkan untuk ikut campur, contohnya pada saat harga-harga naik, apabila harga naik disebabkan karena ada oknum yang melakukan rekayasa pasar maka pemerintah wajib melakukan intervensi sedangkan apabila harga naik karena alamiah maka pemerintah tidak boleh ikut campur dalam menetapkan harga, seperti yang diriwayatkan Nabi terkait kenaikan harga.

Dalam ekonomi konvensional, kapitalis tidak mengakui peran pemerintah dalam perekonomian, dalam sosialisasi negara berperan absolut dalam ekonomi sehingga tidak terdapat keseimbangan antara kedua sistem tersebut.

Dalam ekonomi islam mengakui motif mencari keuntungan tetapi dengan cara-cara yang halal, dalam ekonomi kapitalis mengakui motif mencari keuntungan tetapi tidak ada batasan tertentu, dalam ekonomi kapitalis tidak mengakui adanya motif mencari keuntungan sama sekali sehingga keduanya tidak dapat berlaku adil dalam ekonomi.⁵

D. Ayat Dan Hadis Yang Berhubungan Dengan Ekonomi Islam

1) Definisi Ekonomi Islam dan Ruang Lingkupnya

Ayat : Qs. Ar-Rum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ط وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : “ Dan riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang – orang yang melipatgandakan (pahalanya).

⁵ Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 89.

2) Karakteristik Ekonomi Islam⁶

Ayat : Qs. Al-Maidah:17

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

Artinya: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, “sesungguhnya Allah itu Dialah Al-Masih putra Maryam.” Katakanlah (Muhammad), “ Siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh (manusia) yang berada di bumi?” dan milik Allah – lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya.

3) Konsep Islam Tentang Kebutuhan

Ayat: Qs. Al – Israa’ : 27

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : sesungguhnya orang – orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Hadist :

أهريوا ايها فوراة لان الالهة الرقيق ومتيعا انها ليست واحده
لدها ب فلى فرة (رواها حمد و البيخقى)

Artinya : “ Jauhilah olehmu berfoya – foya karena hamba Allah (yang taat) itu bukanlah orang yang berfoya – foya.” (HR.Ahmad dan Baihaqi)

⁶ Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), h. 123.

4) Konsep Islam Tentang Kepemilikan⁷

Ayat : Qs. An – Nisa' 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ
نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ^ج
وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Hadist :

Sumber hak milik pribadi dan mudhorobah

يدالله على الشربكين مالم يتجا ونالق إعمل أن إداول الة. قويات وتجميمن
لترغبلق

Artinya : "Perlindungan Allah SWT terhadap dua orang yang melakukan perseroan selama mereka tidak saling menghianati."

5) Konsep Islam tentang Konsumsi dan Produksi⁸

Ayat : Qs. Al – A'raaf : 31

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ^ق ال يمكنك يد الصفحات لترتي أن ثم بها النصوص والعدة الملفعاة متنقيم
شفي تحضر الصفحات خلائحة الة مستوية باعيد

⁷ Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), h. 154.

⁸ *Ibid*, h. 256.

Artinya : Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmuyang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih – lebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih – lebihan.

Hadits :

Konsumsi dari segi kenyamanan

ان الله جميل يحب الجمال لقة كونك البعض في أدامج وات

Artinya : *“Allah itu sendiri indah dan dia menyukai keindahan”* (HR. Muslim)

6) Konsep tentang distribusi⁹

Ayat : Qs. Al - Mulk : 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا
مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ لقة أدوبي

Artinya : Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah di jelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki – Nya. Dan hanya kepada – Nyalah kamu (kembali setelah) di bangkitkan.

Hadits :

Memanfaatkan kekayaan tergantung amal

لا ءن يا ء خء اءء ءءه ففاء ءى الءبل بءءمة الءطء على ظهءه قفاءها
فبءف الله بها وءهه ءاءله من ان فساءل الناس اعطوه او مفعوه

⁹ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 243.

Artinya: “ Seseorang di antara kamu mengambil tali dan pergi kegunung untuk mengambil kayu bakar lalu di pikulnya pada punggungnya dan selanjutnya di jualnya serta dengan cara ini ia bisa menghidupkan dirinya adalah lebih baik daripada ia meminta kepada manusa, baik manusia itu memberikan ataupun tidak memberikan”.

7) Konsep Islam Dalam Teori Harga¹⁰

Ayat : Qs. An-Najm:39

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya : Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.

Hadits :

الذهب بالذهب, والفضة بالفضة. والبر بالبر والشعير بالشعير,
والتمر بالتمر, والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد, فإذا ختلفت
هذه الأصناف فبيعو الحيف شئتم, اذ الحان يدا بيد.

Artinya: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal dengan semisal, sama dengan sama dan tunai, maka apabila jenisnya berubah, maka jualah sekehendakmu apabila itu tunai” (HR. Muslim)

8) Prinsip Perdagangan

Ayat : Qs. Al – Baqarah : 278 – 279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

¹⁰ Ibid, h. 244.

Artinya : Wahai orang – orang yang beriman!, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum di pungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan rasul - Nya. Tetapi jika kamu berobat, maka kamu berhak atas pokok dari hartamu. Kamu tidak berbuat *dzalim* (merugikan) dan tidak di *dzalimi* (di rugikan).

Hadits :

عن انس رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد وان كان اخاه لا يبيعه وامه (منفق عليه)

Artinya : dari Anas ra berkata : “ Rasulullah saw melarang seorang kota menjualkan barang orang desa yang baru datang sebelum sampai pasar, walaupun orang itu saudara kandungnya”

9) Konsep Uang¹¹

Ayat : Qs. Al – Baqarah : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

¹¹ Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), h. 213.

Hadits :

من قُتِصِدَا غِنَاهُ اللهُ وَمِنْ بَدْرٍ أَفْقَرَهُ اللهُ

Artinya: “Barang siapa yang hemat akan di kayakan oleh Allah dan barang siapa yang boros maka Allah akan memberikan kemiskinan baginya.”

10) Kebijakan Fiskal¹²

Ayat : Qs. At – Taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ^ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang di lunakan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Hadis :

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

Artinya : “Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman saat manusia tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, dari yang halal atau yang haram” (HR Bukhari Al-Buyu’: 7)

¹² Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari’ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 253.

11) Kebijakan Moneter¹³

Ayat : Qs. An-Nisa' : 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ
عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدًا

Artinya : Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris yang atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah maha menyaksikan segala sesuatu.

12) Lembaga Keuangan Syari'ah

Ayat : Qs. Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari

¹³ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 244-245.

Tuhan-nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Hadits :

Hukum perdata islam dengan penalaran yang bersifat kualitatif

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل
على تحريمها

Artinya: “ Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada yang mengharamkannya.”

E. Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Untuk Memperkuat Perekonomian Indonesia

Sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan *mix economic* yang berkembang berdasarkan pemikiran barat menunjukkan kegagalan dalam meningkatkan harkat hidup orang banyak terutama di negara-negara berkembang. Kekurangan yang dimiliki oleh setiap jenis sistem perekonomian tersebut menyebabkan munculnya pemikiran baru tentang sistem ekonomi syariah yang berkembang di negara yang mayoritas penduduknya beragama islam.

Indonesia sudah mengenal prinsip syariah dalam aktifitas perbankan sejak tahun 1992. Sistem ekonomi syariah merupakan perwujudan paradigma islam. Dalam islam, tujuan penggunaan harta dan hubungan antara manusia dan lingkungan harus didasarkan pada Al-qur'an dan Hadist. Sistem ekonomi syariah menerapkan bahwa seluruh harta harus digunakan sesuai dengan petunjuk Al-qur'an, Hadist dan syariah islam¹⁴.

Muhammad SAW, teladan utama umat islam, telah menjadi pedagang internasional sejak usia remaja. Beliau telah menguasai jazirah arab dalam hal perdagangan. Pada masa itu jarang sekali terjadi resesi. Nilai-

¹⁴ Amri Amir, *Sistem Ekonomi Syariah* (Jakarta : CiptaPustaka,2008), h. 98.

nilai ekonomi syariah diterapkan dan menjadi solusi jika terjadi resesi.

Implementasi sistem ekonomi konvensional yang menempatkan uang sebagai komoditi menjadi salah satu penyebab timbulnya krisis global. Sistem ekonomi syariah menjamin bahwa praktik perbankan secara langsung berhubungan dengan ekonomi riil. Pihak bank dan nasabah memiliki kekuatan yang seimbang jika usaha dalam keadaan untung ataupun rugi¹⁵.

Kunci keberhasilan bank-bank syariah menghadapi krisis ekonomi global tidak semata karena faktor kuatnya fondasi ekonomi yang dibangun. Dukungan dari masyarakat yang tetap mempercayakan keuangan mereka pada bank syariah juga turut serta. Terdapat prinsip-prinsip utama dalam ekonomi syariah yang tidak dimiliki ekonomi konvensional. Kelima prinsip itu antara lain kepatuhan pada aturan agama, tidak dikenakan bunga (riba) pada transaksi apapun, uang hanya diinvestasikan untuk tujuan mulia (halal), adanya pembagian resiko di antara mitra bisnis, dan pembiayaan harus didasarkan atas aset riil¹⁶.

Kepatuhan pada aturan agama, sebagai pembanding, dalam sistem ekonomi konvensional, urusan agama dan perbankan terpisah. Artinya, bank hanya tunduk pada aturan-aturan yang dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan. Agama islam didatangkan dengan seperangkat ajaran yang lengkap dan sempurna tentang pengelolaan harta. Dalam islam, pemilik mutlak harta adalah Allah Swt. Harta yang dimiliki merupakan amanah. Orang yang dianugerahi kekayaan harus membayar zakat. Zakat bukan berdasarkan pendapatan tetapi berdasarkan banyaknya harta dan aset yang dimiliki. Zakat adalah memberikan bagian yang merupakan hak orang miskin. Penerapan konsep ini dalam hidup membuat hidup lebih aman, lebih tenang, lebih berkah dan lebih menguntungkan dunia akhirat¹⁷.

¹⁵ Abu bakar, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Aktivitas Ekonomi (Jakarta Cipta Pustaka, 2009)*, h.123.

¹⁶ *Ibid*, h. 124.

¹⁷ Amri Amir, *Sistem Ekonomi Syariah*, h. 120.

Sistem konvensional menerapkan bunga (riba) pada setiap transaksi. Sistem ekonomi syariah mengharamkan riba. Riba termasuk transaksi bisnis yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Pengharaman riba adalah upaya untuk peningkatan kesejahteraan yang dijunjung tinggi oleh ekonomi syariah.

Sistem konvensional tidak menjamin bahwa harta yang diinvestasikan hanya dipergunakan untuk jenis usaha yang halal. Dalam sistem ekonomi syariah uang yang diinvestasikan harus diketahui diinvestasikan dalam bentuk usaha atau bisnis apa. Investasi tersebut harus dijalankan dalam wujud usaha yang halal bukan dalam usaha yang bertentangan dengan syariah islam.

Ekonomi konvensional cenderung menguntungkan satu pihak tertentu. Berbeda dengan ekonomi syariah yang mencoba memberikan kemaslahatan bersama bagi semua pihak yang terlibat transaksi. Ini dapat dilihat dari larangan mendasar yang diberlakukan dalam ekonomi syariah, yakni diharamkannya bunga (riba), ketidakpastian, dan spekulasi (judi). Semua larangan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak semua pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Ditambah lagi, pembiayaan konvensional biasanya didasarkan pada janji untuk membayar, di mana aset riil peminjam tidak disertakan dalam transaksi. Dampaknya, pembiayaan konvensional bisa tumbuh beberapa langkah di depan perekonomian riil. Hal ini berakibat pada penggelembungan (inflasi) dan spekulasi harga aset yang tidak dibenarkan. Inilah yang menyebabkan ekonomi konvensional begitu rentan terhadap krisis¹⁸.

¹⁸ Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 78-79.

F. Sistem Ekonomi Di Indonesia dan Penerapannya

1) Sistem Ekonomi di Indonesia¹⁹

Indonesia adalah salah satu contoh negara yang menganut sistem ekonomi campuran. Negara kita menggunakan perencanaan yang terpusat seperti halnya sistem ekonomi komando, namun pengalokasian sumber daya tetap diserahkan kepada kekuatan pasar. Penguasaan aset juga dibedakan berdasarkan kepentingannya. Untuk faktor produksi yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak dikuasai oleh negara, sedangkan untuk faktor produksi yang tidak terlalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak boleh dimiliki oleh swasta (perorangan).

Indonesia pernah menganut berbagai macam sistem ekonomi namun semua sistem ekonomi tersebut belum mampu memperbaiki masalah finansial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia²⁰. Adapun sistem ekonomi tersebut antara lain :

a. Sistem Ekonomi Liberal (Masa Demokrasi)

Sistem Ekonomi Liberal pernah dianut oleh Indonesia pada tahun 1950-1957 ini adalah sistem ekonomi pertama yang dianut oleh bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. Sistem ekonomi ini dianut oleh bangsa Indonesia dalam kurun waktu yang sangat singkat karena dinilai belum mampu memperbaiki masalah finansial yang dihadapi oleh Indonesia sewaktu dijajah oleh belanda dan jepang.

b. Sistem Ekonomi Etatisme (Masa Demokrasi Terpimpin)

Pada tahun 1959 Indonesia beralih dari sistem Ekonomi Liberal ke Sistem Ekonomi Etatisme. Awal mula Indonesia menganut sistem ekonomi ini berasal dari dekrit presiden yang dikeluarkan oleh presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Selain itu kegagalan sistem ekonomi Liberal juga menjadi satu pertimbangan bagi Indonesia untuk beralih ke sistem ekonomi Etatisme. Namun seperti sistem ekonomi Liberal, sistem

¹⁹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 217

²⁰ *Ibid.*,h. 220

ekonomi Etatisme juga dinilai belum mampu memperbaiki masalah finansial di Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya hambatan bagi pengusaha pribumi untuk mengambil alih perusahaan yang telah ditinggalkan oleh kaum penjajah.

c. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran mulai dianut oleh bangsa Indonesia pada tahun 1967-1998. Sistem ekonomi ini cukup lama berada di Indonesia karena dinilai mampu untuk mengendalikan Inflasi atau lonjakan harga barang secara drastis dan berlangsung secara terus-menerus. Pada saat Indonesia menganut sistem ekonomi Etatisme, terjadi lonjakan Inflasi yang sangat drastis hingga mencapai 650 % per tahun. Dengan adanya sistem ekonomi Campuran diharapkan krisis inflasi yang tengah melanda Indonesia saat itu dapat ditekan dan diminimalkan.

d. Sistem Ekonomi Pancasila

Pengembangan dari sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi Pancasila mengingat Sistem ekonomi campuran dianggap sebagai perintis adanya sistem ekonomi Pancasila. Alasan adanya pergantian ke sistem ekonomi Pancasila adalah karena adanya krisis finansial yang diakibatkan oleh adanya ekonomi global pada saat itu.

2) Sistem Penerapan Ekonomi di Indonesia

Dalam penerapan sistem ekonomi kerakyatan, ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh para pelaku ekonomi, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, mendorong pemerataan pendapatan rakyat, meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional, dan membangun Indonesia yang berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik dan berkepribadian yang berkebudayaan.²¹

Sedangkan Penerapan Ekonomi Islam di Indonesia.

²¹ Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2004) h. 15

1. Syariat Islam Tentang Penataan Hukum²²

Syariat Islam akan berlaku bagi semua umat manusia di dunia sampai akhirat, tetapi bila syariat Islam dijadikan hukum positif di suatu negara, maka keberlakuannya hanya bagi masyarakat Islam. Ajaran tentang penataan hukum dalam kajian ilmu hukum memang merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh ahli hukum berdasarkan proses hukum yang terjadi di masyarakat, tetapi dari segi syariat Islam hal itu tidak saja disebut sebagai teori, melainkan merupakan prinsip yang wajib diberlakukan.

Para ahli hukum di Indonesia mempelajari tentang teori-teori penerapan hukum Islam melalui sistem hukum yang pernah berlaku di Indonesia selama masa kolonial Belanda. Adanya teori-teori ini menggambarkan, betapa akrabnya hukum Islam dengan penduduk, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Hal ini merupakan indikator bagaimana perjuangan masyarakat Indonesia yang beragama Islam ingin memberlakukan syariat Islam sesuai perintah Allah dan rasul-Nya.

Membicarakan tentang teori-teori perberlakuan hukum Islam, maka akan sangat berkaitan dengan proses bagaimana unsur-unsur hukum Islam itu dapat menjadi hukum positif atau bagian dari hukum nasional, disamping hukum adat dan hukum Barat. Adanya politisasi hukum yang dilakukan oleh kolonial Belanda ke arah mereduksi syariat Islam serta menjauhkan dari masyarakatnya, menyebabkan hukum Islam sampai saat ini selalu terpinggirkan dalam proses positivasi hukum dalam perspektif tata hukum Indonesia.

Apabila ternyata dalam masyarakat ada norma-norma hukum adat atau hukum Barat, dengan kekuatan otoritas yang sama atau lebih kuat, maka akan muncul masalah hubungan sistem hukum. Hukum mana yang akan diterapkan dalam lingkungan masyarakat, hal ini sangat tergantung pada politik hukum pemerintah atau politik hukum dalam konstitusi negara. Ketaatan orang Islam terhadap pemerintah dalam menjalankan

²² Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 289

hukumnya merupakan bagian dari teori penataan hukum atau prinsip syariat Islam juga. Dalam posisi ini, maka ketaatan terhadap pemerintah dalam memberlakukan hukum positif yang bersumber dari hukum adat dan hukum Barat, bagi umat Islam harus bersifat selektif, sepanjang hukum itu tidak bertentangan secara prinsipil dengan syariat Islam.²³

G. Hubungan Ekonomi dan Politik dalam Konsep Ekonomi Politik

Menarik bila kita tarik ke dalam sebuah pemahaman dimana dua teori ilmu pengetahuan klasik yang berkembang secara dinamis saling berkaitan satu dengan yang lain yaitu, Ilmu Politik dan Ilmu Ekonomi. Kedua disiplin ilmu ini dapat dibedah dengan pisau identifikasi-identifikasi yang pada akhirnya nanti ada sebuah nilai-nilai yang mempengaruhi, berintegrasi dan saling ketergantungan satu dengan yang lainnya yaitu menggunakan pisau analisis dan teoritis.²⁴

Bila kita masuk ke dalam ranah tataran ilmu politik, disini kita menemukan ada beberapa nilai-nilai yang khas akan konsep politis semisal mengenai kekuasaan, kewenangan kehidupan publik, permasalahan-permasalahan negara, konflik dll.

Walaupun sangat kuat harum terasa aroma politisnya, namun sekurang-kurangnya ada 3 konsep yang menempatkan politik bisa menjadi erat kaitannya dengan ilmu ekonomi nanti pada akhirnya, seperti²⁵:

1. Politik Sebagai Pemerintahan

Di dalam konsep ini jelas bahwa politik diletakan sebagai lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang mengambil kebijakan yang strategis untuk sebuah lokus atau wilayah yang mencakup tataran negara. Kajian ini pun berbicara masalah-masalah mengenai organisasi pemerintahan, pembagian kekuasaan dan peran pemerintah yang menjadi fokus utama yang melihat kondisi-kondisi relevansi yang ada menjadi satu kesatuan dalam perbincangan ekonomi politik termutakhir.

23 Idri, Titik Triwulan Tutik, *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam*, h. 18

24 Idri, Titik Triwulan Tutik, *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam*, h. 178.

25 Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2004) h. 167.

Namun dalam konsep ini ada beberapa kelemahan yang terlihat seperti cakupan-cakupan pemerintahan yang dinilai terlalu sempit bila kita berbicara negara pada ranah kekuasaan, pengabaian perbincangan mengenai korelasi yang berhubungan antara swasta dan pemerintah, kepentingan pribadi yang dibawa personal atau kelompok dalam pemerintahan yang berpotensi melawan penyelewengan.

2. Pemerintah Sebagai Publik

Dalam fokus kajian ini kita diajak memasuki kawasan-kawasan yang sifatnya ekonomis sekali yaitu berupa sebuah peristiwa yang hadir tengah-tengah masyarakat seperti perdebatan antara apa yang disebut dengan urusan publik dan urusan publik. Publik juga tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individual yang mempengaruhi kesejahteraan bahkan eksistensi masyarakat umum dalam hal ini adalah publik. Dalam pembahasan mengenai *public* dan *privat* kita mengenal istilah "*Public Good* ", yang dimaksud *public good* adalah barang-barang maupun jasa yang dianggap berharga dan sifatnya sangat strategis bagi kebutuhan masyarakat.

Bila kita berangkat dari pemikiran John Dewey, sektor publik adalah sebuah bentuk nyata tanggungan dan tanggung jawab dari negara. Menurut Dewey jelas sekali terlihat bahwa publik adalah ranah dimana masyarakat mempunyai tidak terlepas dari kepentingan dan pilihan.²⁶

3. Politik Sebagai Alokasi Nilai Oleh Pihak Yang Berwenang

Dalam kajian dalam bidang ini, aksentuasi ketat pada apa yang dimaksud distribusi nilai dalam masyarakat dengan kewenangan tertentu. Mengapa pendekatan ini dinilai relevan sebagai bentuk integrasi efektif antara politik dan ekonomi adalah karena keduanya adalah mengamini tentang metode alokasi. Bila dalam sudut pandang ekonomi mengenai kelangkaan maka tidak terlepas dari sektor produksi dan ini berkaitan erat dengan politik yang memiliki kewenangan hampir secara penuh

²⁶ Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2004) h. 167.

untuk semisal distribusi sumber daya alam, kecakapan teknis dalam hal kualitas alat-alat produksi dll.

Bila kita melihat secara seksama, ketiga konsep ini memiliki keterikatan kuat dan pengaruhnya besar bagi perkembangan ekonomi politik yang berkembang sebagai sebuah prinsip dasar keilmuan dalam sudut pandang politik. Ada 3 aktor penting bila kita berkaca dalam konsep-konsep ini yaitu pemerintah, pasar (dalam hal ini penjual dan pembeli) serta masyarakat. Semua punya peran penting dimana pemerintah sebagai regulator dan pengamanan bagi proses berjalannya pasar dan masyarakat sebagai sasaran dari pasar dalam hal ini bisa menggunakan kaca mata atau perspektif privat maupun publik.²⁷

Bila kita menelaah dalam sudut pandang ekonomi ada Pendekatan-pendekatan konsep yang menarik untuk membelah masalah ini, sebelumnya perkenankanlah saya untuk sedikit memaparkan mengenai apa yang dibahas secara strategis dalam prinsip ilmu ekonomi dalam tinjauan ekonomi politik. Ilmu Ekonomi menitik beratkan masalah pada satu hal yaitu kelangkaan. Setiap barang diasumsikan langka sehingga perlu ada kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, sampai konsumsi. Dalam roda perjalanan ekonomi ini perlu juga disinggung tempat berlangsungnya sebuah penawaran dan permintaan dalam yaitu pasar. Selanjutnya kita akan masuk ranah pembahasan konsep-konsep pendekatan dalam ilmu ekonomi komperhensif yaitu²⁸:

a. Pendekatan Ekonomi Kalkulasi

Dalam pendekatan ini kita didekatkan pada pemikiran-pemikiran bahwa setiap individu mampu memanfaatkan sumber daya yang berada disekitarnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Memang pendekatan ini tidak terlepas dengan rasio-rasio yang dimiliki manusia dalam memilih sesuatu dan tentang alokasi. Dalam masyarakat modern *rational choice* adalah sebagai intrumen dan menjadi sebuah identitas

²⁷ *Ibid*, h. 168.

²⁸ Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 143-144.

penting.

b. Pendekatan Ekonomi Sebagai Perekonomian

Dalam pendekatan ini dilihat ekonomi memiliki sifat yang sangat amat kental untuk memberikan pandangan pada kita bahwa politik dan ekonomi adalah satu hal yang berbeda. Ini berangkat dari pemikiran bahwa pasar dapat meregulasi sendiri bila ada kegagalan atau kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pasar itu sendiri. pandangan ini menekankan bahwa ekonomi harus berdiri diluar wilayah-wilayah politik karena efektif atau tidak sebuah pasar itu diluar campur tangan pemerintah khas pemikiran klasik.

Namun bila kita memandang bahwa ekonomi adalah perekonomian maka mau tidak mau harus ekonomi membutuhkan kerangka politik dan instrument hukum di dalamnya. Dari sini kita melihat ada keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung kita di paksa berpikir keras bahwa sebuah perilaku para pelaku pasar dalam ekonomi dan ekonomi itu sendiri memiliki hal-hal yang kaitannya erat dengan politik baik dalam bentuk sistemnya, budaya, kerangka teori, instrumen, lembaga-lembaga kepentingan dan lain-lain.

Keterkaitan antara ekonomi dan politik dari dua sudut pandang ekonomi dan politik saya kira sudah jelas dan terang benerang dalam penjelasan tadi karena ekonomi dan politik terutama di dunia kemodernan kedepannya hampir tidak ada batasan-batasan yang kuat untuk menyekat satu dengan yang lain.

Di era kekinian contohnya sistem politik sangat berpengaruh dalam menentukan pola konsep ekonomi yang haru dilaksanakan seperti ambil kasus RRC atau Republik Rakyat China yang secara politik jauh dari kata demokratis dan asumsi kapitalisme dan secara ekonomi berkebalikan dengan sistem politiknya, teramat kapitalis dan sangat mendukung pasar bebas, atau Singapura yang menganut Liberalisme dalam perekonomian namun secara politik justru jauh berbeda dari sistem perekonomiannya.

Disini penekanan secara teoritis juga lahir ketika ekonomi memberikan kontribusi besar bagi adanya sistem pasar pada politik dan menggunakan politiklah sebuah sumber daya bisa di distribusikan dan dialokasikan dalam sebuah instrument-instrument pemerintahan. Kritik atas ekonomi politik adalah ketakutan atas kita bila pasar atau mekanisme pasarnya terlalu di intervensi oleh pemerintah. Saya kira tidak terlalu baik bilamana pemerintah terlalu banyak campur tangan dalam permasalahan ekonomi dalam sebuah sistem mekanisme pasar. Seperti mengenai penetapan harga-harga, pemerintah bisa saja dengan kebijakannya mengimplementasikan kepentingan yang sebenarnya bertentangan dengan mekanisme pasar seperti menunjuk eksportir, importer, pemenang tender dan lain-lain. Saya termasuk penikmat dan pengagum dari sistem ekonomi liberal yang memberikan keleluasaan ekonomi dalam meregulasi dirinya sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah dan menempatkannya sebagai regulator, penjamin keamanan, penyedia infrastruktur dll yang memberikan kesempatan pasar berdiri bebas tanpa intervensi.²⁹

H. Saatnya Sistem Ekonomi Islam Menggantikan Sistem Ekonomi Kapitalisme

1. Fundamental Ekonomi Kapitalis Rapuh

Selain karena cacat bawaan yang ada dalam sistem kapitalisme, krisis global yang terus berulang ini juga dipicu oleh rapuhnya faktor-faktor penopang fundamental ekonomi kapitalis itu sendiri. Faktor-faktor dimaksud adalah³⁰ :

a. Kapitalisme menjadikan riba, pasar uang dan pasar modal (sektor non ril) yang spekulatif sebagai basis fundamental ekonominya.

Sebagaimana diketahui, dewasa ini sektor perbankan sudah

²⁹ Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 145.

³⁰ Idri, Titik Triwulan Tutik, *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam*, h. 279-280.

menjadi sarana investasi yang sangat diminati oleh masyarakat. Sektor yang awalnya dimaksudkan untuk menjadi alat menyerap modal masyarakat untuk menggenjot usaha di sektor ril ini justru menjebak dirinya sendiri dalam keruwetan yang tak berujung pangkal. Di satu sisi, penetapan sistem bunga bank memang menarik minat masyarakat untuk menyimpan uang mereka dengan iming-iming *interest* yang besar, namun di pihak lain pendanaan yang diberikan pihak bank pada dunia usaha seringkali berakhir dengan masalah. Hal ini jualah yang awalnya memicu terjadinya resesi ekonomi di AS yang kemudian diekspor ke seluruh dunia. Munculnya kasus subprime mortgage berawal dari transaksi haram ini, dimana para nasabah tak mampu membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dengan suku bunga yang tinggi. Akhirnya kredit macet pun terjadi. Perbankan AS lumpuh total, demikian juga dengan perbankan internasional. Mereka sudah tidak lagi memiliki cadangan dollar untuk dipinjamkan ke negara lain. Alhasil dollar menjadi barang langka yang dibutuhkan para investor untuk kebutuhan menjaga likuiditas.

Kondisi ini kemudian diperparah dengan adanya transaksi derivatif di pasar uang dan pasar modal yang menjadi pilar penopang syitem keuangan kapitalisme. Dalam pasar uang terjadi transaksi mata uang, sehingga uang yang seharusnya hanya berfungsi sebagai alat tukar, dalam sistem kapitalis juga memiliki fungsi sebagai komoditas yang diperdagangkan dan menjadi alat spekulasi. Akibatnya nilai tukar uang pun mengalami fluktuasi mengikuti hukum penawaran dan permintaan. Ketika dollar dijadikan sebagai standar mata uang dunia, maka semakin banyak yang memburu dollar hingga nilai mata uang ini menjadi tinggi, sementara nilai mata uang lain justru melemah. Kondisi inilah yang menyebabkan kondisi ekonomi dunia menjadi rentan dan pada saat yang sama kondisi politik internasional pun menjadi tidak stabil, bahkan mudah direkayasa. Inilah yang terjadi pada tahun 1997, ketika George Soros melakukan aksi borong dollar hingga rupiah melemah dan ekonomi Indonesia *colaps* hingga sekarang.

Hal yang sama terjadi di pasar saham dan pasar modal. Di pasar

ini, saham, obligasi dan surat-surat berharga lainnya berpindah tangan berkali-kali dalam waktu yang sangat cepat. Alih-alih mendorong nilai investasi dan laju produksi ril perusahaan-perusahaan yang sahamnya diperjual belikan, yang terjadi justru sebagaimana di pasar uang. Nilai saham yang sejatinya hanya angka-angka ini secara spekulatif naik dan turun mengikuti hukum permintaan atas saham-saham tadi di pasar bursa. Dan sesungguhnya penggelembungan nilai transaksi di pasar ini hanya berkisar angka-angka semata, karena pada praktiknya pasar ini tidak ada (non ril), dan tidak berkorelasi positif dengan peningkatan produktivitas sektor ekonomi ril yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat untuk menggenjot perekonomian mereka. Republika mencatat, pertumbuhan sektor non ril di tingkat dunia mencapai 700 kali lipat sektor riil, sementara di Indonesia, pada tahun 2006 tercatat 10 kali lipat yakni sektor riil Rp.3.338 T dan sektor non riil 27.764 T (*Rep. 14-3-08*). Tentu saja pasar jenis ini sangat berbahaya, karena unsur spekulasinya sangat tinggi; berupa keuntungan yang menggiurkan dan kerugian yang menjatuhkan. Unsur spekulasi inilah yang menyedot sebagian besar peredaran uang yang ada di masyarakat di sektor non ril ini, hingga dengan mudah pula mengalami kegoncangan yang berujung pada krisis moneter dan ekonomi sebagaimana sudah sering dialami. Ibarat balon, terus menggelembung, menjadi besar tapi kosong, hingga pada tahap tertentu pecah tanpa menyisakan apa-apa (*bubble economy*).³¹

b. Sistem moneter dalam kapitalisme tidak bersandar pada mata uang emas dan perak

Tidak dipungkiri jika saat ini sedang terjadi 'rezimisasi mata uang dollar AS' dengan menjadikan mata uang ini sebagai standar moneter di dunia³². Hal ini bermula dari keputusan Presiden AS, Richard Nixon pada tanggal 15 Juli 1971 yang secara resmi menggantikan sistem *Brettonwoods* yang dianggap sebagai keputusan yang mengikat mata uang dollar dengan emas dan mematoknya dengan nilai tertentu. Keputusan ini tentu menguntungkan AS, karena secara otomatis dia bisa mengontrol

³¹ Idri, Titik Triwulan Tutik, *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam*, h. 281.

³² *Ibid*, h.282.

mata uang negara lain, karena hanya AS-lah yang berhak untuk membuat dollar, mencetak dan menerbitkannya. Sementara negara-negara lain hanya 'diwajibkan' untuk menyandarkan mata uang mereka pada mata uang ini. Akibatnya nilai tukar negara lain, termasuk rupiah menjadi tidak stabil karena mengikuti pergerakan dollar dan pasar dollar yang fluktuatif. Wajar jika kemudian, AS juga bisa menjadikan dollar ini sebagai alat politik untuk melakukan penjajahan ekonomi atas negara-negara lain.

Masalahnya, standarisasi dollar terhadap mata uang dunia ini sangatlah rentan terhadap krisis, karena keberadaannya tidak di-*back up* dengan cadangan emas. Begitupun dengan uang-uang yang beredar di negara-negara lain termasuk Indonesia semuanya tidak *diback-up* dengan emas. Seluruh mata uang yang beredar hanyalah kertas-kertas yang dicetak Bank Sentral, dimana masyarakat dipaksa oleh undang-undang untuk percaya bahwa lembaran kertas itu memiliki nilai tukar sebagaimana tertera di dalam kertas dan bisa menjadi alat transaksi atas barang dan jasa. Barangkali kondisi ini bisa diibaratkan sebagaimana permainan monopoli.

Tentu saja kondisi ini menyebabkan tingkat instabilitas yang sangat tinggi karena mata uang ini hanya dijamin oleh tingkat kepercayaan publik terhadap institusi yang mengeluarkannya. Sementara yang namanya kepercayaan publik jelas sangat rentan terhadap berbagai isu dan situasi politik yang terjadi, hingga wajar jika nilai mata uangpun menjadi sangat fluktuatif dan rawan krisis. Hal inilah yang saat ini sedang terjadi dengan dollar, hingga krisis globalpun tak bisa terhindarkan.³³

c. Sistem distribusi dalam kapitalisme disandarkan pada prinsip kebebasan hak milik

Hal ini sejalan dengan prinsip liberalisme yang intern dengan kapitalisme. Dengan prinsip ini, *plus* diperkuat prinsip sekularisme yang menafikan nilai moral dan agama, kapitalisme meniscayakan para pemilik modal kuat menguasai asset-aset strategis dengan berbagai cara dan menggunakannya sebagai alat untuk mengambil keuntungan yang

³³ *Ibid*

sebesar-besarnya.

Dalam hal ini, sistem kepemilikan dalam kapitalisme lagi-lagi diserahkan pada mekanisme pasar bebas, tanpa ada pembatasan-pembatasan seperti mengenai mana yang berhak dimiliki individu, mana yang menjadi hak publik dan mana yang berhak dikuasai oleh negara berikut aturan pengelolaannya. Akibatnya praktek-praktek monopoli dan korporasi menjadi wajar terjadi sebagai "*hard fact*"³⁴ persaingan ekonomi global, sebagaimana terjadi atas perusahaan-perusahaan tambang Indonesia yang habis dikuasai kapitalis dan negara asing, berikut segelintir kapitalis lokal. Sementara rakyat banyak sebagai pemilik sah kekayaan alam tersebut harus menderita karena untuk menikmatinya mereka harus membayar dengan harga yang sangat mahal.

2. Sistem Ekonomi Islam, Sistem Yang Manusiawi

Berbeda dengan kapitalisme, Islam memiliki aturan yang sangat unik dan manusiawi terkait dengan ekonomi. Sistem ini bukan hanya kuat dalam dasarnya, tetapi juga ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh, yang memungkinkan penyelesaian seluruh problema ekonomi secara tuntas dan sempurna. Sistem ini juga bukan hanya teruji secara konsep, tetapi juga telah terbukti secara praktis menghantarkan umat Islam terdahulu menjadi umat yang berperadaban tinggi, sejahtera dan menyebarkan kesejahteraan pada umat-umat lainnya, sebagaimana antara lain catatan Wikipedia mengenai peran kekhalifahan Utsmani dalam membantu kelaparan di Irlandia dan Amerika Serikat di awal abad 19-an³⁵.

Banyak buku yang bisa dirujuk untuk melihat bagaimana tingkat kesejahteraan yang dialami umat Islam saat mereka hidup dalam sistem yang menerapkan Islam, termasuk sistem ekonominya.³⁶ Hingga dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi ini, memungkinkan bagi masyarakat

³⁴ *Ibid*, h.283

³⁵ Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 291.

Muslim mengembangkan peradaban (*hadlarah*), madaniyah dan saintek, dan akhirnya kaum Muslim mengalami kemajuan di berbagai bidang. Justru ketika umat Islam lepas dari sistem ini dan tunduk pada sistem yang dipaksakan oleh penjajah, mereka berubah menjadi umat yang hina, terpuruk dan bermental pengekor sebagaimana terjadi saat ini.

Karenanya, menjadi penting mengembalikan kesadaran umat akan jatidirinya yang asli sebagai *khoiru ummah*, dengan menghadirkan kembali pemikiran-pemikiran Islam yang tinggi dan cemerlang sebagai solusi kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Pemikiran-pemikiran ini adalah pemikiran yang tegak diatas keyakinan, bahwa Allah sebagai Pencipta Manusia Yang Maha Tahu, Maha Adil dan Sempurna juga adalah Pengatur Kehidupan (*Asy-Syari'/Al-Hakim*). Dialah yang Maha Tahu apa yang terbaik bagi manusia, hingga aturan-aturan yang Dia turunkan harus diyakini sebagai *problem solver* atas seluruh persoalan manusia, termasuk di dalamnya persoalan-persoalan yang menyangkut ekonomi, baik dalam tataran mikro, maupun makro³⁷.

Tatkala berbicara tentang bagaimana aturan-aturan Islam menyangkut masalah ekonomi atau apa yang disebut dengan sistem ekonomi Islam, faktanya memang telah banyak terjadi kesamaran. Dalam bayangan mayoritas masyarakat, aturan ekonomi Islam hanyalah berbicara seputar ekonomi berbasis moral, zakat, infaq, shadaqah (termasuk wakaf), larangan riba, dan hal-hal yang sejenis dengan itu. Sehingga ketika mereka berbicara tentang penyelesaian terhadap masalah ekonomi, seperti problem kemiskinan dan kebobrokan lembaga keuangan konvensional, solusi yang muncul dan banyak diperbincangkan termasuk dalam konteks pembaharuan hanyalah seputar optimalisasi pemberdayaan ZISWAF, pemberdayaan ekonomi santri, pendirian lembaga keuangan non riba, dan ide-ide cabang lainnya. Sementara, tataran asas dan fundamental ekonomi yang memang bersifat makro nyaris tidak pernah tersentuh. Padahal itulah akar masalah rusaknya perekonomian secara keseluruhan. Akibatnya, persoalan ekonomipun

37 Idri, Titik Triwulan Tutik, *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam*, h. 125.

terus terjadi tanpa bisa diselesaikan, kecuali dalam skala yang sangat kecil dan artifisial.³⁸

Sistem ekonomi Islam sesungguhnya berbicara mulai dari aspek fundamental. Dan sistem ini bisa dikomparasikan dengan sistem ekonomi lainnya, baik kapitalisme maupun sosialisme-komunisme hingga akan Nampak keunggulan-keunggulannya. Setidaknya ada 4 pilar disamping paradigma aqidah Islam yang menopang kekuatan sistem ini, yang kesemuanya berbeda secara diametral dengan sistem-sistem di luar Islam lainnya. Keempat pilar itu adalah³⁹ :

a. Penolakan atas transaksi ribawi sekecil apapun dalam aktivitas perekonomian.

Islam mengharamkan aktivitas riba apapun jenisnya. Bahkan Allah telah melaknat dengan menyerupakan riba sebagai perbuatan setan dan memaklumkan perang terhadap orang-orang yang melakukan aktivitas riba ini sebagaimana firman Allah SWT :

“Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (TQS. Al-Baqarah : 275)

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu” (TQS. Al-Baqarah: 279).

Berdasarkan ayat-ayat di atas, transaksi perbankan yang kini sudah menjadi gaya hidup kapitalis dengan unsur ribanya jelas sangat diharamkan oleh Islam. Terlebih pada faktanya, aktivitas ini telah menimbulkan kemadharatan yang sangat besar, tidak hanya pada tataran individu, tetapi juga tataran masyarakat bahkan negara. Justru dengan

³⁸ Daud Vicary Abdullah ,*Pintar Keuangan Syariah* (Jakarta : Bumi Aksara, 1998), h. 321.

³⁹ Fansuri Munawar,*Ekonomi Syariah* (Jakarta: Pustaka Pintar, 2001), h. 67.

adanya larangan riba, harta masyarakat akan terjaga dari kerusakan akibat riba. Sementara dalam tataran makro akan tercipta iklim ekonomi yang sehat, dimana uang akan beredar mengikuti perkembangan arus barang dan jasa, bukan malah tersimpan dalam bentuk asset bank, hingga pada akhirnya akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat ril yang jelas-jelas akan menguntungkan masyarakat banyak.

b. Islam menjadikan emas dan perak sebagai standar mata uang dan moneter.

Yang dimaksud disini adalah penggunaan emas dan perak sebagai standar satuan uang, baik diwujudkan dalam bentuk fisik emas dan perak (jika memungkinkan), atau dengan mempergunakan uang kertas yang dijamin (diback up) oleh cadangan emas dan perak yang disimpan di Bank Sentral. Dengan demikian, uang-uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat memiliki nilai intrinsik yang setara dengan nominalnya, hingga memang benar-benar layak menjadi alat tukar dalam setiap transaksi pertukaran barang dan jasa.

Sesungguhnya, pensyari'atan tentang mata uang berbasis emas ini sangat jelas di dalam Islam. Setidaknya, praktek ini dilakukan oleh Rasulullah Saw, sekalipun di awal masa Islam ini negara Islam tidak secara khusus mencetak mata uang Islam. Saat itu kaum muslimin telah menggunakan dinar Byzantium dan dirham Kisra sebagai mata uang mereka. Kaum Muslim baru mencetak mata uang dinar dan dirham sendiri dengan bentuk, pola dan standar yang khas pada masa kekhalifahan Malik bin Marwan. Oleh karenanya, penggunaan standar mata uang emas jelas merupakan *af'al* Rasul dan *ijma'* shahabat. Terlebih, banyak pensyariatan di dalam Islam yang senantiasa dikaitkan dengan standar emas dan perak ini, semisal nishab zakat, nishab pencurian yang dikenai had, diyat pembunuhan, larangan menimbun emas dan perak (QS. 9:34, dalam konteks mata uang) dan sebagainya.⁴⁰

40 Fansuri Munawar, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Pustaka Pintar, 2001), h. 68.

Ada beberapa keuntungan (hikmah) yang akan diperoleh dari penggunaan mata uang emas ini, diantaranya:

- 1) Sistem uang emas dan perak bersifat internasional dengan kurs yang bersifat (relatif) tetap. Sehingga, nilai tukar 1 dinar pada jaman Nabi Muhammad yang bisa ditukarkan dengan 1 ekor kambing misalnya, ternyata saat inipun dapat digunakan untuk membeli 1 ekor kambing (1 dinar = 4,25 gr emas = sekitar Rp. 800.000,-). Hal ini sejalan dengan fakta, bahwa dinar (emas) dan dirham (perak), keduanya disepakati sebagai benda yang bernilai (benda mulia), kapan dan dimanapun. Dengan demikian, sekalipun mata uangnya berbeda-beda, sistem ini akan memperlancar nilai tukar secara stabil, karena setiap jenis mata uang distandarisasi dengan standar yang sama dan nilainya relatif tetap. Hal ini akan mendorong pengembangan bisnis dan perdagangan internasional karena tak ada kekhawatiran akan fluktuasi kurs pertukaran mata uang.
- 2) Sistem uang emas dan perak tidak akan menyebabkan dunia mengalami kelebihan mata uang secara tiba-tiba dengan bertambahnya peredaran mata uang seperti yang biasa terjadi pada mata uang kertas. Ini karena mata uang emas dan perak bersifat tetap dan stabil, bahkan mampu menambah kepercayaan terhadap emas dan perak. Dalam jangka panjang, hal ini akan menyebabkan neraca keuangan negara tetap terjaga, karena negara akan berupaya seketat mungkin menerbitkan mata uang baru. Karena jika peredaran mata uang tidak terjaga sebagaimana yang sering terjadi pada mata uang kertas, tentu permintaan emas akan terus meningkat. Sementara, jika negara tidak mampu memenuhi permintaan akan emas ini, niscaya akan terjadi pelarian emas dan perak ke luar negeri dan akibatnya cadangan emas dan perak di dalam negeri akan berkurang⁴¹.

Seluruh dunia sebenarnya terus menggunakan sistem mata uang ini dalam kegiatan transaksional mereka, baik di dalam negeri, maupun

⁴¹ *Ibid*, h. 69.

di tingkat internasional. Selama itu pula tidak pernah dijumpai masalah yang terkait dengan mata uang itu sama sekali (masalah moneter), seperti inflasi dan defaluasi yang sering berujung pada krisis ekonomi. Artinya, sepanjang sistem mata uang emas dan perak ini digunakan, stabilitas keuangan dunia benar-benar terjamin. Hanya saja, cara ini kemudian dihapus oleh negara-negara kapitalis sebagai bentuk konspirasi mereka untuk melakukan penjajahan gaya baru atas negeri-negeri yang lebih lemah. Dan ini memang sudah berhasil mereka lakukan. Mereka sudah berhasil menjadikan negeri-negeri lemah ini tergantung secara politik dan ekonomi, sekalipun mereka akhirnya tak mampu menghindari akibat kerakusan mereka sendiri dengan munculnya berbagai krisis moneter di negeri-negeri mereka⁴².

a) Ekonomi Islam bertumpu pada sektor ekonomi riil

Dalam kehidupan ekonomi Islam, setiap transaksi harus dijauhkan dari unsur-unsur spekulatif, *riba*, *gharar*, *majhul*, *dharar*, dan sebagainya sebagaimana yang ada dalam aktivitas ekonomi non ril (pasar uang, pasar modal/bursa saham) dalam sistem kapitalis yang jelas-jelas telah menimbulkan krisis. Ekonomi Islam bertumpu pada sektor ril sepenuhnya, dimana transaksi yang dilakukan harus merupakan sesuatu yang memberikan manfaat yang ril bagi pelakunya, halal, sekaligus memberikan kompensasi yang bersifat ril juga. Ketika transaksi dilakukan, maka uanglah yang dijadikan alat tukar, bukan sebagai komoditas seperti dalam sistem kapitalis.

Dalam Islam uang dipandang sebagai milik masyarakat yang digunakan sebagai alat tukar untuk memperoleh barang dan jasa. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, akan semakin baik bagi ekonomi masyarakat. Karena itulah Islam melarang aktivitas menimbun harta (*kanzul mal*) (QS. At-Taubah : 34), yang jika dilihat dari perspektif ekonomi berarti menimbun mata uang. Pelarangan ini bisa dipahami karena penimbunan mata uang, misal karena dorongan investasi ribawi dan transaksi spekulatif di bursa saham yang menggiurkan, justru

⁴² *bid*, h. 70.

akan membuat aktivitas produksi dan transaksi ril yang dibutuhkan masyarakat akan berkurang, bahkan mandek. Itulah pula kenapa Islam justru mendorong transaksi-transaksi syariah semacam *syirkah* dengan berbagai macam variasinya di tengah-tengah masyarakat berdasarkan akhlak Islam dan ruh yang tak lepas dari semangat beribadah kepada Allah. Islam juga sangat menganjurkan aktivitas *khoiriyah* semacam zakat, sedekah dan pinjam-meminjam yang bebas riba yang keseluruhannya berarti menggerakkan perekonomian umat dan menjamin terjadinya perputaran barang dan jasa secara merata.

Inilah ekonomi ril yang menjadi pilar sistem ekonomi Islam. Ekonomi ril jelas tidak akan memunculkan krisis karena bertumpu pada aktivitas produksi dan transaksi barang dan jasa yang manfaatnya secara langsung bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, berupa ketersediaan lapangan pekerjaan atau peluang-peluang usaha, meratanya tingkat daya beli dan karenanya kesejahteraan masyarakatpun bisa terus ditingkatkan⁴³.

b) Sistem Islam mengatur masalah distribusi dan kepemilikan harta secara adil dan manusiawi

Islam membagi kepemilikan harta atas 3; kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Dalam hal ini negara adalah pihak yang melindungi dan menjaga ketiga jenis kepemilikan itu sesuai dengan hukum-hukum syara'⁴⁴.

Terkait dengan kepemilikan umum, Islam mengharamkan penguasaannya oleh individu maupun oleh negara. Islam justru mewajibkan kepada negara untuk memastikan agar harta milik umum ini betul-betul bisa dinikmati untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan cara mengelolanya dengan sebaik-baiknya melalui kegiatan eksplorasi, penjualan maupun distribusi. Adapun jenis-jenis kepemilikan umum ini mencakup : (a) harta yang dari sisi pembentukannya tidak

⁴³ Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 230.

⁴⁴ Amri Amir, *Sistem Ekonomi Syariah* (Jakarta : CiptaPustaka,2008), h. 135.

mungkin dimiliki secara individu, seperti laut, danau, sungai, pulau dan sebagainya. (b) apa saja yang menjadi hajat hidup orang banyak seperti sumber-sumber energi, hasil tambang dalam jumlah (deposit) tak terbatas, sarana-prasarana umum, dan sebagainya⁴⁵.

Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah SAW, beliau bersabda : *“Kaum Muslim berserikat dalam tiga jenis harta, yakni air, padang gembalaan dan api”* (HR. Abu Daud dari Ibnu Abbas). Dengan demikian, apa yang lumrah terjadi dalam sistem kapitalisme seperti swastanisasi dan privatisasi jelas-jelas dilarang dalam Islam⁴⁶.

Adapun kepemilikan individu adalah harta yang pengelolaannya diserahkan kepada individu pada selain harta milik umum. Kepemilikan jenis ini juga harus dilindungi oleh negara, sehingga tidak boleh ada seorang pun yang merampasnya, termasuk negara sekalipun (misal melalui nasionalisasi). Sedangkan kepemilikan negara yaitu ada pada harta yang hak pengelolaannya ada pada negara/khalifah sesuai dengan pandangan ijtihadnya (*qanun*). Harta ini meliputi, *kharaj*, *fa’l*, barang temuan, dan sebagainya, yang kesemuanya bisa digunakan untuk pembiayaan pengelolaan negara maupun untuk kepentingan-kepentingan penstabilan ekonomi negara.

Senyatanya, pengaturan sistem kepemilikan seperti ini tidak ditemukan dalam sistem ekonomi kapitalis. Dalam konsep kapitalisme kepemilikan hanya dijelaskan secara global tanpa batasan-batasan. Misalnya pernyataan John M. Hartwick, bahwa *“a property right is bundle of characteristics that convey certain powers to the owner of the right. The owner may be an individual, a group of individuals (e.g., a firm), or the state (e.g., public lands)”*.⁴⁷ Bahkan dalam kapitalisme, adanya prinsip kebebasan kepemilikan memungkinkan apa yang seharusnya menjadi milik umum justru dikuasai oleh individu. Inilah yang menyebabkan berbagai

⁴⁵ *Ibid*, h. 131.

⁴⁶ **Taqiyuddin al-Nabhani**, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), h.165

⁵¹ *Ibid*, h. 167

ketidakadilan kerap terjadi. Rakyat antri BBM, bahkan harus membelinya dengan harga yang sangat tinggi. Begitupun dengan listrik, jalan tol, dan sebagainya. Rakyat pun harus hidup dengan susah payah sekalipun tanah air mereka kaya raya. Ini karena, kekayaan alam yang sesungguhnya menurut syara' adalah milik rakyat dibiarkan oleh negara dikuasai oleh individu dan kapitalis asing. Bahkan ironisnya, 'perampokan' hak milik umum ini justru dilegitimasi oleh undang-undang (antara lain melalui UU Migas, UU SDA, UU PMA, dan lain-lain).⁴⁸

3. Peran Nyata Ekonomi Syariah

Di antara peran ekonomi syariah yang harusnya menjadi bahan pertimbangan golongan yang melakukan penentangan terhadap kedua RUU tersebut adalah peran nyata ekonomi syariah serta instrumen ekonomi syariah dalam menjawab tantangan serta permasalahan perekonomian. Praktik perbankan syariah yang adil, yang berbasis bagi hasil selain menguntungkan juga berhasil menggaet nasabah dengan indikasi pertumbuhannya yang sangat pesat. Selain itu, praktik sektor keuangan syariah senantiasa bersesuaian dengan sektor riil, yang pelaku utamanya adalah masyarakat menengah ke bawah. Makin besar porsi sektor keuangan syariah beroperasi makin besar pula sektor riil yang beroperasi sehingga tidak terjadi ketimpangan antara sektor riil dan sektor moneter serta makin sempitnya jurang pemisah si kaya dan si miskin. Dengan tumbuhnya sektor riil, pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan masyarakat secara lebih adil dan merata.⁴⁹

Selain itu, sektor syariah yang tidak bisa dianggap remeh adalah peran sosial ekonomi syariah melalui instrumen-instrumennya seperti zakat, infak/sedekah dan wakaf. Melalui pengelolaan yang optimal, zakat, infak/sedekah dan wakaf berpotensi besar mengatasi berbagai permasalahan bangsa baik ekonomi maupun sosial.

Berbeda dengan industri perbankan syariah sebagai unit bisnis,

⁴⁸ Taqiyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), h.167.

⁴⁹ *Ibid*, h. 187.

instrumen ekonomi syariah seperti zakat, infak/sedekah dan wakaf berperan besar dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Zakat dan infak/sedekah berperan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin. Peran tersebut sangat sesuai dengan cita-cita pemerintah yang diamanahkan Undang-Undang yang berbunyi; “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Sedangkan wakaf, memiliki peran yang besar dalam menunjang serta mendukung pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Melalui wujudnya yang biasanya berupa asset kekal, wakaf sangat sesuai untuk pembangunan sarana-sarana seperti rumah sakit, sekolah, perpustakaan dan sebagainya. Sebagai bukti akan peran wakaf yang memihak rakyat adalah apa yang dicontohkan oleh beberapa lembaga seperti Dompet Dhuafa dengan Lembaga Kesehatan Cumu-Cuma (rumah sakit bebas biaya bagi orang miskin) dan Sekolah Smart Ekselensia (sekolah bebas biaya). Sebelumnya, kita juga bisa melihat peran UII dan Pondok Modern Gontor dalam mengelola wakaf. Dan perlu diketahui, peran wakaf selain sarana ibadah tidak hanya terbatas untuk umat Islam akan tetapi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dari agama manapun⁵⁰.

Melihat peran yang besar dari ekonomi syariah tersebut, sepatutnya lah bagi pemerintah untuk memberikan perhatian serius. Perhatian tersebut bisa berupa dukungan penuh terhadap praktik ekonomi syariah, salah satunya dengan meyakinkan beberapa pihak yang menentang penerapan RUU yang berkaitan dengan ekonomi syariah bahwa ekonomi syariah tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam akan tetapi bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sebisa mungkin pemerintah harus turut serta dalam mempercepat pemberlakuan UU tersebut. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan serta perkembangan ekonomi syariah yang saat ini menjadi tuntutan masyarakat secara luas. Dalam hal zakat, upaya pemerintah yang bisa dilakukan adalah dengan memberlakukan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan sebagaimana telah dicontohkan negara jiran Malaysia⁵¹.

⁵⁰ Taqiyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), h.189

⁵¹ *Ibid*, h. 190.

4. Tantangan Penerapan Ekonomi Islam di Indonesia

Ada beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi ekonomi Islam saat ini, diantaranya⁵²:

- adanya penjajahan yang dilakukan oleh Belanda, yang menganggap bahwa Ekonomi Islam dapat menghambat, mengancam dan mengubah pemikiran rakyat Indonesia dalam melakukan kegiatan Ekonomi, padahal ketika itu pihak belanda melakukan sistem monopoli perdagangan yang memang dalam kenyataannya hal ini hukumnya haram.
- sudah teralu lama bangsa Indonesia menganut sistem Ekonomi konvensional yang membebaskan semua pelaku usahanya dengan jalan apapun untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin.
- Masih minimnya pakar ekonomi Islam berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi modern dan ilmu-ilmu syariah secara integratif,
- Ujian atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuangannya,
- Perangkat peraturan, hukum dan kebijakan, baik dalam skala nasional maupun internasional masih belum memadai,
- Masih terbatasnya perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam dan masih minimnya lembaga tranining dan consulting dalam bidang ini, sehingga SDM di bidang ekonomi dan keuangan syariah masih terbatas dan belum memiliki pengetahuan ekonomi syariah yang memadai,
- Peran pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, masih rendah terhadap pengembangan ekonomi syariah, karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang ilmu ekonomi Islam.

5. Solusi untuk menghadapi tantangan penerapan Ekonomi

⁵² Agustianto, Casmudi, *Potensi Dan Tantangan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : 2013), h. 85.

Islam di Indonesia⁵³

- ✓ Diperlukan peranan pemerintah yang tidak hanya memperhatikan segi regulasi dan legal formal saja, tetapi juga keberpihakan yang riil kepada lembaga perbankan dan keuangan syariah dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan. seperti suntikan modal, pembiayaan proyek pembangunan, tabungan dan setoran haji, pendirian Asuransi dan Bank BUMN Syariah.
- ✓ ekonomi syariah tidak hanya bisa bergantung pada lembaga keuangan syariah itu sendiri, tidak juga hanya bergantung pada peran pakar seperti IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam), tetapi semua lembaga yang harus bekerja sama dengan pemerintah (Depkeu, BI, Departemen terkait), ulama, parlemen (DPR/DPRD), perguruan tinggi, pengusaha (hartawan muslim), ormas Islam dan masyarakat Islam pada umumnya.
- ✓ Masalah sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang ekonomi syariah pada saat ini masih minim. Ini harus terus-menerus dilakukan sosialisasinya, karena tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang ekonomi syariah masih sangat rendah.⁵⁴
- ✓ Membentuk wadah untuk membahas segala persoalan ekonomi islam di indonesia.
- ✓ Membentuk pemahaman generasi-generasi muda melalui perkembangan ekonomi islam.
- ✓ Mendongkrak percepatan industri keuangan syari'ah.

53 *Ibid*, h. 90.

BAB II

KONSEP DEMOKRASI DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM UNTUK MEWUJUDKAN GENERASI CEMERLANG

A. PENGERTIAN DEMOKRASI

Secara etimologis, kata demokrasi (dari bahasa Yunani) adalah bentuk dari dua kata *demos* (rakyat) dan *cratein* (kekuasaan dan kedaulatan). Perpaduan kata *demos* dan *cratein* atau *cratos* membentuk kata demokrasi yang memiliki pengertian umum sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat dimana kekuasaan tertinggi terletak ditangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui wakil mereka melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas.¹

Demokrasi sering disandingkan dengan kebebasan (*freedom*), namun demikian, demokrasi dan kebebasan tidaklah identik : demokrasi merupakan sebuah kumpulan ide dan prinsip tentang kebebasan, bahkan juga mengandung sejumlah praktik dan prosedur menggapai kebebasan yang terbentuk melalui perjalanan sejarah yang panjang dan berliku. Secara singkat demokrasi merupakan institusional dari kebebasan (*institutionalization of freedom*).²

Ada dua pemahaman tentang demokrasi yaitu :

1. Demokrasi secara Normatif : sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, contohnya: kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan

¹ Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat madani*, (Jakarta ; ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), h.66

² *Ibid*, h. 67

sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (pasal 1, ayat 2), Tetapi belum tentu dapat dilihat dalam konteks kehidupan politik sehari-hari dalam suatu negara.

2. Demokrasi secara Empirik : demokrasi dalam perwujudannya dalam makna kehidupan politik praktis. Contohnya : sejauh mana kompetisi para pemimpin untuk mengisi jabatan politik³

Demokrasi selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara implikasinya diberbagai negara tidak selalu sama. Sekedar menunjukkan betapa rakyat diletakkan pada posisi penting dalam asas demokrasi.⁴

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan umum tersebut menentukan kehidupan rakyat.

Demi terciptanya proses demokrasi setelah terbentuknya sebuah pemerintahan demokratis lewat mekanisme pemilu demokratis, negara berkewajiban untuk membuka saluran-saluran demokrasi. Selain saluran demokrasi formal lewat DPR dan partai politik, untuk mendapat masukan dan kritik dari warga negara dalam rangka terjadinya kontrol terhadap pemerintahan, pemerintahan yang demokratis berkewajiban menyediakan dan menjaga saluran-saluran demokratis nonformal bisa berupa penyediaan fasilitas-fasilitas umum atau ruang publik (*public sphere*) sebagai saran interaksi sosial, seperti stasiun radio atau televisi, taman dan lain-lain.⁵

³ Osbert Sinaga, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, (Medan ; Penerbit Unimed Press, 2014), h.65

⁴ *Ibid*, h.66.

⁵ Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat madani*, h.68

B. SEJARAH SINGKAT DEMOKRASI

Konsep demokrasi lahir dari tradisi pemikiran Yunani tentang hubungan negara dan hukum, yang di praktikkan antara abad ke-6 SM sampai abad 4M. Demokrasi yang dipraktikkan pada masa itu berbentuk demokrasi langsung yaitu : hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Yang unik dari demokrasi kuno ini adalah ternyata hanya kalangan tertentu saja yang dapat menikmati dan menjalankan sistem demokrasi, sementara masyarakat berstatus budak, pedagang asing, perempuan dan anak-anak tidak bisa menikmati demokrasi.⁶

Demokrasi Yunani kuno berakhir pada abad pertengahan. Pada masa itu masyarakat Yunani berubah menjadi masyarakat feodal yang ditandai oleh kehidupan keagamaan terpusat pada Paus dan pejabat negara dengan kehidupan politik diwarnai dengan perebutan kekuasaan di kalangan para bangsawan.

Demokrasi lahir kembali di Eropa menjelang akhir Abad pertengahan, ditandai oleh lahir sebuah dokumen *Magna Charta* (Piagam Besar) di Inggris, yang berisikan tentang perjanjian antara beberapa bangsawan dan Raja Jhon. Lahirnya *Magna Charta* ini merupakan lahirnya suatu tonggak baru bagi perkembangan demokrasi, sebab dari piagam tersebut terlihat dua prinsip yaitu ;

1. Kekuasaan raja harus dibatasi
2. Hak manusia lebih penting dari pada kedudukan raja.⁷

Monumen lain yang menandai kemunculan kembali demokrasi di Eropa adalah gerakan pencerahan (*renaissance*) dan reformasi. *Renaissance* merupakan gerakan yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno. Pencerahan di Barat merupakan buah dari kontak Eropa dengan dunia Islam yang pada saat itu sedang berada pada

6

7 Osbert Sinaga, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Medan ; Penerbit Unimed Press, 2014), h.67

puncak kejayaan peradaban dan ilmu pengetahuan.⁸

Gerakan reformasi merupakan gerakan revolusi agama di Eropa pada abad ke-16. Tujuan dari gerakan ini merupakan gerakan kritis terhadap kebekuan doktrin gereja. Gerakan ini juga dikenal dengan gerakan protestanisme Amerika, yang menyerukan kebebasan berpikir dan bertindak gerakan kritis terhadap kejumudan gereja dan monarki absolut bertumpu pada rasionalitas yang berdasar pada hukum alam dan kontrak sosial.

Salah satu asas dalam prinsip hukum alam ini adalah pandangan bahwa dunia ini dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam yang mengandung prinsip-prinsip keadilan universal, berlaku untuk semua waktu dan orang lain, baik raja, bangsawan, maupun rakyat jelata.⁹

C. NORMA DAN PILAR DEMOKRASI

Keberhasilan demokrasi ditunjukkan oleh sejauh mana demokrasi sebagai prinsip dan acuan hidup bersama antarwarga negara dan antara warga negara dengan negara dijalankan dan di patuhi oleh kedua belah pihak. Menjadi demokratis membutuhkan norma dan rujukan praktis serta teoritis dari masyarakat yang telah maju dalam berdemokratis.¹⁰

Ada empat norma atau unsur pokok oleh tatanan masyarakat demokratis , yaitu :

1. Musyawarah
2. Harus sejalan dengan tujuan
3. Norma kejujuran dan pemufakatan
4. Kebebasan nurani, persamaan hak, dan kewajiban.

Dalam praktik pemerintahan yang dibangun terdapat beberapa pi-la-pilar demokrasi, yaitu ;

⁸ *Ibid*, h. 232

1. Kedaulatan rakyat
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah
3. Kekuasaan mayoritas (hasil pemilu)
4. Jaminan hak-hak minoritas
5. Jaminan hak-hak asasi manusia
6. Persamaan didepan hukum
7. Proses hukum yang berkeadilan
8. Pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi
9. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik
10. Dikembangkannya nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.¹¹

D. BENTUK-BENTUK DEMOKRASI

Substantive democracy, yaitu menunjuk pada bagaiman proses demokrasi itu dilakukan

1. *Formal demokrasi* menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan.
2. Demokrasi dalam bentuk ini dapat dilihat dalam pelaksanaan demokrasi yang diterapkan di suatu negara. Contohnya : sistem parlementer, yaitu badan legislatif mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada eksekutif. Sedangkan sistem presidensial, yaitu badan legislatif dan eksekutif mempunyai kedudukan yang sama dan saling melakukan kontrol melalui mekanisme *check and balances*.¹²

¹¹ Osbert Sinaga, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, (Medan ; Penerbit Unimed Press, 2014), h.68

¹² Muhamad Taupan, Pendidikan Kewarganegaraan, (Bandung ; Yrama Widya, 2011), h.73

E. CIRI-CIRI UTAMA SISTEM EKONOMI ISLAM DALAM DEMOKRASI

1. Sistem Ekonomi Islam Dalam Demokrasi Islam

Salah satu ciri yang menonjol dalam sistem ekonomi Islam ialah kegiatan ekonomi mempunyai hubungan yang rapat dengan sistem Islam demokrasi ada dari segi aqidah mahupun syariatnya. Sistem ekonomi Islam tidak boleh dipisahkan daripada dasar-dasar aqidah dan nilai-nilai syariat Islam. di segi aqidah, sistem ekonomi Islam dilandaskan kepada hakikat bahawa Allah adalah Pencipta dan Pemilik alam semesta seperti firman Allah:¹³

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً^{١٣} وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ

Artinya: *Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan. (Luqman: 20)*

2. Mewujudkan Keseimbangan Di Antara Kepentingan Individu Dengan Kepentingan Masyarakat

Dalam sistem ekonomi Islam kepentingan individu dan kepentingan masyarakat adalah sehaluan dan selari, bukannya bertentangan di antara satu sama lain sebagaimana Yang dirumuskan oleh sistem-sistem lain. Untuk mewujudkan keseimbangan ini, sistem Ekonomi Islam memberi kebebasan bagi anggota masyarakat untuk terlibat dengan berbagai-bagai jenis kegiatan ekonomi yang halal di samping menyelaraskan beberapa bidang kegiatan tersebut menerusi kuasa undang-undang dan pemerintahan.¹⁴

¹³ *Ibid*, h.89

¹⁴ Osbert Sinaga, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, (Medan ; Penerbit Unimed Press, 2014), h.167

F. TUJUAN EKONOMI ISLAM

1. Menunaikan Sebahagian Daripada Tuntutan Ibadah

Mengambil kira asas-asas dan ruang lingkup ciri-cirinya, nyatalah tujuan ekonomi Islam adalah bersifat ibadah dan melaksanakannya berarti melaksanakan sebahagian daripada tuntutan ibadah yang menyeluruh. Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:¹⁵

“Sesungguhnya kamu tidak keluarkan satu nakah pun yang kamu cari di jalan Allah melainkan kamu diberi pahala kerananya, sekalipun nafkah yang kamu berikan untuk isterimu.” (Bukhari, Muslim)

Roh dibalik semua kegiatan ekonomi Islam ialah *taawun* atau kerjasama. Oleh itu siapa yang membantu saudara-saudaranya dan masyarakatnya semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka itu merupakan satu ibadah.

2. Menegakkan Keadilan Sosial Dan Ekonomi Dalam Masyarakat

Kegiatan ekonomi yang berteraskan kepada kesaksamaan serta Menghapuskan Penindasan dan penipuan adalah satu sistem yang benar-benar Dapat menegakkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Di atas dasar inilah Islam membenarkan jual beli dan mengharuskan riba dan segala jenis penipuan. Sistem ekonomi yang berteraskan kepada kerjasama dan kesaksamaan akan mewujudkan rasa kasih sayang, sifat tanggung jawab dan tolong-menolong di antara satu sama lain. Kesan daripadanya bukan saja individu-individu dapat menanurkan pembangunan dirinya, malah negara-negara dapat bantu-membantu dalam memenuhi kemaslahatan seluruh umat manusia.¹⁶

3. Mengekalkan Keamanan Dan Kepatuhan Terhadap Undang-Undang

Rasa tidak puas hati manusia dalam sebuah masyarakat lantaran pengagihan ekonomi yang tidak seimbang dan aktiviti-aktiviti yang di-

¹⁵ *Ibid*, h. 177

¹⁶ *Ibid*, h.234

arahkan hanya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, akan membawa berbagai gejala yang bahaya kepada manusia. Asas-asas ekonomi Islam bersandarkan kepada tuntutan iman dan akhlak serta sedikit kuat kuasa undang-undang. Namun dalam pengertian sistem akhlak Islam yang sebenar, tuntutan-tuntutan akhlak ini tidak dapat dilaksanakan secara teguh tanpa bernaung di bawah satu sistem yang mempunyai kewibawaan untuk menegakkan undang-undang. Dengan sistem-sistem Islam inilah, tujuan ekonomi dalam mewujudkan kepatuhan orang ramai terhadap undang-undang serta mengekalkan keamanan tercapai.¹⁷

4. Mewujudkan Keharmonian Hubungan Antarabangsa Dan Memasihkan Kekuatan Pertahanan Negara

Menurut Islam, keharmonian hubungan antarabangsa wujud di atas dasar kerjasama sosial dan ekonomi, bukan di atas penindasan terhadap keduanya sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Sebab itulah Islam juga tidak menganggap bahwa pertahanan negara hanya bergantung kepada semangat keimanan atau bilangan tenaga tentara yang ramai tetapi kekuatan pertahanan juga bergantung kepada kekuatan ekonomi.¹⁸ Atas dasar ini Allah memerintahkan kaum muslimin agar bersikap sedia dengan apa saja kekuatan yang dapat menimbulkan rasa takut musuh terhadap mereka.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ

Artinya : *Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas*

¹⁷ *Ibid*, h. 235

¹⁸ Muhamad Taupan, Pendidikan Kewarganegaraan, (Bandung ; Yrama Widya, 2011), h.212

dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). (Al-Anfal:60)

G. DEMOKRASI DALAM ISLAM

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *Demos* berarti rakyat, dan *cratein* bermakna kekuasaan. Karena kekuasaan itu ada di rakyat, maka rakyatlah yang berdaulat, oleh karena itu demokrasi diartikan dengan kedaulatan rakyat.

Kedaulatan mutlak dan Ke-Esaan Tuhan yang terkandung dalam konsep tauhid dan peranan manusia yang terkandung dalam konsep khilafah memberikan kerangka yang dengannya para cendekiawan belakangan ini mengembangkan teori politik tertentu yang dapat dianggap demokratis. Di dalamnya tercakup definisi khusus dan pengakuan terhadap kadaulatan rakyat, tekanan pada kesamaan derajat manusia, dan kewajiban rakyat sebagai penganut pemerintah.¹⁹

Penjelasan mengenai demokrasi dalam kerangka konseptual Islam, banyak memberikan perhatian pada beberapa aspek khusus dari arah social dan politik. Demokrasi Islam dianggap sebagai sistem yang mengukuhkan konsep-konsep Islami yang sudah lama berurat berakar yaitu:²⁰

1. Musyawarah (Syura)

Perlunya musyawarah merupakan konsekuensi politik kekhalifahan manusia. Oleh karena itu perwakilan rakyat dalam sebuah negara Islam tercermin terutama dalam doktrin musyawarah. Hal ini disebabkan menurut ajaran Islam, setiap muslim yang dewasa dan berakal sehat, baik pria maupun wanita adalah khalifah Allah di bumi. Dalam bidang politik, umat Islam mendelegasikan kekuasaan mereka kepada penguasa dan pendapat mereka harus diperhatikan dalam menangani masalah negara. Kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah *ijtihadiyyah*, dalam surat Al-syura ayat 38 :

¹⁹ *Ibid*, h.233.

²⁰ *Ibid*, h. 235-236.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya : *“Dan orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.*(QS Asy-Syura : 38).

2. Persetujuan (Ijma)

Ijma atau konsensus telah lama diterima sebagai konsep pengesahan resmi dalam hukum Islam. Konsensus memainkan peranan yang menentukan dalam perkembangan hukum Islam dan memberikan sumbangan pemikiran sangat besar pada tafsir hukum. Konsensus dan musyawarah sering dipandang sebagai landasan yang efektif bagi demokrasi Islam modern. Konsep konsensus memberikan dasar bagi penerimaan sistem yang mengakui suara mayoritas. Atas dasar inilah konsensus dapat menjadi legitimasi sekaligus prosedur dalam suatu demokrasi Islam.²¹

3. Penilaian Interpretatif Yang Mandiri (Itjihad)

Upaya ini merupakan langkah kunci menuju penerapan perintah Tuhan di suatu tempat atau waktu. Tuhan hanya mewahyukan prinsip-prinsip utama dan memberi manusia kebebasan untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan arah yang sesuai dengan semangat dan keadaan zamannya. Itjihad dapat berbentuk seruan untuk melakukan pembaharuan, karena prinsip-prinsip Islam itu bersifat dinamis, pendekatan kitalah yang telah menjadi statis. Oleh karena itu sudah secepatnya dilakukan pemikiran ulang yang mendasar untuk membuka jalan bagi munculnya eksplorasi, inovasi dan kreativitas.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa musyawarah, konsensus dan itjihad merupakan konsep-konsep yang sangat penting bagi artikulasi demokrasi Islam dalam kerangka Keesaan Tuhan dan kewajiban-kewa-

²¹ Muhamad Taupan, Pendidikan Kewarganegaraan, (Bandung ; Yrama Widya, 2011), h.253.

jiban manusia sebagai khalifah-Nya. Sehingga antara hukum, Hak Asasi Manusia dan demokrasi merupakan tiga konsep yang tidak dapat dipisahkan.²²

Hal ini disebabkan karena salah satu syarat utama terwujudnya demokrasi adalah adanya penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Demokrasi akan selalu rapuh apabila HAM setiap warga masyarakat tidak terpenuhi. Sedangkan pemenuhan dan perlindungan HAM akan terwujud apabila hukum ditegakkan, karena Al Qur'an sebagai sumber ajaran utama dan pertama agama Islam mengandung ajaran tentang nilai-nilai dasar yang harus diaplikasikan dalam pengembangan sistem politik Islam.²³

4. Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Islam

Prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam meliputi

Pertama, Syura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam al-Qur'an. Misalnya saja disebut dalam QS. As-Syura:38 dan Ali Imran:159. Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana syura adalah *ahl halli wal'aqdi* pada zaman khulafaurrasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah. Jelas bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama.²⁴

Kedua, *al-'adalah* adalah keadilan, artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus

²² Osbert Sinaga, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, (Medan ; Penerbit Unimed Press, 2014), h.177.

²³

²⁴ *Ibid*, h.178.

dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah Pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain dalam surat an-Nahl: 90; QS. as-Syura: 15; al-Maidah: 8; An-Nisa': 58, dan seterusnya. Betapa prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga ada ungkapan yang "ekstrim" berbunyi: "Negara yang berkeadilan akan lestari kendati ia negara kafir, sebaliknya negara yang zalim akan hancur meski ia negara(yang mengatasnamakan) Islam".

Ketiga, al-Musawah adalah kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat.²⁵

Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang

dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Sebagian ulama' memahami al-musawah ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip al-syura dan al-'adalah. Diantara dalil al-Qur'an yang sering digunakan dalam hal ini adalah surat al-Hujurat:13, sementara dalil sunnah-nya cukup banyak antara lain tercakup dalam khutbah wada' dan sabda Nabi kepada keluarga Bani Hasyim.

Keempat, al-Amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tang-

²⁵ Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat madani*, (Jakarta ; ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), h.98

gung jawab. Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil seperti ditegaskan Allah SWT dalam Surat an-Nisa':58. Karena jabatan pemerintahan adalah amanah, maka jabatan tersebut tidak bisa diminta, dan orang yang menerima jabatan seharusnya merasa prihatin bukan malah bersyukur atas jabatan tersebut. Inilah etika Islam.

Kelima, al-Masuliyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa, kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Dan kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan.²⁶

Seperti yang dikatakan oleh Ibn Taimiyyah, bahwa penguasa merupakan wakil Tuhan dalam mengurus umat manusia dan sekaligus wakil umat manusia dalam mengatur dirinya. Dengan dihayatinya prinsip pertanggungjawaban (*al-masuliyah*) ini diharapkan masing masing orang berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pemimpin/penguasa tidak ditempatkan pada posisi sebagai *sayyid al ummah* (penguasa umat), melainkan sebagai *khadim al-ummah* (pelayan umat). Dengan demikian, kemaslahatan umat wajib senantiasa menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan oleh para penguasa, bukan sebaliknya rakyat atau umat ditinggalkan.²⁷

Keenam, al-Hurriyah adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan *al-akhlaq al-karimah* dan dalam rangka *al-amr bi-l-ma'ruf wa an-nahy 'an al-'munkar*, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi kontrol

²⁶ *Ibid*, h.95

²⁷ *Ibid*, h. 102

dalam suatu masyarakat, maka kezaliman akan semakin merajalela.

5. Upaya Menegakkan Demokrasi yang Islami

Istilah demokrasi muncul di tengah-tengah masyarakat menunjukkan pada partisipasi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan negara, partisipasi masyarakat tersebut berupa duduknya wakil-wakil mereka dalam pemerintah yang sebelumnya didahului dengan diadakannya Pemilihan Umum.

Namun usaha untuk menerapkan negara yang benar-benar demokratis tidak mudah. Dalam proses demokrasi, pemilihan umum misalnya, masih terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan berupa pembelian suara oleh partai tertentu serta usaha-usaha untuk mendapatkan kekuasaan ataupun mempertahankan kekuasaan dengan memanfaatkan kekuatan politik.

Indonesia sebagai negara demokrasi telah mengalami pasang surut menerapkan sistem tersebut. Diawali dengan diberlakukannya sistem demokrasi liberal, kemudian sistem demokrasi terpimpin dan sistem demokrasi pancasila. Ketiga sistem demokrasi itu akhirnya tidak dapat memberikan kesejahteraan masyarakat secara luas. Penindasan masih juga berjalan, dan usaha-usaha untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak bermoral masih terjadi.²⁸

6. Konsep Islam Mengenai Negara Dan Kekuasaan

Islam merupakan agama universal yang memberikan pedoman bagi setiap aspek kehidupan manusia, termasuk juga didalamnya tentang aspek kehidupan bernegara. Khusus mengenai kehidupan bernegara, Islam memberikan pedoman dengan amat global, tentu hanya diajarkan prinsip-prinsipnya, guna memberikan kesempatan-kesempatan bagi interpretasi dan perkembangan masyarakatnya sesuai dengan kebutuhan hidup yang senantiasa berkembang. Dengan demikian pemikiran-pemikiran

²⁸ Osbert Sinaga, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, (Medan ; Penerbit Unimed Press, 2014), h.180.

dalam bidang kehidupan politik memperoleh ruang gerak yang sangat luas.²⁹

Konsep masyarakat politik dalam islam terutama haruslah didasarkan pada ajaran islam (Al-Qur'an dan As-Sunnah), dapat dimengerti sepenuhnya bahwa sejak semula Al-Qur'an tidak memberikan konsep tentang negara melainkan konsep tentang masyarakat. Harus diingat pula bahwa Al-Qur'an lebih bersifat simbolik dari pada deskriptif.

Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan Allah sebagai pengemban amanat (Q.S.Al-Ahzab:72). Di antara amanat Allah yang dibebankan pada manusia adalah agar memakmurkan kehidupan di bumi (Q.S.Huud: 61). Karena amat mulianya manusia diberi kedudukan sebagai khalifatullah (Q.S.Al-Baqoroh :30).

Islam yang memiliki ajaran moral menjadi alternatif, sebab islam menginginkan terbentuknya masyarakat yang ditegakkan di atas sendi-sendi moral yang utama demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan persaudaraan. Menjadi penguasa/pemimpin dalam islam haruslah memiliki wawasan keagamaan yang menyatu dengan wawasan kekuasaan. Kemampuan menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar merupakan prasyarat tegaknya tata sosial-politik yang berorientasi keadilan. Untuk mencapai tujuan ini pembentukan masyarakat islam wajib menjadi program utama.³⁰

7. Solusi yang harus kita lakukan dalam sistem demokrasi ekonomi islam yaitu :

- a) Sebagai bangsa yang mayoritas islam sudah seharusnya nilai-nilai keislaman ditransformasikan dalam segala aspek kehidupan, dalam islam sistem hidup telah diatur dalam dua dimensi. Pertama dimensi vertikal (*hablumminallah*) dan dimensi horizontal (*hablumminannas*).

²⁹ Muhamad Taupan, Pendidikan Kewarganegaraan, (Bandung ; Yrama Widya, 2011), h.255.

³⁰ *Ibid*, h.256.

- b) Dalam Al-Qur'an menegaskan : "katakan : sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah, pemeliharaan alam semesta, jadi dalam ayat ini sholat, berdagang ataupun membicarakan masalah-masalah politik misalnya, pembatasan jabatan presiden di DPR tidak dapat dipisahkan antara ibadah dan kerja sekuler.
- c) Dewasa ini demokrasi adalah sistem politik yang terbaik yang dipilih oleh suatu negara yang mana dengan sistem demokrasi kebebasan individu dan keterlibatan rakyat dalam pemerintahan terjamin, tetapi kita senantiasa melihat kelambanan dan kelemahan demokrasi untuk memenuhi harapan-harapan rakyat.

BAB III

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP NEGARA DAN BANGSA INDONESIA

A. GLOBALISASI

Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit.

Globalisasi juga adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan memengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara.

Terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, makna globalisasi memiliki dimensi luas dan kompleks yaitu bagaimana suatu negara yang memiliki batas-batas teritorial dan kedaulatan tidak akan berdaya untuk menepis penerobosan informasi, komunikasi dan transportasi yang dilakukan oleh masyarakat di luar perbatasan. Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan memengaruhi satu sama lain yang melintasi batas Negara.

Globalisasi berpengaruh pada hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Ada masyarakat yang dapat menerima adanya globalisasi,

seperti generasi muda, penduduk dengan status sosial yang tinggi, dan masyarakat kota. Namun, ada pula masyarakat yang sulit menerima atau bahkan menolak globalisasi seperti masyarakat di daerah terpencil, generasi tua yang kehidupannya stagnan, dan masyarakat yang belum siap baik fisik maupun mental.

B. NEGARA DAN BANGSA INDONESIA

Pada hakikatnya negara adalah suatu organisasi masyarakat, yaitu sekelompok orang yang dengan kerjasama dan pembagian tugas, mengejar suatu tujuan bersama yang tidak dapat dicapai sendiri-sendiri. Akan tetapi berbeda dengan organisasi masyarakat lain, negara adalah suatu organisasi masyarakat yang berdaulat. Berdasarkan kedaulatannya ini negara dapat menentukan bahwa semua orang yang mendiami wilayahnya, kecuali orang asing adalah warganya dan harus tunduk kepadanya. Orang-orang tidak ditanya lebih dahulu, tetapi secara otomatis adalah warga negara dengan berbagai hak dan kewajiban.¹

Tujuan negara Indonesia terdiri dari tiga pokok, yaitu : (1) melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (3) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Disadari bahwa Indonesia tidak dapat hidup sendirian dan tidak dapat berkembang sewajarnya sesuai dengan perkembangan umat manusia dan kemajuan dalam segala bidang, lepas dari negara-negara lain.

Istilah bangsa sering disebut dengan istilah rakyat. Untuk membedakan keduanya para ahli mengatakan bahwa bangsa adalah suatu pengertian politis, sedangkan rakyat adalah suatu pengertian sosiologis.

Beberapa definisi bangsa:

1. Ernest Renan (Perancis)

Rakyat adalah sekelompok manusia yang memiliki kebudayaan atau

¹ Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, (Jakarta, CV.Rajawali, 1985), h.2.

adat istiadat yang sama, sedangkan bangsa adalah sekelompok manusia yang ada dalam ikatan batin yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah dan cita-cita yang sama.

2. Otto Bauer (Jerman)

Bangsa merupakan sekelompok manusia yang memiliki karakter karena persamaan nasib dan pengalaman sejarah budaya yang tumbuh berkembang bersama dengan tumbuh kembangnya bangsa.

3. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Bangsa menurut hukum adalah rakyat atau orang-orang yang berada dalam suatu masyarakat hukum yang terorganisir. Kelompok ini umumnya menempati bagian atau wilayah tertentu, berbicara dalam bahasa sama, memiliki sejarah, kebiasaan, dan kebudayaan yang sama, serta terorganisir dalam suatu pemerintahan yang berdaulat.

Dari beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa bangsa adalah sekelompok orang yang dipersatukan karena memiliki persamaan latar belakang sejarah, cita-cita, dan keinginan untuk bernegara.² Berdasarkan pengertian tersebut, bangsa pada hakikatnya mempunyai unsur-unsur berikut:

- Cita-cita bersama yang mengikat dan menjadi satu kesatuan.
- Perasaan senasib sepenanggungan.
- Karakter yang sama
- Adat istiadat atau budaya yang sama.
- Satu kesatuan wilayah.
- Terorganisir dalam satu wilayah hukum.

Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa terbentuknya suatu

² Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006), h.67

bangsa terjadi karena adanya suatu masalah-masalah politik. Diantaranya adalah

- Faktor pembentuk bangsa menurut identitas

Faktor-faktor pembentuk bangsa-bangsa sangat berkaitan dengan identitas yang menyatukan masyarakat. Faktor-faktor itu meliputi primordial, sakral, tokoh, bhineka tunggal ika, konsep sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan.

- Faktor pembentuk bangsa menurut segi organisasi

Dari beberapa pendapat tentang negara, ternyata negara memiliki arti yang lebih luas antara lain:

- Negara sebagai organisasi kekuasaan
- Negara sebagai organisasi politik
- Negara ditinjau dari segi organisasi kesusilaan
- Negara ditinjau dari segi integritas antara pemerintah dan rakyat.

C. DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Kita harus mengakui bahwa globalisasi telah membawa dampak yang luas dalam kehidupan manusia. Dampak yang ditimbulkan globalisasi tidak semuanya bersifat positif akan tetapi ada juga yang berdampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seiring berputarnya waktu dan roda kehidupan dunia, globalisasi pun terus berjalan. Globalisasi membawa dampak / pengaruh yang besar bagi kehidupan Negara-negara dan bangsa di dunia, khususnya Indonesia. Pengaruh-pengaruh globalisasi terhadap kehidupan Negara dan bangsa Indonesia diantaranya adalah pada bidang politik, sosial budaya, ekonomi,

dan hankam (pertahanan dan keamanan).

1. Dampak Globalisasi dalam Bidang Politik

Globalisasi politik merupakan pergulatan global dalam mewujudkan kepentingan para pelaku yang menjalankannya. Para pelaku globalisasi dibidang politik adalah:

- a. Negara-negara besar dan negara-negara kecil, negara-negara maju dan negara-negara berkembang, negara-negara yang kuat dan yang inilah secara ekonomi, negara yang kuat dan yang lemah secara militer, negara-negara yang berdiri sendiri atau yang bergabung dengan negara lain.
- b. Organisasi-organisasi antar pemerintah, seperti ASEAN, SARC, NATO, European Community & sebagainya.
- c. Perusahaan internasional yang dikenal dengan nama *Multinational Corporations* (MNC).
- d. Perusahaan internasional atau transnasional yang non pemerintah, seperti Palang Merah Internasional, *Working Men's Association* dan *International Women's League For Pence and Freedom*. Sedangkan yang bersifat konvensional, seperti Vatikan, Dewan gereja-gereja sudia, Rabiyatul Islamiyah. Untuk yang modern, antara lain : Amnesty International, Green-Peace International, World Conference on religion ang peace, Word Federation of United Nations Associations, Transparency International, Worldwatch, Human Rights Watch, dan Refuge International.

Pengaruh globalisasi politik di Indonesia yaitu terjadinya dinamika ketatanegaraan sistem politik yang mula-mula berbentuk demokrasi liberal, kemudian menjadi demokrasi terpimpin dan akhirnya menjadi demokrasi pancasila yang dianut hingga sekarang ini.

Globalisasi mempengaruhi aplikasi kekuasaan, hubungan internasional, kedaulatan negara, dan organisasi internasional. Termasuk di dalamnya adalah pembatasan antar negara tetangga atau bentuk perjan-

jian-perjanjian / traktat internasional. Contohnya hubungan Indonesia dan Malaysia yang semula bersahabat, sempat berselisih paham karena masalah TKI ilegal, penyelundupan kayu illegal oleh warga Malaysia, serta lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan dari wilayah Indonesia yang kini menjadi bagian wilayah Malaysia.

Pengaruh positif globalisasi politik bagi Indonesia yaitu pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara, jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih dan dinamis tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat.

Sedangkan pengaruh negatif globalisasi politik bagi Indonesia, globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Sehingga tidak menutup kemungkinan berubahnya ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tersebut terjadi akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang.

2. Pengaruh Globalisasi dalam Bidang Sosial Budaya

Globalisasi membawa pengaruh bagi kehidupan sosial dan budaya bangsa. Globalisasi menyebabkan banyaknya nilai-nilai dan budaya masyarakat yang mengalami perubahan dengan cara meniru atau menerapkannya secara selektif. Salah satu contoh perubahan di bidang sosial yaitu dengan hadirnya modernisasi di segala bidang kehidupan, terjadi perubahan ciri kehidupan masyarakat desa yang tadinya syarat dengan nilai-nilai gotong royong menjadi individual. Selain itu juga timbulnya sifat ingin serba mudah dan gampang (instan) pada diri seseorang. Pada sebagian masyarakat, juga sudah banyak yang mengikuti nilai-nilai budaya luar yang dapat berpengaruh negatif maupun positif.

Dampak positif globalisasi dalam bidang sosial budaya diantaranya:

- a. Mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan
- b. Mudah melakukan komunikasi

- c. Cepat dalam bepergian (mobilitas tinggi)
- d. Menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran
- e. Memacu untuk meningkatkan kualitas diri
- f. Mudah memenuhi kebutuhan

Dampak negatif globalisasi dalam bidang sosial budaya diantaranya:

- a. Informasi yang tidak tersaring
- b. Perilaku konsumtif
- c. Membuat sikap menutup diri, berpikir sempit
- d. Pemborosan pengeluaran dan meniru perilaku yang buruk
- e. Mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat
- f. Disorientasi, dislokasi atau krisis sosial-budaya dalam masyarakat.
- g. Berbagai ekspresi sosial budaya asing yang sebenarnya tidak memiliki basis dan preseden kulturalnya.
- h. Semakin merebaknya gaya hidup konsumerisme dan hedonisme.

3. Pengaruh Globalisasi dalam Bidang Ekonomi

Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas geografi dari kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional atau regional, tetapi semakin mengglobal menjadi “satu” proses yang melibatkan banyak negara.³ Globalisasi perekonomian mengharus-

³ Tulus T.H. Tambunan, *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2004), h.2.

kan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik.

Kekuatan globalisasi ekonomi atau globalisasi kapitalisme adalah liberalisme ekonomi. Ilmuan menyebutkan kapitalisme pasar bebas. Berbeda dengan kapitalisme kesejahteraan, yaitu kapitalisme yang diregulasi dan direformasi, kapitalisme ini tidak membiarkan pasar berjalan sebebas-bebasnya tanpa kendali, tapi perlu diatur agar kapitalisme memberikan keuntungan dan keadilan sampai orang-orang dibawah tingkat kesejahteraan.

a. Kapitalisme

Suatu sistem ekonomi yang mengatur proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Ciri-cirinya: sebagian besar sarana produksi dimiliki individu, barang dan jasa diperdagangkan dipasar bebas (free market) yang kompetitif (terbuka untuk siapa saja) dan modal diinvestasikan dalam usaha untuk menghasilkan laba.

b. Kenyataan

Abad ke-19, kapitalisme pasar bebas hanya menguntungkan Negara kaya. Banyak orang yang semakin miskin karena kapitalisme ini. Kapitalisme ini telah melampaui kesederhanaan dan tenaga kerja menjadi roda dan mesin kapitalis raksasa. Pada akhir abad 20, kapitalisme mengendalikan hampir seluruh perekonomian internasional. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mendukung kapitalisme pasar bebas. Wujud nyata globalisasi ekonomi terjadi pada aspek :

1) Aspek produksi

Perusahaan dapat memproduksi diberbagai Negara dengan sasaran agar biaya produksi lebih rendah.

2) Aspek pembiayaan akses perolehan investasi

3) Aspek tenaga kerja

4) Aspek jaringan informasi; dengan cepat dan mudah mendapatkan informasi.

5) Aspek perdagangan ; penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non tarif.

4. Pengaruh Globalisasi dalam Bidang Hankam (Pertahanan dan Keamanan)

Hankam merupakan upaya-upaya setiap negara dalam mempertahankan kedaulatan negaranya melalui pembuatan sistem persenjataan maupun pemberdayaan rakyat dan tentaranya. Globalisasi bidang hankam yang pernah dirasakan masyarakat dunia, yaitu dengan dibentuknya pakta pertahanan NATO, SEATO, WARSAWA, dan sebagainya. Dalam bidang hankam, negara Indonesia selain memperkuat berbagai sistem persenjataan di darat, udara dan laut juga melakukan upaya-upaya keamanan rakyat semesta dan kedaulatan nasional. Negara Indonesia dalam partisipasi menjaga keaman internasional, juga pernah mengirim Pasukan Garuda kebeberapa negara atas mandat Dewan Keamanan PBB.

Pengaruh globalisasi dibidang hankam sangat tampak terutama pada industri-industri pertahanan sebagai tatanan segenap potensi industri nasional baik milik pemerintah ataupun swasta, yang mampu secara sendiri atau kelompok, untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan peralatan hankam serta jasa pemeliharaan guna kebutuhan pertahanan keamanan negara.

Bidang-bidang industri pertahanan dan keamanan, khususnya neg-

ara Indonesia, telah berupaya melakukan kerja sama dengan negara-negara lain baik untuk kepentingan TNI darat, laut, udara maupun kepolisian negara sebagai berikut :

- a. Sistem senjata meliputi platform, senjata dan bahan peledak.
- b. Sistem Komando Kendali Komunikasi dan Informasi (K3I).
- c. Untuk platform udara.

Selain itu, pengaruh globalisasi di bidang hankam adalah semakin menguatnya supremasi rofe, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. Menguatnya regulasi rofe dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak rofe (polisi, jaksa, dan hakim) yang lebih rofessional, transparan dan akuntabel.

Namun, globalisasi dalam bidang hankam juga membawa pengaruh negatif / kurang baik. Peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, ketertiban Negara semakin berkurang karena hal tersebut telah menjadi tanggung jawab tentara dan polisi. Perubahan dunia yang cepat mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global. Sering kali masyarakat mengajukan tuntutan pada pemerintah, dan jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi maka masyarakat cenderung bertindak anarkis sehingga mengganggu ketertiban, bahkan dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

5. Pengaruh Negara Lain yang Dirasakan Indonesia

Di Indonesia, gaung globalisasi sudah terasa sejak pertengahan abad ke-20, dalam hal ini bangsa Indonesia memang sudah harus bersiap-siap untuk menerima kenyataan masuknya pengaruh asing terhadap berbagai aspek di Indonesia, khususnya pada bidang politik, sosial budaya, ekonomi, dan hankam. Globalisasi telah memberi dampak yang begitu besar bagi Negara dan bangsa Indonesia. Pengaruh-pengaruh tersebut

ada yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri maupun dari Negara lain. Negara China dan Amerika Serikat merupakan contoh nyata dari Negara yang memberikan pengaruhnya di era global ini pada Indonesia.

Pertama yaitu pengaruh bagi Indonesia yang bersumber dari Negeri Tirai Bambu, China. China merupakan Negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonominya. Bisa dikatakan China merupakan Negara dengan perekonomian terbesar di era Globalisasi Ini. Dampak dari pertumbuhan ekonomi di China ini juga dirasakan oleh bangsa Indonesia. China memberi banyak dampak globalisasi kepada Indonesia terutama dibidang ekonomi. "*Made In China*". Kata itu mungkin tidak asing bagi telinga jutaan penduduk Bangsa Indonesia. China memberikan dampak Pasar Bebas kepada Indonesia. Dengan adanya pasar bebas ini, kita sebagai warga Indonesia bisa merasakan bahan-bahan hasil dari China, yang berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu juga, Lembaga Survei Indonesia mengatakan 40 % Perusahaan di Indonesia saat ini dikuasai atau disahami oleh orang-orang China. Sehingga, Indonesia dapat memperbaiki perekonomian dengan ditanami saham-saham yang ditanam orang-orang China tersebut.

Namun bukan itu saja, ada juga dampak buruk yang dirasakan Bangsa Indonesia. Dengan maraknya barang-barang buatan China yang murah dan menarik ini, mematikan laju perekonomian pasar tradisional yang menjual barang-barang hasil tradisional Indonesia. Cenderung menikmati pasar modern ketimbang pasar tradisional. Ini sama saja dengan membuat naik angka pengangguran di Indonesia. Selain itu dengan ditanamnya saham-saham oleh pengusaha-pengusaha China. Ini membuat Pengusaha-pengusaha muda Indonesia menjadi tidak di berikan kepercayaan untuk memimpin suatu perusahaan. Akibatnya, jika ini terus menerus terjadi maka laju perekonomian bangsa Indonesia seluruhnya dipegang oleh China. Ini sama saja kita selaku bangsa Indonesia kembali dijajah.

Lalu disusul dengan Negara adidaya, Amerika Serikat. Jikalau bicara tentang teknologi, Amerika Serikat lah asalnya. Tak perlu diragukan

lagi, Amerika memang dalang teknologi di era globalisasi ini. Komputer, telepon genggam (hp), gadget, laptop semua berawal dari sana. Hampir seluruh rakyat Indonesia menggunakan hp. Dampak teknologi Amerika serikat sangat berperan disini. Komputer dan laptop pun bukan hal baru bagi rakyat Indonesia. Orang-orang Indonesia khususnya di perkantoran, pasti menggunakan laptop maupun computer. Ini merupakan langkah besar Amerika Serikat dalam meraup keuntungan sebesar-besarnya. Sejak 3 tahun lalu, terkenal istilah BBMan, Ping-pingan. Semua itu istilah dari blackberry, produk asli buatan Amerika dan banyak digunakan bangsa Indonesia. Facebook dan Twitter juga merupakan situs jejaring sosial yang banyak digunakan di Indonesia yang berasal dari Negeri Paman Sam tersebut. Film-Film Hollywood yang kita nonton sehari-hari juga merupakan kemajuan dari teknologi di Amerika serikat.

Selain dua Negara besar tersebut, Negara-negara lain yang merupakan tetangga Indonesia juga membawa pengaruh bagi Negara dan bangsa Indonesia yang ditinjau dari segi kehidupannya dan menyebabkan perubahan, yaitu:

- a. Tren yang mengglobal : Perekonomian global merupakan hasil beberapa tren, yang pertama, bangkitnya komunikasi global instan yang dimungkinkan oleh terobosan teknologi komunikasi dan semikonduktor yang memiliki kemampuan mengirimkan pesan keseluruh dunia dalam hitungan detik, sehingga memungkinkan suatu perusahaan untuk mengontrol atau mengelola bisnis kantor pusat yang jauh. Yang kedua gelombang deregulasi dan memperlemah kontrol pemerintah nasional atas aktivitas ekonomi. Tren yang ketiga adalah menjamurnya pasar uang global, sehingga nilai mata uang ditentukan oleh pasar.
- b. Perusahaan global, sekitar 50.000 perusahaan sekarang ini yang memiliki operasi berskala global yang dipelopori oleh perusahaan multinasional (Multinational Companies, MMC) dengan memiliki cabang di luar negeri tetapi dijalankan oleh kantor pusatnya di sebuah Negara tertentu.

- c. Berkurangnya kedaulatan Negara, globalisasi mengurangi kemampuan pemerintah nasional dalam mengontrol perekonomian mereka sendiri sebab perusahaan internasional bergerak melebihi jangkauan hukum nasional. Dengan kata lain globalisasi telah mengurangi demokrasi sebab dengan menurunnya kedaulatan suatu Negara berarti berkurangnya kekuasaan warga Negara untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.
- d. Pertumbuhan Macan Asia, dengan berlakunya kebijakan yang berorientasi pasar, membuka pasar dalam negerinya, dan membuka diri terhadap investasi asing, maka Negara Asia pun tumbuh menjadi macan Asia seperti Singapura, Korea, Hongkong, Negara miskin mengalami perkembangan ekonomi yang pesat, uang banyak. Namun uang banyak mengakibatkan krisis ekonomi sebab bank-bank kehilangan kontrol terhadap debiturnya, nilai mata uang negara Asia selalu dikaitkan dengan dolar Amerika dan kebijakan global.
- e. Krisis ekonomi, dimulai di Thailand karena tidak ada kontrol riil aliran investasi ke Thailand sehingga tidak ada pula kontrol riil atas investasi ke luar, sehingga bank-bank dan investor asing menarik investasinya dan menuntut pembayaran. Inilah yang menjadi krisis ekonomi karena penolakan pasar yang tiba-tiba. Hal ini terjadi di Malaysia, Filipina, Indonesia, Korea selatan.
- f. Masa depan Kapitalisme Global, guncangan ekonomi global seperti krisis moneter Asia akan terus terjadi, oleh karena itu para pemimpin baru di Asia, termasuk Indonesia harus menyeimbangkan kebutuhan akan stabilitas sosial dan kemakmuran dengan efisiensi dan keuntungan yang dituntut oleh pasar bebas.

D. UPAYA MENGHADAPI GLOBALISASI

Globalisasi telah membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat dunia. Tidak ada sekat yang menghalangi terjadinya komunika-

si antar individu. Globalisasi juga telah menyuguhkan banyak informasi yang berasal dari negara lain. Berbagai macam informasi mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Banyak hal positif dari pertukaran arus informasi ini kita dapat. Namun juga tidak sedikit hal yang negatif yang terkandung di dalamnya. Demikian juga lewat televisi kita, banyak disuguhkan film-film asing. Umumnya kita merasa terhibur apabila menonton film-film asing, seperti telenovela. Dengan demikian, kita tidak kuasa menahan informasi dan pengaruh dari luar.

Bagaimana sikap kita terhadap globalisasi ini? Globalisasi bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Kita harus pandai atau arif menyikapinya. Kita harus pandai-pandai dalam memilih informasi termasuk film-film dari luar. Informasi atau film dari luar yang baik (positif) kita ambil, sedangkan informasi atau film yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita (negatif) kita buang.

Tindakan atau Antisipasi pengaruh Negatif Globalisasi

1. Menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misalnya mencintai produk dalam negeri.
2. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya.
3. Mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti seadil-adilnya dan sebenar-benarnya.
4. Selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya bangsa.

BAB IV

PERAN BUMN

A. DASAR DAN HAKIKAT KEBERADAAN BUMN

1. Peran Negara dalam Perokonomian

Keberhasilan pembangunan ekonomi di Negara-negara asia timur sebelum krisis 1997-1998 kerap diasosiasikan dengan kuatnya peranan pemerintah. Di Negara-negara Asia timur pemerintah dan swasta berinteraksi dalam suatu jalinan kelembagaan yang memungkinkan terpacunya pertumbuhan usaha atau industri yang efisien dan berdaya saing. Sebelum krisis sedikit ekonom liberal atau neo-klasik yang bersikukuh bahwa keberhasilan asia timur tetap bisa dijelaskan sepenuhnya dengan kerangka teori yang mereka yakini. Bahkan diantara mereka ada yang mencibir dengan mengungkapkan hasil-hasil penelitiannya yang mengindikasikan bahwa era pertumbuhan tinggi di asia timur sudah hampir berakhir karena yang menjadi topangannya selama ini yaitu tenaga kerja murah, sumber daya alam, dan modal pinjaman murah tak bisa lagi terus menerus diandalkan.¹

Campur tangan pemerintah didalam perekonomian memang tak perlu dipandang sebagai pantangan. Keberhasilan Negara-negara asia timur bahkan dicirikan oleh kuatnya campur tangan pemerintah. Tetapi sebaliknya, banyak campur tangan tak menjamin keberhasilan pembangunan ekonomi. Banyaknya campur tangan pemerintah juga tak otomatis mencerminkan kuatnya peranan pemerintah, apalagi kalau bercampur baur dengan kepentingan pribadi atau motif politik elit penguasa. Jadi sejak awal harus dibedakan dengan tegas antara kepentingan pemer-

¹ Faisal Basri. Lanskap Ekonomi Indonesia. (Jakarta : Kencana, 2009), h. 342

intah yang mewakili secara sah kedaulatan rakyat dengan kepentingan pribadi elit penguasa. Kalau pada tahap ini saja kita sudah kehilangan jejak, jangan banyak berharap campur tangan pemerintah akan memberikan dampak positif yang lebih besar ketimbang dampak negatifnya. Campur tangan harus diiringi dengan otonomi pemerintah bahkan ada yang berpendapat harus dengan *strong autonomy of state* dalam memformulasikan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan menerapkannya. Otonomi ini pun merupakan suatu syarat perlu (*necessary condition*), jadi belum tentu menjamin keberhasilan karena pada gilirannya bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menerapkan otonomi itu sendiri.²

a. Tahapan peran pemerintah dalam perekonomian

Peran Negara dapat dibagi dalam tiga bagian perencanaan (*planner*), pelaku (*actor/player*) dan pengatur (*regulator*). Sebagai perencana pemerintah pusat harus memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dirinya sendiri. Peran Negara sebagai pelaku lambat laun harus dikurangi sejalan dengan menguatnya peran swasta dan makin kukuhnya *regulatory framework*. Ini berarti bahwa peran pemerintah sebagai regulator akan semakin penting agar peningkatan peran swasta justru memperkuat landasan bagi terciptanya kemakmuran yang berkeadilan. Sejauh terdapat kejelasan visi dan misi pembangunan dalam kerangka baru pendefinisian peran Negara dan adanya kerangka makro ekonomi yang menaungi segala langkah dan kebijakan pemerintah, persoalan lembaga atau instansi serta pada tingkat mana pengelolaan dan pengendalian asset Negara akan menjadi lebih mudah dipertimbangkan. Sepanjang semua proses dan prosedur ditempuh dengan transparan dan dengan akuntabilitas publik, niscaya lembaga manapun dan pada tingkat apapun yang mengelola asset-aset Negara takkan menjadi masalah.³

Tahap selanjutnya adalah mengubah arah campur tangan dari yang bersifat lebih langsung menjadi lebih tak langsung, disertai dengan penajaman target dan pengetatan sanksi. Sampai tahap ini tampaknya

² *Ibid*, h. 343

³ *Ibid*, h. 348

penerapan di beberapa Negara asia timur cukup berhasil. Borok-borok yang semakin terkuak dari praktik bisnis dan politik di Korea dan Jepang menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk menyadari bahwa masih ada tahapan lain yang harus dilalui. Di Jepang, hal ini sudah kian disadari dan mereka mulai berbenah diri. Di Korea kelihatannya tahap ini harus dilalui dengan diiringi dengan krisis politik dan bergelimpangnya beberapa konglomerasi sebagai tumbalnya. Cukup banyak pertanda bahwa kita di Indonesia pun lupa diri, bahkan dalam beberapa hal mengalami *set back*, misalnya dalam penanganan kemiskinan, perlindungan usaha kecil, dan swastanisasi jasa-jasa publik. Semakin menapak ketahapan yang lebih lanjut, elemen-elemen didalam sistem harus diuji ulang, penguatan kelembagaan harus lebih diprioritaskan, pembenahan perangkat hukum harus serius dilakukan, dan yang tak kalah penting bahkan hampir mutlak adanya, adalah reformasi politik yang lebih menjamin tegaknya demokrasi. Kalau kita lalaikan akan semua ini, niscaya hasil-hasil pembangunan akan lebih terpusat pada segelintir orang seperti yang terjadi selama ini. Akibatnya kita tak mampu mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan.

b. Masih perlukah BUMN?

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikelola langsung oleh pemerintah, baik yang berskala nasional dan ditangani pemerintah pusat maupun yang diurus oleh pemerintah daerah (Badan Usaha Milik Daerah, BUMD) merupakan aktor penting yang senantiasa turut menentukan haru birunya perekonomian Indonesia. Tentang perpajakan sudah disinggung bahwa bagian laba BUMN untuk Negara dari tahun ketahun kalah jauh dari cukai rokok. Jadi apa pentingnya BUMN? Apalagi disisi lain BUMN begitu sering dan banyak menimbulkan persoalan bagi keuangan Negara, bahkan ikut andil besar bagi terjadinya krisis dahsyat (1997-1998). Tidakkah sebaiknya semua BUMN dijual saja agar dimasa mendatang tidak akan lagi menambah persoalan Negara? Lagipula, sejarah menunjukkan bahwa BUMN ternyata sudah beberapa kali menjadi salah satu penyebab utama kebangkrutan perekonomian nasional.⁴

4 Sugiarto, *Peran Strategis BUMN*. (Jakarta: BUMN Club 2007), h. 103

Ada beberapa alasan mengapa BUMN itu penting dan akan tetap penting, Pertama, adalah kenyataan tak terbantahkan BUMN terlanjur menduduki porsi penting diberbagai sektor perokonomian, bahkan disebagian sektor mendominasi dan memonopoli. Jika BUMN di suatu sektor tampil prima, maka dia akan menjadi penggerak utama disektor itu. Begitu juga sebaliknya, kalau BUMN disuatu sektor lemah, maka biasanya sektor itu juga akan sulit diharapkan mampu menopang perekonomian nasional secara keseluruhan. Kedua, arti penting BUMN tentu tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan setoran laba tahunannya bagi Negara, apalagi sebagian BUMN terus merugi. Jangankan para pemerhati BUMN, presiden SBY aja gemas dengan performa sejumlah BUMN yang rugi terus, sampai-sampai ia mengancam akan menuntut semua BUMN yang rugi terus secara berturut-turut dalam 3 tahun terakhir. Ketiga, dalam kedudukannya sebagai penyumbang KAS Negara itupun, sesungguhnya BUMN juga masih memiliki potensi besar. BUMN secara keseluruhan sesungguhnya masih bisa memberi lebih banyak.

B. ARTI PENTING BUMN

1. BUMN Sebagai Pelaku Utama Ekonomi

Dilihat dari kepemilikannya, ada tiga pelaku utama dalam perekonomian Indonesia, yakni BUMN, perusahaan swasta (BUMS, Badan Usaha Milik Swasta) dan koperasi. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah unit usaha yang seluruh modalnya dimiliki Negara atau yang tidak seluruh sahamnya dimiliki Negara, tetapi statusnya disamakan dengan BUMN, yaitu perusahaan patungan antara pemerintah dan pemerintah daerah; perusahaan patungan antara pemerintah dan BUMN lainnya; serta perusahaan patungan dengan swasta nasional maupun asing di mana Negara memiliki saham mayoritas (minimal 51 persen). Namun tidak seperti perusahaan swasta, selain harus memetik keuntungan, BUMN juga dibebani berbagai tugas lain mulai dari penggerak perekonomian disektor yang ditekuninya, penyerap tenaga kerja, hingga Pembina usaha

kecil dan menengah. Peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi berarti pemerintah melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi.⁵

2. Sejarah Singkat BUMN

Alasan pertama pembentukan BUMN pada awal Republik berdiri bersifat normatif, yakni untuk memenuhi amanat pembukaan UUD 45 yang mewajibkan Negara mengupayakan kesejahteraan rakyatnya, serta penjabaran dari pasal 33 ayat 2 yang berbunyi : *cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara*. Ayat inilah yang menjadi dasar bahwa Negara yang menguasai langsung segenap sumber daya alam dan perlu menjalankan berbagai kegiatan usaha sebagaimana layaknya perusahaan demi memperoleh pendapatan. Bagi kesejahteraan rakyat alasan kedua bersifat praktis, yakni masa awal kemerdekaan belum ada perusahaan swasta yang berukuran besar, apalagi berskala nasional.

3. Kedudukan BUMN dalam Sejumlah Sektor

Sekitar pertengahan 2008 muncul polemik tentang nasionalisasi, khususnya terhadap sektor energi (terutama minyak). Ide nasionalisasi bertolak dari anggapan bahwa perekonomian nasional sudah terlalu dikuasai oleh pihak/perusahaan asing, termasuk pada sektor vital seperti energi. Penekanan diberikan pada sektor energi karena para pengusul nasionalisasi berpendapat sekitar 80 persen konsensi tambang minyak di Indonesia adalah korporasi asing seperti Chevron, Total Indonesia, British Petroleum (BP), Exxon, Shell, CNOOC, Genting, dan Petro China. Sedangkan Pertamina, Medco, dan perusahaan swasta nasional perminyakan lainnya ditaksir menguasai tidak lebih dari 20 persen pertambahan minyak. Kesan yang dimunculkan seolah-olah pertumbuhan minyak di Indonesia seluruhnya sudah tergadai pihak asing.⁶

5 Dr. Djokosantoso Moeljono, Reivensi BUMN, h 205

6 Faisal Basri. *Lanskap Ekonomi Indonesia*. (Jakarta : Kencana, 2009), h. 351

C. REKOMENDASI PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN BUMN

Seandainya tidak ada tiga masalah berat yang melilitnya, BUMN sebenarnya tidak perlu diperlakukan secara khusus. Kedudukannya sama saja dengan perusahaan swasta dan koperasi. Bahkan seperti dibayangkan Bung Hatta, pada hakikatnya keberadaan BUMN itu hanya sementara saja. Ketika warga negara biasa sudah bisa menjadi pelaku ekonomi andal melalui perusahaan swasta maupun koperasi, maka BUMN secara alamiah harus minggir sehingga peran pemerintah hanya sebatas sebagai regulator dan pembina saja, tidak perlu lagi menjadi pelaku langsung dalam perekonomian. Namun dalam kenyataannya BUMN di Indonesia terus hadir dan diperlakukan secara khusus.

1. Catatan Kritis Pembinaan BUMN Selama Ini

Reformasi BUMN ternyata baru dimulai pada tahun 1988 dengan keluarnya intruksi presiden nomor 5 tahun 1988 yang dijabarkan dengan surat keputusan menteri keuangan nomor 740 dan 741 tahun 1989. Inpres ini bertolak dari semangat deregulasi yang memberikan wewenang kepada BUMN untuk menggunakan berbagai perangkat reformasi seperti restrukturisasi, penggabungan usaha (merger), kerjasama operasi (KSO) dan bentuk-bentuk partisipasi swasta lain termasuk penawaran saham pada masyarakat dan penjualan strategis. Sektor-sektor yang dibuka bagi partisipasi pihak swasta tidak saja dalam sektor yang kompetitif, tetapi juga dimungkinkan dalam bentuk kerjasama usaha di sektor infrastruktur, transportasi, dan energi. Hal ini menandai pergeseran penting dalam falsafah tentang BUMN yang menjadi penafsiran pasal 33 UUD 45. Kepemilikan dan penguasaan total oleh pemerintah tidak lagi dipertahankan sehingga berbagai bentuk kerja sama dengan swasta mulai dimungkinkan, yang dengan sendirinya akan membatasi kepemilikan dan penguasaan pemerintah terhadap BUMN (juga aset-aset ekonomi nasional) itu.

Reformasi BUMN gelombang pertama ini dilakukan atas dasar beberapa alasan. Pertama adalah biaya produksi menyebabkan tingkat laba yang dicapai menjadi rendah dan dari laba itu pun tidak cukup untuk

membayai ekspansi BUMN. Keuangan negara yang kian terbatas tidak memungkinkan banyak investasi baru BUMN tidak dapat dibiayai oleh APBN, baik berupa dana segar maupun proyek pemerintah yang dialihkan sebagai aset (PMP). Kedua, kondisi perbankan nasional belum memungkinkan untuk menjadi sumber pembiayaan tersebut. Ketiga adalah adanya kebijakan nasional untuk mengurangi subsidi demi penghematan anggaran. Restrukturisasi menjadi langkah pertama, diusul dengan penjualan BUMN yang tidak bergerak dibidang strategis.⁷

2. Privatisasi Terlalu Diandalkan

Meskipun sudah banyak menimbulkan kerugian, privatisasi tetap dianggap sebagai cara terbaik untuk membenahi BUMN. Tampaknya, perhatian pemerintah terdahulu maupun sekarang hanya terpaku pada masalah mendesak sehingga selalu berusaha mencari solusi kilat. Privatisasi memang hanya merupakan solusi kilat yang acap kali merugikan dalam jangka menengah dan panjang. Kecuali rencana *regrouping* yang digagas oleh Sugiharto, pada dasarnya *master plan* pembenahan BUMN pemerintah SBY tidak banyak berbeda dari cetak biru pengelolaan BUMN di masa pemerintahan Megawati yang terbukti kacau dan praktik data hasilnya sangat jauh dari apa yang telah digariskan.⁸

Dalam analisis PBB, privatisasi hanya sesuai untuk kondisi berikut :

- a. BUMN yang hendak di swastakan bergerak dalam industri/sector yang secara potensial kompetitif; tetapi kompetisinya karena alasan politik, tidak bisa dibina tanpa swastanisasi.
- b. Swastanisasi hanya dapat dilakukan di Negara yang pasar modalnya sudah berkembang cukup baik sehingga memungkinkan penentuan nilai saham perusahaan secara *fair*.
- c. Pemerintah punya perangkat hukum efektif (mulai dari aturan hingga pengadilan yang kapabel) guna mengawal privatisasi.

⁷ Bustanul Arifin. *Strategi Makro-mikro Ekonomi Indonesia*. (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2005), h. 192

⁸ *Ibid*, h.193

- d. Ada lembaga profesional khusus yang menjalankan swastanisasi, khususnya jika hal itu dilakukan melalui bursa saham, sehingga bisa diperoleh harga jual yang memuaskan (jika harga itu tidak dicapai, hendaknya swastanisasi tidak usah dipaksakan karena hanya akan membawa kerugian bagi negara).
- e. Pemerintah sudah mampu menekan korupsi, minimal sudah ada tradisi hukum yang menindak tegas segala bentuk korupsi (PBB mengingatkan privatisasi di Negara korup hanya akan menjadi ajang korupsi besar-besaran).
- f. BUMN itu sendiri memang cukup sehat dan layak untuk dijual. Jika BUMN sakit tetap dijual, maka yang terjadi tak lebih dari perdagangan barang loak yang menguntungkan negara.

3. Paket Pembenahan BUMN Yang Ideal: Rekomendasi Umum

Dalam tataran pelaksanaannya Indonesia, hal paling mendesak yang harus segera dilakukan dalam rangka pemberdayaan BUMN adalah meninjau kembali megaprivatisasi yang sangat berisiko itu. Tujuannya adalah untuk meluangkan waktu dan anggaran guna meneliti kondisi masing-masing BUMN secara mendalam, guna mengungkap (1) potensi sesungguhnya dari setiap BUMN, baik yang berdimensi ekonomi maupun sosial; serta (2) memahami akar permasalahan teknis manajemen dan bisnis di tiap BUMN. Bertolak dari penelitian itu akan terpetakan taksiran potensi yang cukup realistik dan berbagai macam masalah yang melilit setiap BUMN.⁹

Studi empiris oleh Campos dan Esfahani (1996) terhadap 15 negara berkembang dalam rentang waktu observasi 20 tahun sampai pertengahan 1990-an menghasilkan beberapa temuan penting yang dapat dijadikan suatu panduan penyusunan prinsip dasar reforma atau privatisasi. Reforma BUMN cenderung terjadi pada beberapa keadaan berikut ini.

- a. Apabila perekonomian mengalami krisis atau *shock* cukup se-

⁹ Bustanul Arifin. *Strategi Makro-mikro Ekonomi Indonesia*. (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2005), h. 199

rius. Penerimaan perusahaan negara itu menurun, redistribusi mungkin saja tidak lebih mahal, dan pendapat dari privatisasi itu umumnya meningkat.

- b. Apabila pangsa sektor industri dan jasa (non-pertanian) dalam perekonomian cukup besar. Perusahaan negara sangat terkait dengan sektor modern tersebut, sehingga potensi perolehan pendapatnya pun cukup tinggi.
- c. Apabila skala atau ukuran ekonomis perusahaan negara (terhadap ukuran perekonomian) cukup besar. Maksudnya, aktivitas perusahaan negara tersebut umumnya juga menghasilkan perolehan efisiensi (*efficiency gains*) yang lebih tinggi dari biaya-biaya redistribusi yang harus di tanggung.
- d. Apabila kombinasi dari pangsa sektor industri-jasa dan ukuran perusahaan negara itu relatif tidak perlu besar. Alasan utamanya dapat di lihat dari logika sisi lain. Bahwa redistribusi itu sangat kompleks, sehingga hambatan situasional dan informasional menjadi demikian besar apabila sebagian besar aktivitas ekonomi adalah badan usaha milik negara.
- e. Apabila perekonomian lebih orientasi ke luar (*outward oriented*). Efisiensi akan lebih tinggi apabila produsen sifat permintaan produk cukup elastis (dari pasar internasional) dan tentu saja tekanan publik untuk meningkatkan efisiensi internal perusahaan negara itu cukup tinggi.¹⁰

Peran BUMN, BUMS sepanjang Sejarah Perekonomian Indonesia :

1. Peran sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi

Sampai awal tahun 1980-an BUMN memegang peranan penting. Sejak akhir tahun 1980-an BUMS yang pegang peranan penting. BUMN dan BUMS skala USB memiliki modal besar.

¹⁰ Afrida BR, M.S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h 55

2. Peran sebagai Pencipta lapangan kerja

BUMS terutama yang berskala USM dan USK (UKM, UMKM) karena jumlahnya yang besar tersebar diseluruh Indonesia, bersifat padat karya.

3. Peran sebagai menjaga kelestarian alam/ lingkungan

BUMN, karena milik negara, kepanjangan tangan pemerintah sehingga bisa menjalankan semua kebijakan pemerintah sesuai UU lingkungan hidup.¹¹

D. PERKEMBANGAN/PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Tingkat kehidupan rata-rata warga Indonesia sudah meningkat secara signifikan sejak 2008, begitu juga dengan persepsi bahwa standar kehidupan mereka telah meningkat. Sebagai hal yang penting bagi sebuah kemampuan Negara untuk meningkatkan Human Capital untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang, kepuasan dalam bidang kesehatan lokal dan pelayanan pendidikan telah meningkat jauh sejak 2006.

Para ahli ekonomi mencatat bahwa korupsi sistemik buruk bagi perkembangan ekonomi. Salah satu bentuk yang paling umum, penyuapan pejabat pemerintah, menimbulkan biaya transaksi tinggi dan cenderung memperburuk situasi orang miskin yang biasanya kurang mampu untuk membayar dan kecil kemungkinan memiliki koneksi politik untuk membantu.

Keuntungan dari perkembangan ekonomi di Indonesia :

1. Melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi
2. Dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat agar mengurangi pengangguran.
3. Dimungkinkan adanya perubahan perubahan struktur perekonomian dari agraris menjadi industri. Sehingga yang dilaksanakan Negara

¹¹ Faisal Basri. *Lanskap Ekonomi Indonesia*. (Jakarta : Kencana, 2009), h. 376

akan semakin beragam dan dinamis.

4. Peningkatan kualitas SDM sehingga dalam hal ini dimungkinkan IP-TEK akan berkembang pesat, dengan demikian akan makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat.¹²

E. SOLUSI DARI PERMASALAHAN PERAN BUMN

BUMN merupakan lembaga yang langsung dikelola oleh pemerintah dan seluruhnya di urus oleh pemerintah. BUMN sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena sektornya ada di sebagian sektor mendominasi dan memonopoli. Jika dalam memegang beberapa sektor dengan kuat maka BUMN akan menjadi penggerak utama disektor tersebut. Sebaliknya, jika dalam memegang sektor tersebut lemah, maka sektor tersebut akan lemah dan juga akan sulit diharapkan menopang perekonomian Indonesia secara keseluruhan karna beberapa persen laba dari BUMN di serahkan ke kas Negara. Tapi sangat disayangkan karena BUMN hanya menyettor beberapa persen saja dari laba yang didapat BUMN dan tidak banyak yang disettor.

Solusi dari permasalahan dari BUMN menurut kami yaitu, walaupun BUMN sangat berperan dalam kegiatan perekonomian Indonesia, BUMN harus mengoptimalkan kinerjanya dalam program-program yang dijalankan dalam BUMN agar tidak mengalami kerugian yang mengakibatkan melemahnya perekonomian Negara dan juga berakibat setoran ke kas Negara sedikit.

¹² Basri, Faisal dan Haris Munandar. *Lanskap Ekonomi Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), h.250

BAB V

GLOBALISASI EKONOMI

A. Fenomena Globalisasi Ekonomi

1. Pengertian

Globalisasi ekonomi adalah suatu proses dimana semakin banyak Negara yang terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi global. Proses globalisasi ekonomi adalah perubahan perekonomian dunia yang bersifat mendasar atau struktural, dan proses ini akan berlangsung terus dengan laju yang semakin cepat mengikuti perubahan teknologi yang juga akan semakin cepat dan peningkatan serta perubahan pola kebutuhan masyarakat dunia. Perkembangan ini telah meningkatkan hubungan saling ketergantungan ekonomi dan juga mempertajam persaingan antar negara tidak hanya dengan perdagangan internasional, tetapi juga investasi, keuangan dan produksi. Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas geografi dari kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional atau regional, tetapi semakin mengglobal menjadi satu, proses yang melibatkan banyak Negara. Globalisasi ekonomi biasanya dikaitkan dengan proses internasionalisasi produksi, perdagangan dan pasar uang.¹

Semakin menipisnya batas-batas geografi dari kegiatan ekonomi secara nasional maupun regional yang bebarengan dengan semakin hilangnya kedaulatan suatu pemerintahan Negara disebabkan oleh banyak hal, diantaranya, komunikasi dan transportasi yang semakin canggih dan murah, lalu lintas devisa yang semakin bebas, ekonomi Negara yang semakin terbuka. Penyebab-penyebab lainnya adalah semakin banyaknya

¹ Tulus T.H Tambunan, *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 1

industri yang bersifat *footloose* akibat kemajuan teknologi (yang mengurangi pemakaian sumber daya alam).²

Globalisasi mempunyai tiga dimensi, Pertama dimensi ide atau ideologi, yaitu “Kapitalisme” yakni filsafah individualisme demokrasi dan hak asasi manusia(HAM). Oleh karena itu tidak mengherankan jika demokrasi dan HAM menjadi dua isu yang semakin penting, bahkan sekarang ini sering dijadikan salah satu pertimbangan utama dalam membuat kesepakatan atau menjalin kerjasama ekonomi atau perdagangan antar negara, baik pada tingkat regional dalam kontak ASEAN, UE dan APEC, maupun pada tingkat global dalam konteks WTO. Kedua dimensi ekonomi yaitu pasar bebas yang artinya arus barang dan jasa antar negara tidak dihalangi sedikit pun juga. Ketiga ,dimensi teknologi khususnya teknologi informasi, yang akan membuka batas-batas negara sehingga negara makin tanpa batas.³

2. Dua Indikator Globalisasi

Derajat globalisasi dari suatu Negara di dalam perekonomian dunia dapat dilihat dari dua indikator utama. Pertama, rasio perdagangan internasional (ekspor dan impor)dari Negara tersebut sebagai suatu persentase dari jumlah nilai atau volume perdagangan dunia. Kedua kontribusi dari Negara tersebut dalam pertumbuhan investasi dunia ,baik investasi langsung atau jangka panjang (penanaman modal asing,atau PMA) maupun investasi tidak langsung atau jangka pendek (investasi potofolio).

3. Arus Perdagangan Internasional

Sejak berakhirnya perang dunia kedua hingga saat ini ,bangsa dari pengeluaran komsumsi domestik terhadap barang dan jasa yang diimpor dari Negara lain,dan bagian dari produksi barang dan jasa di dalam negeri yang diekspor keluar negeri terus mengalami peningkatan , yang dengan sendirinya memperbesar nilai atau volume perdagangan dunia.⁴

2 *Ibid*, h. 1

3 *Ibid*, h. 3

4 *Ibid*, h. 4

Integrasi perdagangan antarnegara meningkat pesat terutama pada tahun 1970-an, pada saat banyak negara mulai menerapkan sistem ekonomi terbuka (yang disebut era keterbukaan global) dan setelah itu mengalami sedikit penurunan pada pertengahan dekade 80-an dan suatu akselerasi di tahun 90-an.

B. Pembangunan Ekonomi Sejak Tahun 1996

1. Pertumbuhan Ekonomi Yang Pesat

Perekonomian Indonesia secara mengejutkan berhasil pulih dengan cepat dari kekacauan yang terjadi pada paruh pertama dekade 1960-an, yaitu mencapai pertumbuhan dua digit untuk pertama kalinya pada tahun 1968. Pertumbuhan ekonomi yang cepat paling sedikit 5% per tahun, tetap dipertahankan hingga tahun 1982, yaitu ketika melemahnya pasar minyak bumi dunia menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun drastis. Ketika perubahan kebijakan yang diterapkan pada pertengahan dekade 1980-an mulai terlihat hasilnya, dari tingkat pertumbuhannya sebesar 6-7%.⁵

2. Berbagai Episode Dalam Kebijakan Dan Pembangunan Ekonomi

Tahun 1996 merupakan titik balik dalam sejarah ekonomi Indonesia, menandai sebuah perubahan yang tegas tentang arah kebijakan dan tujuan ekonomi. Selama 25 tahun sesudah itu, dapat disaksikan adanya pembangunan yang cepat dan perubahan struktural.⁶ Tetapi arah pertumbuhannya dan kebijakan ekonomi yang melandasi pertumbuhan ini, sangat tidak mulus dan tidak seragam. Indonesia mengalami gejolak eksternal selama periode ini, terutama akibat fluktuasi minyak dunia. Tepatnya berbagai kejadian ini saling menyatu dengan reaksi kebijakan, menyusul dan mengubah situasi ekonomi setelah setahun lebih. Yang

⁵ Hal Hill, *Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 17

⁶ *Ibid*, h. 22

menjadi tujuan utamanya adalah perubahan besar dalam kebijakan dan kinerja.⁷

Terdapat beberapa kejadian dan inisiatif kebijakan yang dominan secara lebih terinci.

a) Rehabilitasi dan Pemulihan ,1966-1970

Selama periode ini, pemerintah mementingkan pengendalian inflasi diatas segalanya, berusaha membangun kembali hubungan komunitas Negara donor dunia dan berusaha merehabilitasi infrastruktur fisik. Kebijakan moneter dan fiscal yang ortodoks berhasil menurunkan tingkat inflasi dengan kecepatan yang mengejutkan. Komitmen pemerintah yang jelas untuk melaksanakan ekonomi secara ortodoks serta kedekatannya dengan konsorsium Negara donor dunia, menghasilkan reaksi yang positif dari investor dalam dan luar negeri. Perekonomian tumbuh pada tingkat rata-rata 6,6 persen per tahun, tahun 1968 menandai dimulainya fase pemulihan dengan tingkat pertumbuhan 10,9 persen dan tahun 1957 terjadi kemajuan diberbagai bidang dalam aktivitas ekonomi, dalam output dan investasi dan dalam perubahan institusi.

b) Pertumbuhan Yang Cepat ,1971-1981

Merupakan sebuah periode dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Periode ini juga penuh dengan ketidakstabilan ekonomi . Beberapa kesulitan yang terjadi karena kesalahan sendiri tetapi kebanyakan di sebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Seperti panen beras yang buruk pada akhir 1972,kemudian pada tahun 1973 harga minyak bumi dunia meningkat empat kali lipat. Pada tahun 1976 peningkatan cadangan devisa dimandulkan oleh program belanja pertamina yang penuh foya-foya, kebijakan pemerintah sangat menguntungkan kepentingan bisnis pribumi. Kebijakan perdagangan dan penanaman modal asing menjadi lebih ketat dan sebuah rencana baru bagi perluasan sektor badan usaha milik Negara dicanangkan.

⁷ *Ibid*, h. 22

Menjelang akhir dekade pembuat kebijakan menjadi semakin khawatir pada kemungkinan jatuhnya harga minyak bumi, akibatnya sebuah devaluasi yang besar dilakukan pada bulan November 1978 untuk mengembalikan daya saing sektor barang perdagangan non-migas sebagai persiapan mengantisipasi melemahnya pasar minyak dunia.

Tahun 1979 perang Iran-Iraq menyebabkan terjadinya babak kedua peningkatan yang besar dalam harga minyak dunia sehingga menjadikan devaluasi yang dilakukan sangat tidak relevan.⁸

c) Penyesuaian Terhadap Rendahnya Harga Minyak Bumi 1982-1986

Jatuhnya harga minyak bumi, meningkatnya hutang luar negeri dan jatuhnya pertumbuhan ekonomi tahun 1982, menandakan berakhirnya dekade pertumbuhan dan kelimpahan yang dibiayai minyak bumi. Pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan tersebut, peningkatan pendapatan dari minyak bumi dan bantuan luar negeri yang selalu terjadi hampir otomatis, lenyap begitu saja. Sebagian karena baiknya kinerja sektor pertanian dan sebagian karena dampak yang terjadi akibat investasi besar dalam bidang yang berkaitan dengan minyak bumi, perekonomian tetap tumbuh tingkat yang cukup baik yaitu rata-rata 4% per tahun.

Tahun 1983 pemerintah mengurangi pengeluaran menunda dan kemudian membatalkan beberapa proyek besar, serta mendeval-uasi rupiah reformasi pajak cukai dan perbankan. Hambatan non-tarif semakin banyak terjadi, memperburuk masalah yang dihadapi sektor industri yang berbiaya tinggi dan tidak efisien. Bank Negara diizinkan untuk menentukan tingkat suku bunga deposito pinjaman. Juga dilakukan pergeseran pertama kedalam operasi pasar terbuka dengan dikembangkannya kebijakan moneter yang baru, namun kebijakan ini belum teratur. Pemerintah juga masih kekurangan instrument untuk menangani konsekuensi dari pasar modal internasional yang terbuka.

⁸ *Ibid*, h. 23

Akibatnya pada bulan September 1984, karena takut terhadap terjadinya devaluasi terjadi pelarian modal dalam jumlah besar sehingga mengurass habis likuiditas domestic menyebabkan tingkat suku bunga overnight dalam pasar antar bank mencapai 90%.⁹

d) **Liberalisasi dan Pemulihan 1987 Hingga Sekarang**

Masalah yang serupa juga terjadi di awal tahun 1987 ini, yang memunca pada intervensi yang tegas namun berlebihan, yaitu Pejabat Menteri Keuangan pada bulan Juni memerintahkan empat Badan Usaha milik Negara untuk membeli SBI dari bank Indonesia. Intervensi tersebut yang dengan cepat memompa tingkat suku bunga antar bank menjadi 45% dan mengembalikan pelarian modal yang terjadi, berhasil mencapai tujuan jangka pendek tetapi intervensi tersebut menyebabkan kemunduran dalam tujuan jangka panjang yaitu untuk menggeser kebijakan kearah manajemen moneter yang tidak langsung.

Kebijakan fiscal yang ketat ,manajemen nilai tukar mata uang yang efektif dan reformasi ekonomi mikro yang tegas ,secara bersama-sama menghasilkan pemulihan yang cepat, yang diawali tahun 1987. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia menjadi Negara pengeksport penting untuk barang-barang industri, mengikuti jalan sukses yang ditempuh oleh Negara-negara tetangga did Asia Timur. Ciri unik lainnya dari periode ini adalah semakin kuatnya sector perdagangan dan kemandirian sektor swasta.¹⁰

Reformasi besar lainnya, dilaksanakan pada Oketober 1988,dan terbukti sebagai inisiatif kebijakan financial yang paling menentukan dalam dekade tersebut. Semua bank dalam negeri diizinkan untuk secara bebas membuka cabang-cabang baru, serta bank-bank swasta baru diizinkan untuk beroperasi. Bank asing juga diizinkan untuk beroperasi di

⁹ *Ibid*, h. 25

¹⁰ Hal Hill, *Ekonomi Indonesia*, h.56

luar Jakarta dengan batasan-batasan tertentu. Pada awal dekade 1990-an Indonesia tampaknya telah berhasil mengatasi masalah krisis hutang pada dekade 1980-an dengan efektif.

Pada bulan September 1990 Bank-Duta yaitu bank swasta be-modal besar yang sarat dengan koneksi politik-diumumkan mengalami kerugian dalam perdagangan valuta asing sebesar \$420 juta. Tindakan penyelamatan langsung dilakukan dan beberapa yayasan menyuntikkan sejumlah besar dana kepada bank tersebut. Pada awal tahun 1994 masalah baru kembali muncul kali ini dalam bentuk penangkapan yang dilakukan sehubungan dengan kredit \$650 juta yang dikucurkan oleh bank pembangunan Negara. Meluasnya berita tentang kasus tersebut dimasyarakat, memberikan harapan bahwa pemerintah berniat untuk melakukan reformasi besar untuk membersihkan sistem dalam bank-bank milik Negara. Selain itu kesalahan manajemen, memanipulasi dan penipuan selama tahun 1990-1993, mulai mencoreng Citra Bursa Efek Jakarta. Akibatnya para investor domestik mulai menarik diri dari bursa tersebut.¹¹

Jika kita mengamati pembangunan sektor moneter dan keuangan secara umum selama seperempat abad ini, paling tidak terdapat empat ciri penting yang menonjol :

- a. Indonesia tidak pernah berhasil menyamai tetangganya yaitu Singapura, Malaysia, Thailand dalam menciptakan lingkungan secara konsisten yang memiliki inflasi yang rendah.
- b. Indonesia tidak dapat disebut sebagai Negara yang setia bersikap sebagai kaum "moneteris"
- c. Secara langsung berkaitan dengan transformasi struktural yang cepat adalah semakin mengakur dan semakin canggihnya sistem keuangan .
- d. Dalam perumusan kebijakan keuangan terdapat tarik-menarik antara regulasi dan pengendalian di satu sisi dan liberalisasi

11 *Ibid*, h.59

dan operasi pasar terbuka disisi yang lain.¹²

C. Jenis Dampak Globalisasi Ekonomi

Dampak dari globalisasi ekonomi terhadap perekonomian suatu Negara bisa positif atau negatif,¹³ tergantung pada kesiapan Negara tersebut dalam menghadapi peluang-peluang maupun tantangan-tantangan yang muncul dari proses tersebut. Secara umum ada 4 wilayah yang pasti akan terpengaruh yakni sebagai berikut.

1. Ekspor

Dampak positifnya adalah ekspor atau pangsa pasar dunia dari suatu Negara meningkat, sedangkan efek negatifnya adalah kebalikannya : Suatu Negara kehilangan pangsa pasar dunianya, yang selanjutnya berdampak negative terhadap volume produksi dalam negeri dan pertumbuhan PDB serta meningkatkan pengangguran dan tingkat kemiskinan.

2. Impor

Dampak negatifnya adalah peningkatan impor yang apabila tidak dapat dibendung karena daya saing yang rendah dari produk-produk yang serupa buatan dalam negeri, maka tidak mustahil pada suatu saat pasar domestik sepenuhnya akan dikuasai oleh produk-produk luar negeri.

3. Investasi

Liberalisasi pasar uang dunia yang membuat bebasnya arus modal antarnegara juga sangat berpengaruh terhadap arus investasi neto ke Indonesia. Jika daya saing investasi Indonesia rendah, dalam arti iklim berinvestasi dalam negeri tidak kondusif dibandingkan dinegara-negara lain, maka bukan saja arus modal yang berkurang, tetapi modal investasi domestic akan lari dari Indonesia. Kurangnya investasi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan produksi dalam negeri dan ekspor. Sejak krisis ekonomi 1997/98 arus PMA ke Indonesia relatif berkurang dibandingkan

¹² *Ibid*, h. 26

¹³

kenegara yang paling tidak menarik untuk PMA karena berbagai hal mulai dari kondisi perburuhan yang tidak lagi menarik investor asing, masalah keamanan dan kepastian hukum, hingga kurangnya insentif terutama insentif fiskal bagi investasi-investasi baru.

4. Tenaga Kerja

Dampak negatifnya adalah membanjirnya tenaga ahli dari luar Indonesia, dan kalau kualitas SDM Indonesia tidak segera ditingkatkan untuk dapat menyaingi kualitas SDM dari Negara-negara lain, tidak mustahil pada suatu ketika pasar tenaga kerja atau peluang kesempatan kerja didalam negeri sepenuhnya dikuasai oleh orang asing.¹⁴

Keempat jenis dampak tersebut secara bersamaan akan menciptakan suatu efek yang sangat besar dari globalisasi ekonomi dunia yang dunia terhadap perekonomian dan kehidupan sosial di setiap Negara yang ikut berpartisipasi didalam prosesnya termasuk Indonesia.

Dengan demikian globalisasi ekonomi mempengaruhi berbagai kelompok Negara secara berbeda. Secara umum, dampak dari proses ini dapat dikelompokkan kedalam tiga group Negara. Pertama adalah sejumlah kecil Negara yang memelopori atau yang terlibat secara penuh dalam proses ini mengalami perumbuhan dan perluasan kegiatan ekonomi yang pesat. Kedua adalah Negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sedang dan flektuatif, yakni Negara-negara yang berusaha menyesuaikan diri dengan rangka globalisasi.¹⁵

Ekonomi atau liberalisasi perdagangan dan investasi. Ketiga adalah Negara-negara yang termarginalisasikan atau yang sangat dirugikan karena ketidakmampuan mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dari proses tersebut dan persoalan-persoalan pelik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan globalisasi ekonomi.¹⁶

14 Syafil Hadis, *Ekonomi Internasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 25

15 *Ibid*, h. 29

16 *Ibid*, h.30

D. Kebebasan Ekonomi di Kalangan Umat Muslim

Dunia saat ini sedang memasuki era budaya global dengan kemajuan teknologi informatika disatu sisi dan kebangkitan nasionalisme dan spiritual di sisi lain. Budaya global juga ditandai dengan era Ekonomi Baru, dan posisi hukum semakin diperlukan guna mengaturnya. Budaya global juga antara lain disemarakan dengan perkembangan konsep Ekonomi Islam. Ilmu ekonomi islam adalah ilmu tentang manusia yang meyakini nilai-nilai hidup islam. Ilmu ekonomi islam dikenadlikan oleh nilai-nilai dasar islam. Dalam aktivitas ekonomi , individu harus memperhitungkan perintah Al qur'an dan Sunah, Ekonomi islam yang merupakan hasil serangkaian rektualisasi doktrin islam tentang masalah ekonomi yang memasuki fase dalam beragam bidang ekonomi seperti keuangan dan lainnya.

Doktrin Ekonomi Islam muncul pada abad XX, dimaksudkan untuk membangun sebuah sistem ekonomi yang sesuai dengan wahyu (*Islamic sceipture*) dan tradisi yang melingkupinya. Diawali pada tahun 1940-an dan baru dekade kemudian konsep Hukum Islam mulai muncul diberbagai Negara. Pemerintahan Pakistan, Malaysia dan beberapa Negara lain mulai menerapkan program sentralisasi sistem retribusi islam yaitu zakat. Lebih dari 60 negara memulai Bank Islam dengan menawarkan sistem *free interest* yang disebut sebagai alternative dari bank dengan sistem bunga. Perkembangan ini dimulai dari India. Tahun 1975 didirikan *Islamic Developmetn Bank* dengan maksud untuk memberikan bantuan bagi perkembangan Negara berkembang muslim dengan pinjaman tanpa bunga, memperbaiki infrastruktur-ifastruktur Ekonomi Islam, sekolah bisnis Islam dan penerbitan jurnal-jurnal ekonomi islam ditampilkan sebagai disiplin akademis.

Kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan sistem hukumnya. Nabi Muhammad Saw tidak bersedia menetapkan harga-harga itu membumbung tinggi . Ketidaksediaanya itu didasarkan atas prinsip tawar menawar secara sukarela dalam perdagangan yang tidak memungkinkan pemaksaan cara-cara tertentu agar pen-

jual menjual barang-barang mereka dengan harga lebih rendah daripada harga pasar selama perubahan- perubahan harga itu disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam permintaan dan penawaran yang tidak dibarengi dengan dorongan monopolik maupun monopsonik .

Dalam pandangan islam, individu adalah yang penting dan bukan komunitas masyarakat atau bangsa. Individu tidak dimaksudkan untuk melayani masyarakat melainkan masyarakatlah yang benar-benar harus melayani individu. Tidak ada satu komunitas atau bangsa pun bertanggung jawab didepan Allah sebagai kelompok, alasan yang bebas dan tertinggi dari adanya sistem sosial adalah kesejahteraan dan kebahagiaan individu bukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Dari sinilah ukuran yang benar dari suatu sistem sosial yang baik adalah batas yang membantu anggota masyarakat untuk mengembangkan kepribadian mereka dan meningkatkan kemampuan personal mereka. Berdasarkan itulah Islam tidak menyetujui ada organisasi sosial dan rencana kesejahteraan sosial apapun bila ia mengikat mereka begitu kuat dengan otoritas sosial, sehingga kepribadian mereka yang bebas akan hilang dan sebagian besar diantara mereka menjadi sekedar mesin atau alat yang berada ditangan orang-orang lain yang berjumlah kecil.¹⁷

1. Kerja Sama

Ekonomi islam adalah ekonomi yang bebas ,tapi kebebasannya ditunjukkan lebih banyak dalam bentuk kerjasama daripada dalam bentuk kompetisi (persaingan). Kerja sama adalah tema umum dalam dalam organisasi sosial islam. Individualisme dan kepedulian sosial begitu erat terjalin sehingga bekerja demi kesejahteraan orang lain .

Ajaran-ajaran islam pada umumnya dan terutama ayat-ayat al qur'an berulang-ulang menekankan nilai kerja sama dan kerja kolektif . Islam memperkenalkan konsep kewajiban kolektif yang membawa tanggungjawab individual. Dalam fiqh islam konsep ini disebut *Fardhu Kifayah* (menuntut individual untuk memenuhi kebutuhannya).¹⁸

¹⁷ Monzer Kaff, Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 53

¹⁸ *Ibid*, h. 59

2. Keterlibatan Pemerintah Dalam Pasar

Keterlibatan pemerintah dalam pasar tidak pada saat tertentu atau bersifat temporer. Sistem ekonomi islam menganggap islam sebagai sesuatu yang ada di pasar bersama-sama dengan unit ekonomik lainnya berdasarkan landasan yang tetap stabil . Dianggap sebagai perencana, pengawas, produsen, dan konsumen.¹⁹

- a. Lembaga politik dalam masyarakat Islam bekerja dalam perangkat norma kegiatan ekonomi yang terumuskan secara baik. Pemerintah islam harus memegang peranan sebagai perencana dan piñata. Standar hidup minim merupakan sesuatu yang harus ditentukan dengan tingkat perkembangan dan kondisi-kondisi lingkungan lainnya.
- b. Perusahaan negara memainkan peranan penting dalam sistem ekonomi islam ,kyang berjalan bergandengan tangan, dengan kepemilikan Negara. Dalam pemikiran islam tidak hanya mencakup apa yang biasanya dikenal sebagai pemanfaatan oleh Negara .
- c. Peranan pemerintah dalam kaitannya dengan jaminan bernilai sangat penting dalam mekanisme pasar . Jaminan sosial dalam islam didasarkan atas dua hal : tanggung jawab timbal balik yang bersifat umum dan tuntutan-tuntutan rakyat terhadap pendapatan-pendapatan pemerintah. Jaminan pemerintah berupa standar hidup minim bersumber dari kenyataan bahwa pemerintah merupakan lembaga rakyat dan diberi wewenang untuk mengumpulkan cukup dana melalui zakat untuk membayar jaminan ini.
- d. Hal penting terakhir yang menandai keterlibatan pemerintah dalam pasar adalah fungsinya sebagai supervisor dan pengontrol. Ada dua corak kontrol terhadap mekanisme pasar ini. Pertama dimaksudkan untuk meningkatkan pemenuhan tujuan – tujuan

¹⁹ *Ibid*, h. 60

Negara secara efisien. Corak kontrol yang kedua, yaitu Al-Hisbah yang fungsinya adalah memelihara aturan-aturan permainan.²⁰

Sedangkan hubungan antara ekonomi Islam dengan Globalisasi Ekonomi yaitu:

1. Orang-orang bebas masuk dan meninggalkan pasar
2. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar.
3. Setiap penyimpangan dari pelaksanaan kebebasan ekonomi yang jujur sesuai dengan norma-norma Al Qur'an.
4. Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan yang harus dimanfaatkan se-efisien dan se-optimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama untuk dirinya dan orang lain.
5. Hukum Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
6. Kekuatan bidang ekonomi ialah kerjasama antara pihak dengan kontrak.
7. Hukum Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.²¹

²⁰ *Ibid*, h.63

²¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1987), h.9-21

BAB VI

MODERNISASI PEMBANGUNAN DAN POLITIK

A. Konsep Modernisasi

Apakah yang dimaksud dengan konsep ini, dan untuk maksud-maksud apakah ia digunakan oleh para peneliti? Tiap disiplin ilmu-ilmu sosial memberikan kepada konsep tersebut suatu tekanan yang berbeda. Para sarjana ekonomi melihat modernisasi terutama dalam kerangka pemanfaatan perangkat teknologi oleh manusia untuk mengendalikan sumber-sumber alam. Para sarjana politik menekankan kepada faktor-faktor negatif dari pembinaan bangsa. Para sarjana psikologi menekankan kepada pertumbuhan pengetahuan, pendidikan, dan prestasi individu.¹

Modernisasi pada berbagai selubung ini membicarakan transformasi kultural oleh manusia dan mobilisasi yang cepat. Para penganjur orientasi ilmu sosial ini selalu menganggap bahwa modernisasi merupakan prasyarat penting bagi pembangunan. Diperkirakan konsep ini lebih banyak dianut di Amerika Latin dari pada di Timur Tengah. Para pengamat Timur Tengah cenderung memandang modernisasi sebagai suatu transportasi komunikasi merupakan prasyarat bagi pembangunan, sedangkan para analisis di Amerika Latin, ketika mereka mengacu pada modernisasi, lebih sering berbicara mengenai pelimpahan konsumen, yang dilengkapi dengan dominasi kelas menengah sebagai suatu prasyarat bagi pembangunan.²

Literatur tentang Amerika Latin membicarakan modernisasi da-

¹ Louis Irving Horowitz, *Revolusi, Militerisasi dan Konsolidasi Pembangunan*, (Jakarta PT. Bina Aksara, 1985), h. 42

² *Ibid*, h.42

lam kaitannya dengan konsumsi, dari mulai elektrifikasi sampai kepada pembelian barang-barang material.³ Suatu defenisi modernisasi lainnya, yakni yang paling cenderung dikemukakan bagi negara-negara yang lebih maju di Dunia Ketiga, adalah bahwa modernisasi dianggap sebagai sebuah tradisi baru. Disini modernisasi mengacu pada urbanisasi, atau sampai sejauh mana dan bagaimana proses pengikisan dan sifat-sifat pedesaan suatu masyarakat berlangsung. Diseluruh Dunia Ketiga telah lahir pusat-pusat perkotaan yang hampir sama dengan pusat-pusat nasional ditempat-tempat yang lain.⁴

Modernisasi, pada tingkat ini, bersangkutan paut dengan lokasi fisik (*physical locale*) dan penempatan geografis masyarakat, dan bukan transportasi-komunikasi, atau konsumerisme-kelimpahan. Modernisasi mengacu pada transisi dari kehidupan paguyuban pedesaan (*Gemeinschaft*) menuju kehidupan kota (*Gesselschaft*).⁵

Sebagai suatu konsep modernisasi seperti halnya tradisionalisme, jelas melahirkan banyak hal yang perlu dijelaskan, bukan karena sarjana sosial tidak memiliki keahlian atau intelektual, melainkan karena lingkup sosial tersebut sangatlah kompleks. Kita belum mengemukakan bagaimana caranya menganalisa sebuah istilah penting seperti modernisasi secara kualitatif, apalagi secara kuantitatif.⁶

Dalam hal ini harus segera kita catat bahwa seperti halnya kebanyakan sarjana sosial Barat, sedikit banyak berfikir linear tentang modernisasi. Artinya, bangsa-bangsa Barat sekarang ini dapat mencapai kemajuan setelah melewati proses sekulerisasi dan karena itu bangsa-bangsa lain yang mendambakan kemajuan harus juga melalui sekulerisasi, sebagai satu ciri terpenting modernisasi.⁷ Sesungguhnya bukan saja Smith berfikir linear tentang modernisasi, tetapi sekaligus sampai tahap tertentu ia

3 *Ibid*, h. 43

4 *Ibid*, h. 43

5 Louis Irving Horowitz, *Revolusi, Militerisasi dan Konsolidasi Pembangunan*, h.43

6 *Ibid*, h.43-44

7 Donal Eugene Smith, *Agama dan Modernisasi Politik*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), h. 10

telah bersikap etnisentrik. Artinya, pengalaman bangsa lain seolah-olah tidak ada alternatif lain bagi bangsa-bangsa non-Barat.⁸

Sejak Adam Smith, adalah orang yang yang mengarang buku *Agama dan Modernisasi Politik* meneliti sebab-sebab dari pertumbuhan ekonomi para intelektual telah berusaha menjelaskan mengapa beberapa masyarakat berhasil melaksanakan modernisasi lebih cepat dari pada yang lain.⁹ Munculnya berpuluh-puluh negara baru merdeka ditahun-tahun belakangan ini, dengan bimbingan kelompok-kelompok elite yang berketetapan hati untuk memodernisasikan masyarakat dan kehidupan ekonomi mereka, telah memberi dorongan baru bagi study proses modernisasi. Jumlah sarjana peneliti meningkat, dan pendekatan-pendekatan mereka berbeda jauh dengan pendekatan yang dipergunakan pada abad-19 dan awal abad-20 oleh kebanyakan ahli sejarah dan teoritis sosial dalam meneliti proses modernisasi.¹⁰

Pertama, para sarjana dewasa ini berusaha menerapkan secara ketat pendekatan yang lebih empiris. Mereka berketetapan hati untuk membentuk hipotesa-hipotesa sedemikian rupa sehingga bisa diuji secara empiris.¹¹

Kedua, sementara studi-studi yang terdahulu memusatkan perhatian pada Eropa Barat dan Amerika Serikat sebagai wilayah-wilayah dimana timbul modernisasi pertama kali, penelitian dewasa ini semakin universalistik dan komperatif. Studi mulai diarahkan pada negara-negara di luar Eropa Barat yang sudah maju dalam menjalankan proses modernisasi, terutama Turki, Jepang dan Uni Soviet, dan perhatian juga semakin banyak diberikan pada kebudayaan-kebudayaan yang tahap perkembangannya jauh dibelakang mereka.¹²

8 *Ibid*, h. 10

9 Yahya Muhaimin, Colin MacAndrews, *Masalah-Masalah Pembangunan Politik*, h.20

10 *Ibid*, h. 20

11 *Ibid*

12 *Ibid*

Studi tentang proses modernisasi seperti yang terjadi jelas memiliki beberapa kelemahan, karena sering kali kita tidak tahu apakah suatu proses tertentu itu mendorong atau menghambat modernisasi, paling tidak, sebelum hasilnya bisa diramalkan, tetapi sebaliknya, sekarang bisa melakukan studi pada tangan pertama mengenai sikap-sikap, motivasi-motivasi, dan hubungan-hubungan yang sebelumnya seringkali hanya dapat disimpulkan dari bukti-bukti historis.¹³

Ketiga, keahlian para sarjana mengenai modernisasi semakin dispesialisasikan ketika setiap disiplin dalam ilmu sosial mendekati proses modernisasi dari sudut pandangan ilmiahnya sendiri-sendiri. Jadi para sarjana sekarang mampu menganalisa segi-segi modernisasi dengan cara yang lebih sistematis, seperti bagaimana urbanisasi terjadi, bagaimana struktur-struktur sosial berubah, dan bagaimana industrialisasi berjalan.¹⁴

Singkatnya, dengan sifat mereka yang lebih empiris, universalitas, dan khusus dalam menerapkan ilmu pengetahuan untuk mempercepat proses modernisasi, para sarjana sosial itu sendiri merupakan pencerminan dari semangat masyarakat modern tempat mereka hidup.

Pada umumnya orang melupakan bahwa konsep modernisasi beserta sekulerisasi yang menyertainya sesungguhnya merupakan konsep yang berorientasi ke depan. Sebagaimana dikatakan oleh seorang sarjana, para teoritis modernisasi itu berpendapat bahwa masyarakat industrial Barat sudah arrived, sudah sampai pada tujuan modernisasi dan masyarakatnya sudah dapat menikmati hidup secara memuaskan, sehingga tidak dirasakan mendesak lagi untuk membahas masa depan masyarakat modern itu sendiri. Jadi minat mereka dalam menoleh kebelakang bukan untuk meramalkan masa depan masyarakat industrial Barat (walaupun futurologi kini makin memperoleh pasaran), akan tetapi terutama sebagai contoh masyarakat non-Barat.¹⁵

13 *Ibid*, h. 20-21

14 Donal Eugene Smith, *Agama dan Modernisasi Politik*, h. 10-11

15 *Ibid*, h. 11

Optimisme para teoritis modernisasi pada dasarnya merupakan *an-optimism of recroactive progress* yakni rasa puas dengan keadaan yang sekarang melahirkan optimisme tentang masa lalu dan relevansinya dengan masyarakat-masyarakat non-Barat, dalam meninggalkan tradisi dan memasuki tahap modernitas.¹⁶ Dengan perkataan lain, teori-teori modernisasi menunjukkan rasa puas masyarakat Barat terhadap status quo dan sekaligus harapan pada negara-negara berkembang untuk meniru apa yang telah dilalui oleh Barat.

Untung sekali kemudian timbul kritik tajam terhadap teori-teori konvensional tentang modernisasi. Teori modernisasi yang dianut oleh Donald Eugene Smith, pengarang buku ini, sudah tentu termasuk teori konvensional yang pada pertengahan 1970-an mulai diserang, terutama karena anggapan dasarnya mengenai dikotomi antara tradisi dan modernitas. Kritik-kritik tersebut antara lain mengatakan bahwa tradisi dan modernitas bukanlah konsep-konsep yang bersifat asimetris.

Modernitas mungkin dapat didefenisikan secara jelas. Sebaliknya tradisi bersifat sangat heterogen, sehingga dikotomi tradisi-modernitas secara analitis tidak dapat dipertanggung jawabkan. Bahkan jika dibahas lebih mendalam, modernitas ternyata juga akan menunjukkan ambiguitas atau kekaburan arti, terutama sekali karena pencampur adukkan antara yang Barat dan yang modern serta anggapan bahwa sesuatu yang modern berarti pasti baik. Kecendrungan kuat untuk melihat modernisasi dan westernisasi sebagai dua hal yang identik dikalangan sementara sarjana mungkin mengaburkan arti modernisasi itu sendiri.

Demikian juga kelemahan teori konvensional modernisasi mengandung implikasi hubungan “zero-sum” antara modernitas dan tradisi. Artinya, munculnya modernitas dalam masyarakat otomatis akan melunturkan dan kemudian menyapakan tradisi. Padahal dalam kenyataan, modernitas itu sering hanya melengkapi tradisi dan sama sekali tidak

¹⁶ Beling, Totten, *Modernisasi Masalah Model Pembangunan*, (Jakarta CV. Rajawali, 1980), h. 210

menghapuskannya . Institusi-institusi modern dapat saja didirikan, sementara institusi-institusi tradisional tetap berjalan dengan tangguh.

Modernitas dan tradisi tidak saling meniadakan (*mutually exclusive*). Dalam masyarakat tradisional pasti terdapat unsur-unsur modern, dan begitu pula sebaliknya, sehingga Lloyd dan Susanne Rudolph, dua orang profesor dari Universitas Chicago menulis buku berjudul “*The Modernity of Tradition*”. Dan dalam beberapa model modernisasi dapat memperkuat tradisi dan budaya tradisional. Misalnya transportasi, komunikasi, radio dan televisi dapat memperkuat unsur-unsur tradisi dan memperluas jangkauan budaya tradisional dalam masyarakat.¹⁷

B. MENDEFINISIKAN MODERNISASI.

Masing-masing disiplin ilmu sosial telah memusatkan perhatian pada unsur-unsur proses modernisasi yang berbeda. Sarjana ekonomi memandang modernisasi terutama dalam pengertian penerapan teknologi oleh manusia untuk mengendalikan sumber-sumber alam demi memperoleh peningkatan besar dalam pertumbuhan output per-kapita penduduknya. Sarjana sosiologi dan antropologi sosial terutama tertarik pada proses diferensiasi yang merupakan ciri masyarakat modern.

Mereka telah mempelajari cara-cara munculnya struktur-struktur baru untuk menjalankan fungsi-fungsi baru untuk menjalankan fungsi-fungsi yang telah ada yang sebelumnya dijalankan oleh struktur-struktur lin. Mereka juga memperhatikan diferensiasi-diferensiasi yang terjadi didalam struktur-struktur sosial apabila muncul lapangan pekerjaan baru, apabila berkembang lembaga pendidikan baru, dan apabila timbul jenis-jenis komunitas yang baru. Sarjana sosiologi juga mempelajari beberapa segi negatif yang menyertai proses modernisasi, seperti meningkatnya ketegangan sosial, gangguan mental, kekerasan, perceraian, kenakalan remaja, dan konflik-konflik rasial, relegius dan kelas.¹⁸

¹⁷ Donald Eugene Smith, *Agama dan Modernisasi Politik*, h. 12

¹⁸ Yahya Muhaimin, Colin MacAndrews, *Masalah-Masalah Pembangunan Politik*, hal 21

Sarjana politik juga telah memperhatikan segi-segi negatif dari modernisasi, tetapi perhatian mereka itu terutama di pusatkan pada masalah-masalah pembinaan bangsa dan pemerintahan yang menyertai pelaksanaan modernisasi. Sasaran perhatian mereka adalah cara-cara pemerintah meningkatkan kemampuannya untuk melakukan inovasi dan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi atau, membuat kebijakan bagi masyarakatnya. Karena adanya kemampuan-kemampuan itu didasarkan atas asumsi bahwa seluruh penduduk bersedia mendukung suatu identifikasi nasional yang sama dan menentang sistem politik yang berlaku sebagai cukup sah, sarjana politik mengarahkan penelitian pada lingkungan yang bisa menumbuhkan sikap-sikap itu.¹⁹

Mereka juga memperhatikan cara-cara elite pemerintahan menanggapi usaha-usaha dari partisipan-partisipan baru dalam kehidupan politik untuk memperoleh bagian kekuasaan. Dengan lain kata sarjana politik yang meneliti masalah pembangunan bukan hanya memperhatikan siapa yang melaksanakan dan bagaimana melaksanakan kekuasaan yang merupakan perhatian dari semua sarjana politik tetapi juga bagaimana pemerintah meningkatkan kemampuannya untuk melakukan inovasi perubahan, menanggapi tuntutan-tuntutan akan perubahan, dan menangani konflik sosial.²⁰

C. PANDANGAN MENGENAI TIMBULNYA MODERNISASI

Bagaimana manusia mengembangkan kecakapan dan sikap modern? Bagaimana suatu masyarakat, suatu ekonomi dan suatu dan suatu kehidupan politik menjadi modern? Cukup mudah untuk mengatakan bahwa manusia modern dan lembaga modern sering berkaitan, tetapi bagaimana cara mengaitkan keduanya itu? Pertanyaan ini, dengan jawaban yang bermacam-macam dari berbagai sarjana, memunculkan beberapa dari masalah paling sulit dan paling mendasar dalam ilmu sosial.

Diagnose kita mengenai kemampuan sistem-sistem tertentu untuk

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, h.23

menjalankan modernisasi, ramalan kita mengenai apakah mereka akan berkembang atau tidak, dan resep yang kita berikan mengenai langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mempercepat modernisasi dipengaruhi oleh jawaban-jawaban yang kita berikan pada pertanyaan dasar ini.²¹

Untuk memperoleh jawabannya beberapa sarjana telah melihat kembali tulisan-tulisan yang menyatakan bahwa masyarakat-masyarakat tradisional tertentu didalam dirinya mengandung benih-benih modernitas. Ia beranggapan bahwa perkembangan perdagangan, munculnya pusat-pusat perkotaan yang secara politis otonom pada akhir abad pertengahan, dan terutama sekali Repormasi Protestan telah meletakkan pondasi bagi modernisasi didunia barat.

Secara singkat dapat kita singgung pendapat dari para sarjana yang mengatakan bahwa usaha untuk melakukan perubahan didalam konteks tradisi itu sendiri tidak akan berpengaruh terhadap perubahan, dan bahwa suatu kebijaksanaan menolak tradisi seseorang merupakan cara yang lebih berhasil untuk menciptaka kesiagaan dalam diri seseorang untuk melakukan perubahan. Pemerintahan revoluciner sering kali menerapkan pandangan ini dan dengan begitu mengesampingkan masa lalu demi usaha menciptakan nilai-nilai baru dengan cepat.²²

Bila perbedaan tradisi tidak bisa menjelaskan mengapa beberapa masyarakat menjadi modern sedang masyarakat lainnya tidak, lalu apa yang bisa dijadikan sarana untuk memodernisasikan nilai-nilai dan sikap-sikap manusia? Beberapa diantara sarana yang paling sering disebutkan adalah pendidikan, komunikasi, dan kekuasaan yang mampu melakukan paksaan.

Mengenai pendidikan sebagai alat utama untuk menciptakan manusia modern, dikatakan bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam menanamkan rasa kesetiaan nasional dan menciptakan kecakapan

²¹ *Ibid*

²² Beling, Totten, *Modernisasi Masalah Model Pembangunan*, h. 211

dan sikap yang esensial bagi timbulnya inofasi teknologi.

D. MASYARAKAT TRADISIONAL DAN MODERNISASI

Apabila sikap dan praktik tradisional menghalangi modernisasi, maka untuk mengubah sikap dan praktik itu dapat dilakukan dua hal :

1. Dengan membuat undang-undang yang melarang manifestasi komunalisme dan kesukuan (seperti negara partai tunggal Afrika) untuk menanamkan persatuan nasional secepat mungkin.
2. Dengan menggunakan aspek kepercayaan tradisional yang menguntungkan untuk mengubah kepercayaan-kepercayaan itu sedikit demi sedikit.²³

Suatu paradoks dari modernisasi adalah bahwa perubahan dan partisipasi masyarakat mungkin malah memperbesar bukan melenyapkan, lingkup dan intensitas konflik komunal. Sudah sering diajukan asumsi bahwa pengikisan nilai tradisional akan memunculkan perkembangan nilai-nilai modern. Tetapi, prosesnya ternyata tidak sederhana. Penciptaan nilai-nilai baru membutuhkan 2 langkah :

1. Pelemahan norma-norma tingkah laku masyarakat yang sudah lama ada dengan jalan menumbangkan adat istiadat dan komitmen lama.
2. Penempatan atau induksi individu kedalam pola-pola kelompok, organisasi dan komitmen baru yang relatif lebih stabil. Tetapi, hasil dari perubahan sosial mungkin akan lebih banyak merupakan reinkarnasi dan solidaritas komunal, dari pada integrasi kelompok yang saling berbeda.²⁴

Alasan tetap adanya perasaan-perasaan primordial itu cukup se-

²³ Yahya Muhaimin, Colin MacAndrews, *Masalah-Masalah Pembangunan Politik*, h.

²⁴ *Ibid*

derhana. Pandangan dan kesetiaan seseorang sudah mulai terbentuk pada masa kanak-kanak sampai kemudian dewasa melalui proses sosialisasi.²⁵

E. MODEL DAN METODE MODERNISASI

Ada banyak jalan menuju modernisasi. Seperti yang telah kita ungkapkan pembentukan modernisasi adalah suatu proses masyarakat modern. Metode-metodenya berbeda, waktu yang tersedia berbeda, prioritasnya tidak sama. Di Inggris prosesnya bertahap. Perubahan sosial, ekonomi dan politik tidaklah serempak, tetapi berlangsung berabad-abad lamanya. Sebaliknya di Uni Soviet, modernisasi jauh lebih dipaksakan, industrialisasi, kolektivisasi pertanian yang dipaksakan dan penghindaran diri dari dunia Barat adalah ciri zaman Stalinis. Perubahan sosial, ekonomi dan politik, semuanya dibawah pengawasan ketat Partai Komunis, telah mengangkat Uni Soviet dari negara yang lemah menjadi sangat berpengaruh didunia.²⁶

Salah satu sifat modernisasi adalah adanya kepemimpinan dari sejumlah kaum kecil intelektual, yang biasanya berpendidikan barat, dan pengetahuan pandangannya lebih luas dari pada rakyatnya.²⁷ Birokrat Meiji dan pemimpin gerakan yang paling anti penjajahan di Afrika dan Asia memiliki keyakinan yang sama dan tertanam dalam-dalam pada diri mereka, yang diperolehnya dari pendidikan, yaitu keyakinan akan perlunya perubahan.²⁸

Akhirnya, study perbandingan modernisasi memberikan pengertian mengenai sifat perubahan politik, ekonomi dan sosial. Tetapi ahli politik ternyata berada dalam keadaan yang sulit, mereka harus menggambarkan proses yang paling bermakna tanpa memiliki teori perubahan yang umum atau pun ukuran-ukuran yang diterima secara luas.²⁹

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*, h. 37

²⁷ *Ibid*, h. 37

²⁸ *bid*

²⁹ *Ibid*, h. 39

Modernisasi pembangunan politik yaitu, dapat diupayakan seperti memodernkan pembangunan di Indonesia dengan pendekatan yang modern, modern difilsafatkan oleh filsafat ilmu yaitu efisiensi (waktu yang dimiliki dapat disesuaikan dengan pekerjaan yang berguna).

Modernisasi di Indonesia hanya dipandang sebagai rekayasa saja contoh handphone hanya digunakan untuk kebutuhan yang kurang bermanfaat seperti BBM, Twitter, Facebook sangat jauh berbeda dengan negara maju justru mereka tidak butuh alat komunikasi paling hanya sekedar kebutuhan primer mereka saja, contohnya untuk sms dan telepon.

Adapun dampak positif dan negatif dari modernisasi di Indonesia seperti, internet bagi mahasiswa itu dapat dipandang secara positif karena, adanya kemajuan teknologi kita sebagai mahasiswa dapat mengetahui informasi bukan malah prestise tetapi efisiensi.

Adapun dampak negatifnya yaitu, jika internet dikenalkan kepada anak kecil itu malah berdampak negatif bagi mereka, karena mereka belum mampu untuk berfikir secara rasional terhadap internet tersebut.

BAB VII

POLITIK MASYARAKAT DALAM EKONOMI ISLAM

Politik adalah ilmu pemerintahan atau ilmu siyasah, yaitu ilmu tata negara. Politik dalam islam menjuruskan kegiatan umat kepada usaha untuk melaksanakan syariat Allah melalui sistem kenegaraan dan pemerintahan. Ia bertujuan untuk menyimpulkan segala sudut islam yang syumul melalui satu institusi yang mempunyai *syahksiyah* untuk melaksanakan undang-undang. Pengertian ini bertepatan dengan firman Allah yang artinya : “dan katakanlah : Ya Tuhanku masukkanlah aku dengan cara yang baik dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik dan berikanlah padaku daripada sisi-Mu kekuasaan yang menolong (Al Isra: 80).

A. POLITIK EKONOMI ISLAM

Politik ekonomi islam adalah suatu jaminan untuk tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok (*basic needs*) tiap orang secara keseluruhan tanpa mengabaikan kemungkinan seseorang dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan keadaan kadar potensi yang dimilikinya sebagai seorang individu yang hidup ditengah komunitas manusia.³⁰ Politik ekonomi islam berupaya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam suatu negara dengan mengabaikan kemungkinan terjamin tidaknya kebutuhan hidup tiap-tiap individu. Politik ekonomi islam tidak hanya bertujuan untuk mengupayakan kemakmuran individu semata tanpa kendali tanpa memperhatikan terjamin tidaknya kehidupan individu lainnya.

Syariat islam telah menjamin tercapainya pemenuhan kebutuhan

³⁰ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: Bumi aksara, 2009), h. 38.

pokok (primer) tiap anggota masyarakat secara menyeluruh baik sandang, pangan, maupun papan. Islam mendorong orang agar menikmati rezeki yang halal serta dapat mengkonsumsi barang-barang sesuai dengan kemampuannya. Pada aspek lain islam melarang negara untuk mengambil pajak dari harta seseorang meskipun untuk kepentingan umat, selain dari sisa pemenuhan kebutuhan hidupnya secara wajar. Untuk menjaga stabilitas kehidupan sosial masyarakat dari hal-hal yang tidak dibenarkan, syariat islam melarang untuk memproduksi dan mengkonsumsi minuman keras. Bahkan minuman keras tidak dianggap sebagai barang ekonomi.

Sistem ekonomi islam mempunyai harapan agar dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis. Namun cita-cita ini sanagat sulit diwujudkan karna banyaknya ideologi sekuler yang menghambat dan ingin menghancurkan sistem ekonomi islam melalui berbagai strategi. Beberapa strategi yang diterapkan imperialis modern dalam menghalangi berkembangnya sistem kehidupan islam antara lain³¹ :

1. Perang pemikiran. Melalui media informasi yang canggih dan menggunakan jaringan internasional yang rapi serta dukungan pemilik modal, mereka melancarkan ide-ide yang bertentangan dengan syariat islam seperti demokrasi yang menempatkan kebenaran pada suara mayoritas bukan pada nilai normatif yang baku, ide hak asasi manusia yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan yang relatif kebenarannya diatas syariat islam.
2. Budaya non- Islami. Dengan menggunakan berbagai macam bentuk pertunjukan dan hiburan serta ditunjang dengan jaringan informasi global menyebarkan berbagai budaya yang tidak islami seperti permisivisme, free sex, alkoholisme, sadisme, hedonistik, konsumtif, dan sebagainya.

Kebijakan ekonomi yang menimbulkan ketergantungan. Strategi pembangunan di negara-negara muslim diarahkan untuk dapat tunduk-

31 *Ibid*, h. 41.

kan kepada kepentingan negara-negara besar, seperti orientasi pembangunan pada pertumbuhan, utang luar negeri, sistem moneter internasional, dan sebagainya.

Dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam ada sembilan asumsi dasar yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut :

- a. Keyakinan terhadap manusia islami sebagai lawan dari manusia ekonomi
- b. Kekurangharmonisan kepentingan.
- c. Kepemilikan relatif atas kekayaan pribadi, yang berimplikasi pada beberapa prinsip pemanfaatan kekayaan yaitu,
- d. Penggunaan berkelanjutan atas kekayaan,
- e. Zakat atas semua kekayaan yang dimiliki,
- f. penggunaan yang bersifat atas kekayaan,
- g. penggunaan kekayaan tanpa merugikan pihak lain,
- h. kekayaan diperoleh secara halal,
- i. penggunaan kekayaan secara tidak boros ataupun kikir, dan
- j. penggunaan kekayaan secara bermanfaat bagi kesejahteraan pemilikinya,
- k. pelaksanaan secara benar hukum waris islam
- l. Ketidakpercayaan terhadap kedaulatan konsumen dan produsen.
- m. Peranan negara yang terbatas.
- n. Penekanan terhadap sejarah dan di luar sejarah.
- o. Penekanan pada perubahan evolusioner dan struktur.
- p. Keluwesan dan kekakuan bawaan dalam hukum.

Perkembangan ilmu ekonomi Islam mengalami keadaan pasang surut naik dan surut seiring dengan dinamika perkembangan umat Islam di dunia. Ada empat fase perkembangan ilmu ekonomi Islam, yaitu sebagai berikut:

Fase pertama, selama pertengahan tahun 30-an beberapa ulama meskipun tidak memiliki pendidikan formal bidang ekonomi, namun memiliki pandangan jernih terhadap problem sosial ekonomi pada masa itu dan pendekatan Islam terhadapnya dengan melibatkan diri ke dalam subjek ini.

Fase kedua, selama 20 tahun terakhir para ekonom muslim berjuang keras lagi untuk mengembangkan beberapa aspek tertentu dari sistem moneter Islam. Suatu analisis ekonomi tentang alasan pelarangan riba dalam Islam diketengahkan dan kerangka pokok dari suatu sistem perbankan dan keuangan alternatif yang riba dirancang.

Fase ketiga, masa ini ditandai dengan usaha-usaha untuk mengembangkan institusi keuangan dan perbankan bebas bunga, baik disektor publik maupun swasta. Tercatat ada dua institusi keuangan, yaitu Islamic Development Bank di Jeddah dan Darul Mal Al-Islami di Bahamas dan Geneva beroperasi secara multinasional. Fase ini merupakan suatu fase yang membuktikan bahwa sistem ekonomi dan keuangan Islam dapat dioperasikan dalam kegiatan ekonomi modern.

Fase keempat, masa ini ditandai dengan suatu tuntutan terhadap ide tentang sistem ekonomi bebas bunga dalam realitas ekonomi modern dengan pendekatan komprehensif dan integral. Para akademisi dan praktisi bisnis Islam menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk menjawab soal ekonomi yang semakin kompleks dan mengglobal.

B. POLITIK EKONOMI ISLAM DALAM NEGARA KHILAFAH

Pembangunan ekonomi Indonesia, diakui atau tidak, mengacu pada sistem ekonomi kapitalisme. Dalam system ekonomi kapitalisme distribusi pendapatan untuk kebutuhan dalam negeri diatur secara global, bukan untuk kebutuhan seluruh penduduk per individu. Ekonomi tidak dibangun untuk memuaskan kebutuhan individu dan tidak untuk menyediakan pemuasan bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat. Ekonomi hanya difokuskan pada penyediaan alat yang memuaskan kebutuhan masyarakat secara makro dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional (national income).

Asumsinya, dengan banyaknya pendapatan nasional, ketika itu terjadilah distribusi pendapatan. Caranya adalah dengan memberi kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat. Semua individu dibiarkan bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang dia mampu sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya. Tidak diperhatikan apakah pemuasan itu merata dirasakan oleh semua anggota masyarakat, atau hanya terjadi pada sebagian saja. Tentu saja ini salah dan dzalim. Konsekuensi dari pengaturan semacam ini adalah menjadikan harga sebagai faktor yang mengatur distribusi. Orang yang memiliki kemampuan membeli akan memperoleh kekayaan. Sedangkan orang yang tidak memiliki kemampuan membeli tidak akan memperoleh apa pun. Dalam kondisi seperti ini, yang terjadi adalah rusaknya hubungan antara manusia. Manusia akan terpuruk dalam derajat binatang, dan nilai-nilai luhur terancam punah dari tengah-tengah manusia.

Berbeda dengan sistem ekonomi Islam. Pembangunan ekonomi dalam Islam bertujuan memuaskan kebutuhan primer bagi tiap-tiap individu. Yang termasuk dalam kebutuhan pokok (primer) dalam pandangan Islam mencakup kebutuhan terhadap barang-barang tertentu berupa makanan, pakaian dan perumahan, serta kebutuhan terhadap jasa-jasa tertentu berupa keamanan, pendidikan dan kesehatan. Islam memandang tiap orang secara individu, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Dengan demikian, politik ekonomi

Islam tidak sekedar meningkatkan taraf hidup dalam sebuah negara semata. Tidak menjadikan pertumbuhan nasional sebagai asas dalam perekonomian.

Politik ekonomi Islam bertujuan menjamin pendistribusian kekayaan bagi semua individu warga negara satu persatu, sehingga terjamin pemenuhan kebutuhan primer tiap individu secara menyeluruh. Ada pun yang dimaksud pendistribusian kekayaan itu sendiri adalah cara penguasaan kekayaan dan sumbernya. Politik ekonomi Islam adalah tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-hukum yang mengatur berbagai urusan manusia. Politik ekonomi Islam menjamin pemenuhan seluruh kebutuhan pokok bagi setiap individu secara menyeluruh dan memberikan peluang kepada individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder atau pun tersier) menurut kemampuannya, dengan memandang individu yang hidup dalam masyarakat tertentu yang memiliki cara hidup yang khas. Politik ekonomi Islam tidak lain adalah solusi bagi masalah-masalah mendasar bagi setiap individu dengan memandangnya sebagai manusia yang hidup sesuai dengan pola interaksi tertentu, serta memberikan peluang kepada individu untuk meningkatkan taraf hidupnya dan mewujudkan kemakmuran bagi dirinya di dalam cara hidup yang khas (Islam).

Ketika Islam mensyariatkan hukum-hukum perekonomian bagi manusia, maka itu ditujukan bagi individu. Pada saat yang sama, Islam menjamin hak hidup dan mewujudkan kemakmuran. Islam menetapkan hal itu direalisasikan di dalam masyarakat tertentu yang memiliki cara hidup yang khas. Oleh karena itu, syariah memberikan hukum-hukum yang menjadi mekanisme untuk menjamin terwujudnya pemuasan seluruh pemuasan kebutuhan pokok secara menyeluruh bagi setiap individu rakyat. Adapun mekanisme itu adalah sebagai berikut:

1. Islam mewajibkan laki-laki yang mampu untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan pokok bagi dirinya dan orang yang wajib dia nafkahi (QS 67: 15) Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka ber-

jalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

2. Islam mewajibkan para ayah untuk menanggung nafkah. Jika ayah tidak mampu maka beralih kepada ahli warisnya. (QS 2 : 233) “ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.
3. Jika tidak ada orang yang wajib menanggung nafkah mereka maka Islam mewajibkannya kepada Baitul Maal. Dengan mekanisme ini Islam telah memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok yaitu kebutuhan sandang, pangan dan papan bagi setiap individu, perindividu.

Di samping itu, Islam telah mendorong umat untuk bekerjasama di antara mereka. Rasulullah saw. Telah bersabda: “Siapapun penduduk negeri yang bangun pagi, sementara di tengah-tengah mereka terdapat orang yang kelaparan, maka jaminan Allah dan RasulNya telah terlepas dari mereka”.

Oleh karena itu, Islam tidak memperumit cara yang digunakan manusia untuk mendapatkan harta. Islam menetapkannya dengan sangat

sederhana, yakni dengan membatasi akad-akad ketika manusia berinteraksi dalam pertukaran kepemilikan. Islam juga membiarkan manusia untuk berkreasi dalam hal cara dan sarana yang digunakan untuk memperoleh harta. Dan Islam tidak ikut campur dalam teknik produksi harta. Hal itu diserahkan pada kreasi dan inovasi manusia. Pada permulaan Islam, terdapat dua kebijakan yang dilakukan Rasulullah saw dan Khulafar-Rasyidin untuk pengembangan ekonomi serta peningkatan partisipasi kerja dan produksi. Pertama, mendorong masyarakat memulai aktifitas ekonomi, baik dalam kelompok sendiri maupun bekerja sama dengan kelompok lainnya, tanpa dibiayai oleh Baitul Mal. Kedua, kebijakan dan tindakan aksi yang dilakukan Rasulullah dan Khulafar-Rasyidin dengan mengeluarkan dana Baitul Mal.

Dalam pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, untuk pertama kalinya diadopsi mekanisme distribusi setiap pekan sekali. Hari Kamis adalah hari pendistribusian, semua perhitungan diselesaikan. Dan pada hari Sabtu dilakukan perhitungan baru. Subsidi negara untuk para fuqara dan masakin (orang-orang yang tidak mampu) bukan sekedar dibagi rata dan diberikan dalam jumlah yang kecil-kecil, tetapi juga mereka dijamin oleh pemerintah selama satu tahun agar tidak sampai kekurangan. Bila kita merujuk apa yang diajarkan oleh Imam Nawawi (Mazhab Shafi'i) yaitu agar memberikan modal yang cukup besar dalam memulai bisnis, tidak hanya untuk dikonsumsi saja, sehingga fungsinya betul-betul untuk mengangkat seseorang dari garis kemiskinan ke atas garis kemiskinan.

C. KEKUATAN EKONOMI ISLAM

Dalam era globalisasi ini kita semua harus mengetahui berbagai pergeseran kekuasaan, tidak saja bagi masyarakat ilmu politik, ekonomi, pemerintahan dan administrasi negara secara hukum, tetapi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari yang paling rendah sampai dengan tingkat teratas, perlu mengkajinya, karena tidak selamanya kita akan hidup dalam masa mengambang dan keterbelakangan.

Di Indonesia dikenal istilah GNB (Gerakan Non Blok) yang pantas

diperhitungkan sebagai alternatif akan adanya kekhawatiran bahwa tata dunia baru diwarnai dengan ketidakseimbangan kekuatan di antara aktor dominan internasional. Terlepas dari segala kekurangannya karena hanya menghimpun negara-negara yang relatif miskin, namun sebagai suatu gerakan komitmen lebih dari seratus negara ini untuk bersatu merupakan modal besar, untuk dapat menjadi faktor pengimbang yang berpengaruh bagi terciptanya tata dunia baru pasca perang dingin.

Yang perlu dipikirkan oleh GNB adalah kenyataan bahwa tatanan dunia baru mendatang akan semakin terkait dengan tatanan ekonomi dunia, jurang pemisah antara Utara dan Selatan yang semakin tajam, disebabkan kurangnya perhatian negara-negara kaya terhadap negara-negara miskin, membuat tatanan ekonomi duniansaat ini hanya menguntungkan negara industri maju saja.

Pada tanggal 7 pebruari 1992 resmi para menteri luar negeri 12 negara masyarakat eropa (ME) menandatangani the Treaty on European Union (TEU) di Maastricht. Bagi negara Asia khususnya Indonesia, perjanjian maastricht kurang berpengaruh banyak untuk saat ini, kecuali sebuah deklarasi yang mengaitkan Timor-Timur. Selain dari itu perjanjian Maastricht secara khusus dan formal itu menunjuk satu masalah pun yang ada di Asia,itu untuk saat pertama berdirinya ini. Sebagai contoh, bantuan 100 juta dolar Amerika serikat yang dicadangkan Masyarakat eropa untuk Indonesia,untuk sementara ditanggguhkan menunggu Portugal mengambil sikap. Alasan mereka karena Indonesia dianggap melanggar hak asasi dalam peristiwa Dili pada tanggal 12 Nopember 1991.

Tetapi bagaimanapun ini memperlihatkan bahwa tidak satu negara pun yang sepenuhnya serupa dengan negara lain (sistem pemerintahannya).³² Sejarah telah memperlihatkan kepada kita semua, bahwa dalam memainkan kekuasaan atas aset suatu bangsa lain bisa menimbulkan malapetaka besar, karena negara itu sudah tentu merasa digencet, sedangkan bagaimanapun juga mereka perlu hidup

32 Prof. Mr. M. Nasroen, *Ilmu Perbandingan Pemerintahan*, (Jakarta Aksara Baru, 1986),h.54

D. EKONOMI SEBAGAI TITIK BERAT PEMBANGUNAN POLITIK

Pembangunan dalam masa Demokrasi Pancasila ini dititikberatkan pada bidang Ekonomi, sementara pembangunan politik lebih ditunjukkan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan ekonomi. Target yang hendak dicapai oleh pembangunan jangka panjang adalah tercapainya industrialisasi yang ditopang oleh pertanian yang kuat.

Pilihan ekonomi sebagai titik berat pembangunan juga didorong oleh parahnya situasi ekonomi warisan periode demokrasi terpimpin. Upaya pembangunan yang disusun secara rencana ini, kendati mengalami beberapa hambatan, namun mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Sebagai usaha penanggulangannya, kebijaksanaan pajak dan upaya menarik modal dari dalam negeri serta kebijaksanaan ekspor non-migas masih belum menampakkan hasil yang memuaskan. Untunglah kesemuanya ini tidak sampai menimbulkan kembali gejolak politik.

Adapun titik berat pembangunan ini adalah dalam bidang ekonomi, akan tetapi penataan sistem politik tidaklah diabaikan. Penataan ini diarahkan pada sasaran berupa penciptaan stabilitas politik yang mampu menopang pembangunan. Fungsi lembaga politik diatur dalam UUD 1945. Penataan sistem politik pertama-tama dilakukan dengan mengembalikan sistem kepartaian.

E. SISTEM EKONOMI ISLAM

Madinah merupakan negara yang baru terbentuk dengan kemampuan daya mobilitas yang sangat rendah dari sisi ekonomi. Oleh karena itu peletakan dasar-dasar sistem keuangan negara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Merupakan langka yang sangat signifikan karna sekaligus brilian dan spektakuler pada masa itu, sehingga Islam sebagai sebuah agama dan negara dapat berkembang dengan pesat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh rasulullah SAW berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Prinsip islam yang paling

mendasar adalah kekuasaan tertinggi hanya milik Allah semata dan manusia diciptakan sebagai khalifah-Nya dimuka bumi.³³

Islam memandang bahwa setiap orang mempunyai hak penuh untuk dapat memiliki penghasilan atau memperoleh harta kekayaan secara legal sehingga dapat menunaikan kewajiban agamanya dengan baik. Berdasarkan pandangannya yang paling prinsip tentang status manusia dimuka bumi, islam dengan tegas dan keras melarang segala bentuk praktik ribawi atau bunga uang.

F. STRUKTUR POLITIK

1. Struktur Fisikal

Struktur fisik adalah komunitas manusia kurang lebih terikat pada wilayah geografik. Territorium dan populasi secara tradisional diakui sebagai unsur-unsur dasar bangsa-bangsa dalam teori negara, akan tetapi sebenarnya mereka adalah komponen-komponen dari setiap kelompok manusia

2. Struktur Geografis

Politik negara adalah didalam geografinya hubungan antara iklim dan kebebasan politik, yang harus diungkapkan kembali selama berabad-abad kelak. Tidak ada yang tidak mengakui bahwa politik tergantung dari geografi, akan tetapi mereka tidak sependapat tentang tingkat ketergantungan.

33 Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2010), h. 27-28.

BAB VIII

PERMASALAHAN EKONOMI DAN PERANAN PEMERINTAH

A. Permasalahan Ekonomi

1. Kelangkaan dan Pilihan

Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan naluri manusia. Sejak kecil, manusia sudah menyatakan keinginan dengan berbagai cara, misalnya menangis untuk menunjukkan bahwa seorang bayi lapar dan ingin minum susu dari ibunya. Semakin besar dan akhirnya dewasa keinginan dan kebutuhan manusia akan terus meningkat dan mencapai puncaknya pada usia tertentu dan akan menurun hingga seorang meninggal.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kelangkaan yang biasa diartikan sebagai sesuatu yang jumlahnya sedikit. Dalam ilmu ekonomi kelangkaan memiliki arti yang berbeda yaitu tidak cukup jika dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan manusia disertai dengan pengorbanan untuk mendapatkannya. Karena itu kita dituntut untuk melakukan pilihan karena adanya keterbatasan dari hal-hal yang kita inginkan.

Kebutuhan manusia tidak terbatas disebabkan teknologi, kemajuan kebudayaan dan meningkatnya tarif hidup. Karena adanya kelangkaan tersebut manusia melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia melakukan kegiatan ekonomi karena dihadapkan kepada mas-

alah kelangkaan.¹

Manfaat mempelajari kegiatan ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Membantu menentukan cara yang tepat memanfaatkan sumber daya yang langka menjadi alat pemuas kebutuhan yang member kepuasan maksimum.
- b. Membantu menggunakan alat pemuas yang terbatas.
- c. Membantu memilih dan menetapkan urutan kebutuhan yang paling penting sampai yang kurang penting.

Kegiatan yang dilakukan oleh manusia ada banyak macamnya. Untuk mempermudah manusia maka kegiatan ekonomi dapat digolongkan berdasarkan tujuan dan pelakunya:

a. Tujuannya

Berdasarkan tujuannya, kegiatan secara garis besar dibagi menjadi tiga yaitu:

- Kegiatan produksi yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa atau kegiatan menambah manfaat suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia.
- Kegiatan distribusi yaitu kegiatan menyampaikan barang yang telah dihasilkan oleh produsen ke konsumen.
- Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa sehingga mencapai kepuasan.²

b. Pelakunya

Kegiatan ekonomi berdasarkan pelakunya dibagi menjadi tiga yaitu:

- Kegiatan ekonomi rumah tangga yaitu kegiatan ekonomi yang

¹ Dwi Joko. *Ilmu Ekonomi*, (Solo : Usaha Makmur, 1998), h.3.

² *Ibid*, h. 20.

dilakukan oleh rumah tangga seperti : makan, minum, belanja, menabung dan lain- lain.

- Kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan suatu badan seperti : membeli bahan jadi , mengolah produk, menggaji karyawan, dan lain- lain.
- Kegiatan ekonomi rumah tangga pemerintah yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah atau Negara untuk mencapai kemakmuran masyarakat.³

2. Kebutuhan manusia

Setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda- beda baik dalam rangka memenuhi keinginan yaitu kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kemakmuran. Kebutuhan manusia berbeda disebabkan oleh beberapa hal yaitu keadaan alam, kebudayaan dan agama.

Karena kebutuhan manusia tidak terbatas, maka untuk dapat memahaminya perlu diadakan pengelompokan berdasarkan:

1. Tingkat kepentingan

Berdasarkan tingkat kepentingannya, kebutuhan dibedakan menjadi tiga yaitu:

- Kebutuhan primer yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Contoh kebutuhan primer adalah makanan, minuman, pakaian dan lain-lain.
- Kebutuhan tambahan yaitu kebutuhan sebagai pelengkap kebutuhan primer. Contoh lemari , tempat tidur, meja dan lain-lain.
- Kebutuhan tersier yaitu kebutuhan mempertinggi harga diri seseorang. Contoh AC, mobil mewah, perhiasan dan lain- lain.⁴

³ *Ibid*, h. 21.

⁴ *Ibid*, h. 5.

2. Berdasarkan sifatnya

Kebutuhan dibedakan menjadi dua yaitu:

- Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan untuk memenuhi kepentingan raga manusia. Contoh makanan, minuman, pakaian dan lain-lain.
- Kebutuhan rohani yaitu kebutuhan untuk memenuhi kepentingan jiwa manusia. Contoh beribadah, ilmu pengetahuan, berwisata dan lain- lain.

3. Berdasarkan waktu pemenuhannya

- Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat ini juga. Contohnya adalah seseorang yang kelaparan, kehausan ,sakit dan lain- lain.
- Kebutuhan yang akan datang yaitu kebutuhan yang tidak harus segera dipenuhi pada saat sekarang. Contohnya menabung untuk hari tua.

4. Berdasarkan subjeknya

- Kebutuhan individu yaitu kebutuhan yang dibutuhkan perorangan. Contohnya : makan, minum, pakaian dan lain-lain.
- Kebutuhan bersama yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kepentingan bersama umum. Contoh : jalan , jembatan, rumah sakit dan lain- lain.

5. Berdasarkan kesiapan penggunaan atau proses pembuatannya, alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi tiga yaitu:

- Bahan mentah yaitu bahan baku yang harus diproses lebih lanjut agar dapat memenuhi kebutun manusia.
- Barang setengah jadi yaitu barang yang sudah diproses tetapi

masih memerlukan proses lebih lanjut agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

- Barang jadi yaitu barang yang telah diproses sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁵

3. Alat Pemenuhan Kebutuhan

Kebutuhan manusia banyak dan bermacam-macam. Setiap kebutuhan menuntut pemenuhannya. Seseorang dikatakan mencapai kemakmuran jika sebagian besar kebutuhannya dapat terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia membutuhkan alat pemenuhan kebutuhan.

Meskipun ada keterbatasan jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan manusia. Namun alat pemenuhan kebutuhan manusia jumlah dan macamnya juga banyak. Untuk memahami macam-macam alat pemenuhan kebutuhan, maka alat pemenuhan kebutuhan tersebut kita golongkan dengan berbagai penggolongan seperti berikut:

- 1) Berdasarkan sumbernya, alat pemenuhan kebutuhan manusia dibagi yaitu
 - a. Sumber daya alam yaitu sumber daya yang berasal dari alam dan tidak dapat diciptakan oleh manusia.
 - b. Sumber daya manusia yaitu alat pemenuhan kebutuhan yang berasal dari diri manusia baik berupa pikiran, tenaga atau yang lainnya.
- 2) Berdasarkan hubungannya dengan barang lain, alat pemenuhan kebutuhan dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Barang substitusi yaitu barang yang dapat menggantikan fungsi barang lain.
 - b. Barang komplementer yaitu barang yang berfungsi melengkapi

⁵ *Ibid*, h. 6.

pi barang lain.

- 3) Usaha- usaha yang dapat dilakukan dalam menghadapi permasalahan ekonomi secara sederhana

Adapun usaha – usaha dalam mengatasi kelangkaan sumber daya dikelompokkan menjadi 2 cara, yaitu menyusun skala prioritas kebutuhan dan berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya

1) Menyusun Skala Prioritas Kebutuhan

Skala prioritas kebutuhan adalah suatu daftar tentang berbagai macam kebutuhan hidup yang disusun berdasarkan kepentingannya, dari yang paling penting dan mendesak, dapat ditunda pemenuhannya hingga tidak perlu dipenuhi. Dalam menyusun skala prioritas kebutuhan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya 2 point berikut:

- a. Urutan pemuasan kebutuhan harus didasarkan pada tingkat kepentingan dan mendesak tidaknya kebutuhan tersebut . Langkah ini perlu dilakukan agar kita dapat menentukan kebutuhan apa saja yang perlu segera dipenuhi dan mana yang masih bisa ditunda pemenuhannya.
- b. Disesuaikan dengan penghasilan. Karena semua kebutuhan tetap tidak akan terpenuhi apabila total uang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan lebih besar daripada penghasilan.

2) Berlaku Arif dan Bijaksana dalam Memanfaatkan Sumber Daya

Berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya bisa diterapkan dengan melakukan usaha – usaha berikut.

- a. Memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan efektif serta menggali yang belum terangkat.. Kegiatan ini perlu dilakukan agar sumber daya yang ada tidak cepat rusak atau

puna dan yang baru dapat dimanfaatkan secara optimal. Contohnya : memperbaiki barang yang rusak.

- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui kegiatan ini diarpakan terbentuk tenaga – tenaga terampil dan ahli di bidang sehingga dapat memaksimalkan kegunaan sumber daya. Misalnya, menyelenggarakan kursus menjahit dan pelatihan montir.
- c. Mengelola dan mendayagunakan sumber modal secara tepat guna. Pengelolaan sumber daya modal secara tepat guna akan membuat seseorang mampu mengatur penghasilannya dengan benar. Bagi pengusaha, ia bisa mengefisienkan biaya operasional sehingga keuntungan yang diperoleh pun maks

B. Peran Pemerintah dan Sistem Pemerintahan dalam Bidang Ekonomi

1. Peran Pemerintah dalam Perekonomian

Negara memainkan peran aktif dalam kehidupan ekonomi yang pada dasarnya ditujukan dalam komitmennya untuk memenuhi standar hidup minimum bagi semua anggota masyarakat. Demi tercapainya tujuan Negara harus menjamin bahwa sumber-sumber dimanfaatkan sepenuhnya. Fasilitas infrastruktur disediakan dengan benar dan ada lingkungan yang kondusif bagi aktifitas ekonomi dengan menegakkan hukum dan stabilitas, serta memberikan keadilan bagi masyarakat.⁶

Tidak ada satu negarapun di dunia ini yang tidak melibatkan peran pemeritah dalam sistem perekonomiannya. Tidak juga di negara yang menganut sistem kapitalis yang mengkehendaki peran swasta lebih dominan dalam mengelola perekonomiannya. Karena tidak ada satupun negara kapitalis di dunia ini yang menganut sistem kapitalis murni. Menurut

⁶ . Suherman Rosydi, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT Grafindo,2004), h.77.

Adam Smith, ahli ekonomi kapitalis, mengemukakan teorinya bahwa dalam perekonomian segala sesuatunya akan berjalan sendiri-sendiri menyesuaikan diri menuju kepada keseimbangan menurut mekanisme pasar. Tarik-menarik kekuatan dalam sistem perekonomian itu seperti dikendalikan oleh "*the invisible hand*", sehingga dengan demikian tidak memerlukan begitu banyak campur tangan pemerintah. Maka menurut Adam Smith peranan pemerintah hanya meliputi tiga fungsi saja, yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri
- b. Menyelenggarakan peradilan
- c. Menyediakan barang-barang yang tidak bisa disediakan oleh swasta⁷

Pemerintah adalah pemegang amanah untuk menjalankan tugas-tugas dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh masyarakat, jadi pemerintah adalah agen tuhan yang memiliki peran penting dalam menjalankan kewajiban. Di Indonesia peran pemerintah dalam mewujudkan perekonomian menuju masyarakat yang adil dan makmur termuat dalam landasan Pancasila yaitu "mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara kesatuan yang merdeka, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan yang aman."

Namun secara umum pemerintah memiliki lima peran dalam perekonomian di Indonesia yaitu:

- a) **Menciptakan Kerangka Aturan Main bagi Setiap Pelaku dalam Perekonomian**

Aturan main dibuat untuk menghindari penyalahgunaan persaingan. Baik persaingan antar sesama produsen maupun persaingan antara produsen dan konsumen. Umpamanya saja untuk melindungi konsumen

⁷ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT Grafindo, 2004), h. 38.

dari kecurangan produsen pemerintah membuat standar kualitas produk yang harus dipatuhi produsen. Pemerintah juga melindungi pekerja dari pemberian upah yang terlalu rendah dengan cara menetapkan upah minimum, dan juga melindungi mereka dari pemutusan hubungan kerja yang semena-mena dengan jalan mengharuskan perusahaan untuk membayar uang pesangon.

b) Mendistribusikan Pendapatan

Untuk mengurangi ketimpangan dalam pembagian pendapatan, maka pemerintah dengan kemampuannya untuk menarik pajak berusaha mendistribusikan kembali pendapatan masyarakat. Mereka yang berpendapatan tinggi dikenakan pajak yang lebih tinggi daripada yang berpendapatan lebih rendah. Selanjutnya, dengan penerimaan yang diperoleh dari pajak pemerintah juga dapat membantu masyarakat yang berpendapatan rendah dengan cara memberikan subsidi. Misalnya saja memberikan subsidi pada pelayanan kesehatan dasar yang diperoleh melalui puskesmas, subsidi pada biaya pendidikan dasar, dan subsidi pada harga beras, subsidi pada harga pupuk. Dengan adanya subsidi diharapkan mereka yang berpendapatan paling rendah pun dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

c) Memasukkan Biaya dan Manfaat Sosial ke dalam Harga

Selain berfungsi untuk meredistribusikan pendapatan, kemampuan pemerintah untuk menarik pajak dan membagi subsidi juga memungkinkan pemerintah untuk memasukkan biaya dan manfaat sosial ke dalam harga. Produk-produk yang produksi dan konsumsinya menciptakan biaya sosial dikenakan pajak agar minat seseorang untuk mengkonsumsi produk tersebut berkurang, dan dengan demikian produksi dapat dibatasi. Umpamanya rokok. Konsumsi rokok akan menciptakan biaya sosial bagi mereka yang tidak merokok dan merasa terganggu oleh asap rokok. Untuk alasan itulah maka pemerintah mengenakan pajak (cukai) pada harga rokok. Dengan adanya cukai rokok, harga rokok yang dibayar konsumen menjadi lebih tinggi (yaitu sebesar harga rokok ditambah cukai),

dan dengan demikian diharapkan konsumen akan mengurangi konsumsinya .

Contoh yang berlawanan adalah pelayanan kesehatan dasar. Penyediaan layanan kesehatan tidak hanya memberikan manfaat pada yang memperoleh layanan kesehatan itu saja namun juga memberikan manfaat kepada masyarakat luas, karena masyarakat yang sehat tentu akan lebih produktif. Mengingat manfaatnya yang begitu luas maka terdapat cukup alasan bagi pemerintah untuk memberikan subsidi terhadap biaya untuk memperoleh layanan kesehatan dasar dari puskesmas yang dapat terjangkau oleh masyarakat luas. Dengan biaya berobat yang murah, diharapkan masyarakat terdorong untuk pergi ke puskesmas manakala mereka membutuhkan jasa pengobatan. Dari dua contoh tersebut kita dapat melihat bagaimana pemerintah dapat ikut campur menentukan harga suatu barang dan jasa, sehingga manfaat dan biaya sosial dari suatu barang dan jasa dapat tercermin di dalam harga.

d) Melaksanakan Kebijakan Stabilisasi

Setiap pemerintahan memiliki kewajiban untuk menjaga agar perekonomian ada dalam situasi yang stabil. Artinya, tingkat inflasi terkontrol dan pengangguran berada pada tingkat yang wajar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pemerintah memiliki seperangkat peralatan seperti tingkat bunga, pengeluaran pemerintah, kebijakan pemberian kredit, pajak, dan sebagainya. Umpamanya saja perekonomian mengalami tingkat inflasi yang tinggi, maka pemerintah berkewajiban untuk mengendalikan angka inflasi tersebut. Bagaimanakah caranya? Berbagai cara dapat ditempuh pemerintah untuk mengendalikan inflasi, umpamanya saja dengan cara menaikkan tingkat bunga, menaikkan pajak, atau mengurangi belanja pemerintah. Semua kebijakan tersebut memiliki dampak mengurangi permintaan, yang akibatnya bisa menurunkan tingkat harga umum (inflasi). Sebaliknya, jika tingkat pengangguran begitu tinggi maka pemerintah akan berusaha untuk meningkatkan aktivitas perekonomian dengan cara, umpamanya, menurunkan tingkat bunga untuk mendorong pihak swasta untuk berinvestasi. Cara lain yang juga dapat ditempuh pe-

merintah adalah dengan cara memberikan kredit dengan tingkat bunga disubsidi kepada sektor-sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.

2. Sistem Pemerintahan dalam Bidang Ekonomi

a. Pemerintahan Transisi

Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Pemerintahan transisi merupakan peralihan antara pemerintahan zaman Soeharto ke pemerintahan B.J. Habibie.

Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan transisi memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Kegoncangan terhadap rupiah terjadi pada pertengahan 1997, pada saat itu dari Rp. 2.500 menjadi Rp 2.650 per dollar AS. Sejak masa itu keadaan rupiah menjadi tidak stabil.
- Krisis rupiah akhirnya menjadi semakin parah dan menjadi krisis ekonomi yang kemudian memunculkan krisis politik terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
- Pada awal pemerintahan yang dipimpin oleh Habibie disebut pemerintahan reformasi. Namun, ternyata pemerintahan baru ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, sehingga kalangan mas-

yarakat lebih suka menyebutnya sebagai masa transisi karena KKN semakin menjadi, banyak kerusuhan.

b. Pemerintahan Reformasi

Pada masa krisis ekonomi, ditandai dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru kemudian disusul dengan era Reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa ini tidak hanya hal ketanegaraan yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan ekonomi. Sehingga apa yang telah stabil dijalankan selama 32 tahun, terpaksa mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan.

1) Masa Kepemimpinan B.J. Habibie

Pada awal pemerintahan reformasi, masyarakat umum dan kalangan pengusaha dan investor, termasuk investor asing, menaruh pengharapan besar terhadap kemampuan dan kesungguhan pemerintah untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional dan menuntaskan semua permasalahan yang ada di dalam negeri warisan rezim orde baru, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); supremasi hukum; hak asasi manusia (HAM); Tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II; peranan ABRI di dalam politik; masalah disintegrasi; dan lainnya.

Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi. Di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000. Namun pada akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp 6500 per dolar AS nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurus perekonomian. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah sebagai beri-

kut :

- Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dan unit Pengelola Aset Negara
- Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah
- Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,00
- Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri
- Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
- Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat
- Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pemerintahan presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik.

2) Masa Kepemimpinan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Dalam hal ekonomi, dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 1999 kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan PDB mulai positif walaupun tidak jauh dari 0% dan pada tahun 2000 proses pemulihan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi dengan laju pertumbuhan hampir mencapai 5%. Selain pertumbuhan PDB, laju inflasi dan tingkat suku bunga (SBI) juga rendah yang mencerminkan bahwa kondisi moneter di dalam negeri sudah mulai stabil.

Akan tetapi, ketenangan masyarakat setelah terpilihnya Presiden Indonesia keempat tidak berlangsung lama. Presiden mulai menunjukkan sikap dan mengeluarkan ucapan-ucapan kontroversial yang membingungkan pelaku-pelaku bisnis. Presiden cenderung bersikap diktator dan praktek KKN di lingkungannya semakin intensif, bukannya semakin berkurang yang merupakan salah satu tujuan dari gerakan reformasi. Ini berarti bahwa walaupun namanya pemerintahan reformasi, tetapi tetap tidak berbeda dengan rezim orde baru. Sikap presiden tersebut juga menimbulkan perseteruan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang klimaksnya adalah dikelurkannya peringatan resmi kepada Presiden lewat Memorandum I dan II. Dengan dikelurkannya Memorandum II, Presiden terancam akan diturunkan dari jabatannya jika usulan percepatan Sidang Istimewa MPR jadi dilaksanakan pada bulan Agustus 2001.

Selama pemerintahan reformasi, praktis tidak ada satu pun masalah di dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik. Berbagai kerusuhan sosial yang bernuansa disintegrasi dan sara terus berlanjut, misalnya pemberontakan Aceh, konflik Maluku, dan pertikaian etnis di Kalimantan Tengah. Belum lagi demonstrasi buruh semakin gencar yang mencerminkan semakin tidak puasnya mereka terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri, juga pertikaian elite politik semakin besar.

Selain itu, hubungan pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Abdurrahman Wahid dengan IMF juga tidak baik, terutama karena masalah amandemen UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia; penerapan otonomi daerah, terutama menyangkut kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri; dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda pelaksanaannya. Tidak tuntasnya revisi tersebut mengakibatkan IMF menunda pencairan bantuannya kepada pemerintah Indonesia, padahal roda perekonomian nasional saat ini sangat tergantung pada bantuan IMF. Selain itu, Indonesia terancam dinyatakan bangkrut oleh *Paris Club* (negara-negara donor) karena sudah kelihatan jelas bahwa Indonesia dengan kondisi perekonomiannya yang semakin buruk dan defisit keuangan pemerintah yang terus membengkak, tidak mungkin mampu membayar kembali

utangnya yang sebagian besar akan jatuh tempo tahun 2002 mendatang. Bahkan, Bank Dunia juga sempat mengancam akan menghentikan pinjaman baru jika kesepakatan IMF dengan pemerintah Indonesia macet.

Ketidakstabilan politik dan social yang tidak semakin surut selama pemerintahan Abdurrahman Wahid menaikkan tingkat *country risk* Indonesia. Ditambah lagi dengan memburuknya hubungan antara pemerintah Indonesia dan IMF. Hal ini membuat pelaku-pelaku bisnis, termasuk investor asing, menjadi enggan melakukan kegiatan bisnis atau menanamkan modalnya di Indonesia. Akibatnya, kondisi perekonomian nasional pada masa pemerintahan reformasi cenderung lebih buruk daripada saat pemerintahan transisi. Bahkan, lembaga pemeringkat internasional *Moody's Investor Service* mengkonfirmasi bertambah buruknya *country risk* Indonesia. Meskipun beberapa indikator ekonomi makro mengalami perbaikan, namun karena kekhawatiran kondisi politik dan sosial, lembaga *rating* lainnya (seperti *Standard & Poors*) menurunkan prospek jangka panjang Indonesia dari stabil ke negatif.

Kalau kondisi seperti ini terus berlangsung, tidak mustahil tahun 2002 ekonomi Indonesia akan mengalami pertumbuhan jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya, bahkan bisa kembali negatif. Pemerintah tidak menunjukkan keinginan yang sungguh-sungguh (*political will*) untuk menyelesaikan krisis ekonomi hingga tuntas dengan prinsip *once and for all*. Pemerintah cenderung menyederhanakan krisis ekonomi dewasa ini dengan menganggap persoalannya hanya terbatas pada agenda masalah amandemen UU Bank Indonesia, desentralisasi fiskal, restrukturisasi utang, dan divestasi BCA dan Bank Niaga. Munculnya berbagai kebijakan pemerintah yang kontroversial dan inkonsistens, termasuk pengenaan bea masuk impor mobil mewah untuk kegiatan KTT G-15 yang hanya 5% (nominalnya 75%) dan pembebasan pajak atas pinjaman luar negeri dan hibah, menunjukkan tidak adanya *sense of crisis* terhadap kondisi riil perekonomian negara saat ini.

Fenomena makin rumitnya persoalan ekonomi ditunjukkan oleh

beberapa indikator ekonomi. Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) antara 30 Maret 2000 hingga 8 Maret 2001 menunjukkan *growth trend* yang negatif. Dalam perkataan lain, selama periode tersebut IHSG merosot hingga lebih dari 300 poin yang disebabkan oleh lebih besarnya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri. Hal ini mencerminkan semakin tidak percayanya pelaku bisnis dan masyarakat terhadap prospek perekonomian Indonesia, paling tidak untuk periode jangka pendek.

Indikator kedua yang menggambarkan rendahnya kepercayaan pelaku bisnis dan masyarakat terhadap pemerintah reformasi adalah pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Seperti yang dapat kita lihat pada grafik di bawah ini, pada awal tahun 2000 kurs rupiah sekitar Rp7.000,- per dolar AS dan pada tanggal 9 Maret 2001 tercatat sebagai hari bersejarah sebagai awal kejatuhan rupiah, menembus level Rp10.000,- per dolar AS. Untuk menahan penurunan lebih lanjut, Bank Indonesia secara agresif terus melakukan intervensi pasar dengan melepas puluhan juta dolar AS per hari melalui bank-bank pemerintah. Namun, pada tanggal 12 Maret 2001, ketika Istana Presiden dikepung para demonstran yang menuntut Presiden Gus Dur mundur, nilai tukar rupiah semakin merosot. Pada bulan April 2001 nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sempat menyentuh Rp12.000,- per dolar AS. Inilah rekor kurs rupiah terendah sejak Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.

Lemah dan tidak stabilnya nilai tukar rupiah tersebut sangat berdampak negatif terhadap roda perekonomian nasional yang bisa menghambat usaha pemulihan, bahkan bisa membawa Indonesia ke krisis kedua yang dampaknya terhadap ekonomi, sosial, dan politik akan jauh lebih besar daripada krisis pertama. Dampak negatif ini terutama karena dua hal. *Pertama*, perekonomian Indonesia masih sangat tergantung pada impor, baik untuk barang-barang modal dan pembantu, komponen dan bahan baku, maupun barang-barang konsumsi. *Kedua*, utang luar negeri (ULN) Indonesia dalam nilai dolar AS, baik dari sektor swasta maupun

pemerintah, sangat besar.

Indikator-indikator lainnya adalah angka inflasi yang diprediksi dapat menembus dua digit dan cadangan devisa yang pada minggu terakhir Maret 2000 menurun dari 29 milyar dolar AS menjadi 28,875 dolar AS.

Rangkuman keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil.
- Hubungan pemerintah dibawah pimpinan Abdurahman Wahid dengan IMF juga kurang baik, yang dikarenakan masalah, seperti Amandemen UU No.23 tahun 1999 mengenai bank Indonesia, penerapan otonomi daerah (kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri) dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda.
- Politik dan sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia.
- Makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cenderung negatif, bahkan merosot hingga 300 poin, dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri.

Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan

orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

3) Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri

Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri mengalami masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :

- Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US\$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
- Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional. Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain.

4) Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

a) Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid I (Era SBY- JK) = (2004-2009)

Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya *Indonesian Infrastructure Summit* pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.

Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Selain itu, pada periode ini pemerintah melaksanakan beberapa program baru yang dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil diantaranya PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Pada prakteknya, program-program ini berjalan sesuai dengan yang ditargetkan meskipun masih banyak kekurangan disana-sini.

Pada pertengahan bulan Oktober 2006, Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharap-

pkon Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negeri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006.

Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sektor riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sektor riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negeri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif. Namun, selama masa pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia memang berada pada masa keemasannya. Indikator yang cukup menyita perhatian adalah inflasi.

Sejak tahun 2005-2009, inflasi berhasil ditekan pada single digit. Dari 17,11% pada tahun 2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009. Tagline strategi pembangunan ekonomi SBY yang berbunyi pro-poor, pro-job, dan pro growth (dan kemudian ditambahkan dengan pro environment) benar-benar diwujudkan dengan turunnya angka kemiskinan dari 36,1 juta pada tahun 2005, menjadi 31,02 juta orang pada 2010. Artinya, hampir sebanyak 6 juta orang telah lepas dari jerat kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun. Ini tentu hanya imbas dari strategi SBY yang pro growth yang mendorong pertumbuhan PDB.

Imbas dari pertumbuhan PDB yang berkelanjutan adalah peningkatan konsumsi masyarakat yang memberikan efek pada peningkatan kapasitas produksi di sektor riil yang tentu saja banyak membuka lapangan kerja baru. Memasuki tahun ke dua masa jabatannya, SBY hadir dengan terobosan pembangunannya berupa master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3 EI). Melalui langkah MP3EI,

percepatan pembangunan ekonomi akan dapat menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan perkapita antara Us\$ 14.250-US\$ 15.500, dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara US\$ 4,0-4,5 triliun.

**b) Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid II (Era SBY-BOEDIONO)
= (2009-2014)**

Pada periode ini, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu :

1. BI rate
2. Nilai tukar
3. Operasi moneter
4. Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal.

Dengan kebijakan-kebijakan ekonomi diatas, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hampir tujuh tahun sudah ekonomi Indonesia di tangan kepemimpinan Presiden SBY dan selama itu pula perekonomian Indonesia boleh dibilang tengah berada pada masa keemasannya. Beberapa pengamat ekonomi bahkan berpendapat kekuatan ekonomi Indonesia sekarang pantas disejajarkan dengan 4 raksasa kekuatan baru perekonomian dunia yang terkenal dengan nama BIRC (Brazil, Rusia, India, dan China).

Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 semakin membuktikan ketangguhan perekonomian Indonesia. Di saat negara-negara superpower seperti Amerika Serikat dan Jepang berjatuh, Indonesia justru mampu mencetak pertumbuhan yang positif sebesar 4,5% pada tahun 2009. Gemilangnya fondasi perekonomian Indonesia direspon dunia internasional dengan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pilihan

tempat berinvestasi. Dua efeknya yang sangat terasa adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai rekor tertingginya sepanjang sejarah dengan berhasil menembus angka 3.800. Bahkan banyak pengamat yang meramalkan sampai akhir tahun ini IHSG akan mampu menembus level 4000. Indonesia saat ini menjadi ekonomi nomor 17 terbesar di dunia.

5) Pandangan Capres dan Cawapres 2014 Mengenai Permasalahan Ekonomi

Untuk permasalahan ekonomi nomor urut satu atau pasangan Prabowo - Hatta dalam agenda dan program untuk menyelamatkan Indonesia memuat bahwa perekonomian di Indonesia masih lemah dan belum mencapai kemakmuran sehingga membutuhkan penyelesaiannya diantaranya:

1. Membangun perekonomian yang kuat , berdaulat , adil dan makmur dengan cara seperti berikut:
 - a. Meningkatkan perndapatan perkapita penduduk dari 35 juta menjadi 60 juta dengan pertumbuhan ekonomi menjadi 7 persen per tahun menuju pertumbuhan diatas 10 persen.
 - b. Meningkatkan pemerataan dan kualitas ekonomi dengan mengurangi kemiskinan.
 - c. Meningkatkan daya serap angkatan kerja menuju 2 juta lapangan kerja pertahun melalui perbaikan regulasi dan infrastruktur .
 - d. Membangun industri pengelolaan untuk menguasai nilai tambah perekonomian.
 - e. Membangun dan mengembangkan industri nasional.
 - f. Mengambil kebijakan pro aktif dalam menjaga kestabilan.
2. Melaksanakan ekonomi kerakyatan demi perubahan dengan cara sebagai berikut:

- a. Peningkatan alokasi anggaran untuk membangun kegiatan ekonomi
 - b. Mendorong perbankan nasional dan lembaga keuangan
 - c. Mendirikan bank tani dan nelayan secara khusus.
 - d. Melindungi dan memodernisasikan pasar tradisional dan mengalokasikan dana APBN minimal 1 milyar.
3. Membangun kembali kedaulatan pangan , energi dan sumber daya alam
- a. Mencetak 2 juta hektar lahan baru untuk mengembangkan produksi baru.
 - b. Mendorong pembangunan industri pengolahan pangan , energi dan sumber daya.
 - c. Mendirikan peningkatan produksi dan konsumsi.
 - d. Membangun pabrik pupuk urea.
 - e. Menjamin harga pangan yang menguntungkan petani, peternak dan nelayan.
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan perekonomian
- a. Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar
 - b. Membangun prasarana di seluruh wilayah Indonesia.
 - c. Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis.
 - d. Memulai proses perencanaan perpindahan ibukota Negara.
 - e. Membangun infrastruktur, fasilitas pendukung kawasan industri nasional.

Sedangkan untuk capres dan cawapres nomor urut 2 yaitu Jokowi- Jk berpendapat sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat maju dan berkeimbangan.

Melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar dengan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program peningkatan layanan kesehatan masyarakat dengan menginisiasi kartu Indonesia sehat, serta peningkatan kesehatan masyarakat dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar , program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.

2. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati Negara maritim.

Jokowi – Jk berkomitmen untuk mengedepankan identitas Indonesia sebagai Negara kepulauan dalam melaksanakan diplomasi dan membangun kerjasama internasional. Politik luar negeri yang mencerminkan identitas Negara kepulauan diwujudkan melalui agenda aksi: diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian permasalahan perbatasan Indonesia, termasuk perbatasan darat dengan 10 negara tetangga Indonesia, menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/kesejahteraan pulau – pulau terdepan mengamankan sumber daya alam dan zona ekonomi eksklusif. Mengintensifkan pertahanan dan meredam rivalitas maritim diantara negara besar dan menyelesaikan sengketa teritorial di kawasan lainnya.

3. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

Jokowi – Jk akan memulihkan kepercayaan publik dengan melakukan pembinaan terus menerus mental dan disiplin anggota POLRI demi membangun keamanan dalam negeri. Selain itu Jokowi Jk akan menyesuaikan kurikulum pendidikan dan latihan untuk menghasilkan manusia

yang memiliki pendidikan tinggi sehingga bangsa Indonesia akan mencapai kesejahteraan.

4. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing.

Bangsa Indonesia harus bangkit bersama bangsa –bangsa asia lainnya. Untuk itu, Jokowi – Jk membangun infrastruktur jalan baru dan membangun pelabuhan baru . selain itu pasangan Jokowi –Jk juga akan membangun pasar tradisional sebanyak 500 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasikan pasar tradisional yang telah ada. Jokowi Jk juga akan menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan suatu bisnis hanya dengan 15 hari, meluncurkan kebijakan fiscal dan non fiscal untuk mendorong investasi sektor hulu dan hilir dan juga mendorong BUMN menjadi agen pembangunan.

BAB IX

POLITIK EKONOMI

A. PENGERTIAN POLITIK

Pengertian Politik Secara Singkat dan Simple adalah teori, metode atau cara untuk bisa meraih apa yang dituju. dan pendefinisian politik itu sendiri sangat banyak dan berikut ini Pengertian politik secara lengkap:

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional¹. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

1. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
2. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan Negara
3. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
4. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.²

¹ Afan Gaffari, *Politik Indonesia Tradisi Menuju Demokrasi*, cet. kedua, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000). h. 106

² Prof. Miriam Budiardjo, *Demokrasi Indonesia, Demokrasi Parlementer dan*

Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik. Etimologi Politik berasal dari bahasa Belanda *politiek* dan bahasa Inggris *politics*, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani *politika*, yang berhubungan dengan negara dengan akar katanya *polites* - warga negara dan polis - negara kota. Secara etimologi kata “politik” masih berhubungan dengan polisi, kebijakan. Kata “politis” berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata “politisi” berarti orang-orang yang menekuni hal politik.³

B. TEORI POLITIK

Teori politik merupakan kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta segala konsekuensinya. Bahasan dalam Teori Politik antara lain adalah filsafat politik, konsep tentang sistem politik, negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, perbandingan politik, dsb. Terdapat banyak sekali sistem politik yang dikembangkan oleh negara-negara di dunia antara lain: anarkisme, autoritarian, demokrasi, diktatorisme, fasisme, federalisme, feminisme, fundamentalisme keagamaan, globalisme, imperialisme, kapitalisme, komunisme, liberalisme, libertarianisme, marxisme, meritokrasi, monarki, nasionalisme, rasisme, sosialisme, theokrasi, dsb.⁴

C. POLITIK ISLAM

Politik berasal dari bahasa latin *politicos* atau *politicus* yang berarti *relating to citizen* (hubungan warga negara). Sedangkan dalam bahasa arab diterjemahkan dengan kata *siyasah*, kata ini diambil dari kata *saa-sa-yasuusu* yang diartikan mengemudi, mengendalikan dan mengatur (M

Demokrasi Pancasila, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1994). h. 83

3 Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah*, (Bandung : Mizan, 1995), h.240

4 Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara* (Jakarta : Gema Insani Pers, 1996), h. 126

Quraish Shihab,2000). Sedangkan menurut Abdul Qadir Zallum, mengatakan bahwa politik atau siyasah memiliki makna mengatur urusan rakyat, baik dalam maupun luar negeri. Dalam politik terdapat negara yang berperan sebagai institusi yang mengatur secara praktis, sedangkan rakyat mengoreksi pemerintahan dalam melakukan tugasnya. Maka dapat disimpulkan politik merupakan pemikiran yang mengurus kepentingan masyarakat. Pemikiran tersebut berupa pedoman, keyakinan hukum atau aktivitas dan informasi⁵.

Beberapa prinsip politik islam berisi: mewujudkan persatuan dan kesatuan bermusyawarah, menjalankan amanah dan menetapkan hukum secara adil atau dapat dikatakan bertanggung jawab, mentaati Allah, Rasulullah dan *Ulii Amr* (pemegang kekuasaan) dan menepati janji. Dari beberapa prinsip diatas yang berkorelasi dengan politik, menggambarkan umat islam dalam berpolitik tidak dapat lepas dari ketentuan-ketentuan tersebut. Berpolitik dalam islam tidak dapat berbuat sekehendak hatinya. Maka dapat disimpulkan bahwa politik islam memiliki pengertian mengurus kepentingan rakyat yang didasari prinsip-prinsip agama. Korelasi pengertian politik islam dengan politik menghalalkan segala cara merupakan dua hal yang sangat bertentangan. Islam menolak dengan tegas mengenai politik yang menghalalkan segala cara. Terlebih apabila mementingkan kepentingan individu atau kelompok. Sedangkan islam dalam berpolitik tidak sekedar mengurus atau mengendalikan rakyat saja, tetapi juga mengemban kebajikan untuk seluruh rakyatnya.⁶

Politik merupakan pemikiran yang mengurus kepentingan masyarakat. Pemikiran tersebut berupa pedoman, keyakinan hukum atau aktivitas dan informasi. Beberapa prinsip politik islam berisi: mewujudkan persatuan dan kesatuan bermusyawarah, menjalankan amanah dan menetapkan hukum secara adil atau dapat dikatakan bertanggung jawab, mentaati Allah, Rasulullah dan *Ulii Amr* (pemegang kekuasaan) dan me-

5 Azra, Azyumardi, Dr. 1996. Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme. Jakarta: Paramadina.

6 Ibn Khaldun, *Filsafat Islam Tentang Sejarah*,(terj.) Charles Issawi, dari judul asli *an Arab Philosophy of History*, cet.II (Jakarta: Tintamas, 1976), h. 180.

nepati janji. Korelasi pengertian politik islam dengan politik menghalalkan segala cara merupakan dua hal yang sangat bertentangan. Islam menolak dengan tegas mengenai politik yang menghalalkan segala cara. Pemerintahan yang otoriter adalah pemerintahan yang menekan dan memaksakan kehendaknya kepada rakyat. Setiap pemerintahan harus dapat melindungi, mengayomi masyarakat. Sedangkan penyimpangan yang terjadi adalah pemerintahan yang tidak mengabdikan pada rakyatnya; menekan rakyatnya. Sehingga pemerintahan yang terjadi adalah otoriter. Yaitu bentuk pemerintahan yang menyimpang dari prinsip-prinsip islam. Dalam politik luar negerinya islam menganjurkan dan menjaga adanya perdamaian. Walaupun demikian islam juga memperbolehkan adanya perang, namun dengan sebab yang sudah jelas karena mengancam kelangsungan umat muslim itu sendiri. Dan perang ini pun telah memiliki ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya. Jadi tidak sembarangan perang dapat dilakukan⁷.

Islam bukanlah semata agama (*a religion*) namun juga merupakan sistem politik (*a political sistem*), Islam lebih dari sekedar agama. Islam mencerminkan teori-teori perundang-undangan dan politik. Islam merupakan sistem peradaban yang lengkap, yang mencakup agama dan Negara secara bersamaan (M.Dhiaduddin Rais, 2001:5).Nabi Muhammad SAW adalah seorang politikus yang bijaksana. Di Madinah beliau membangun Negara Islam yang pertama dan meletakkan prinsip-prinsip utama undang-undang Islam. Nabi Muhammad pada waktu yang sama menjadi kepala agama dan kepala Negara⁸.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian politik sebagai kata benda ada tiga, yaitu :

1. Pengetahuan mengenai kenegaraan (tentang sistem dan dasar pemerintahan)
2. Segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya)

⁷ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, jilid II, cet. I, (Jakarta: UI Press, 1979), h. 92.

⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, sejarah dan pemikiran*, cet. I, (Jakarta: UI Press, 1990), h. 2-3

ya) mengenai

3. Kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah)⁹.

Politik itu identik dengan siyasah, yang secara pembahasannya artinya mengatur. Dalam fikih, siyasah meliputi :

1. Siyasah *Dusturiyyah* (Tata Negara dalam Islam)
2. Siyasah *Dauliyyah* (Politik yang mengatur hubungan antara satu negara Islam lainnya)
3. Siyasah *Maaliyah* (Sistem ekonomi negara)¹⁰.

Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi yang dapat mempersatukan kekuatan-kekuatan dan aliran-aliran yang berbeda-beda di masyarakat. Dalam konsep Islam, kekuasaan tertinggi adalah Allah SWT. Ekspresi kekuasaan dan kehendak Allah tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu penguasa tidaklah memiliki kekuasaan mutlak, ia hanyalah wakil (*khalifah*) Allah di muka bumi yang berfungsi untuk membukakan sifat-sifat Allah dalam kehidupan nyata. Di samping itu, kekuasaan adalah amanah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang berhak memilikinya. Pemegang amanah haruslah menggunakan kekuasaan itu dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah Rasul¹¹.

D. Islam dan Politik Indonesia

Bagaikan suatu perjalanan sentimental, membicarakan Islam dan politik di Indonesia melibatkan kekhawatiran dan harapan lama yang mencekam. Daerah ini penuh dengan ranjau kepekaan dan kerawanan, sehingga pekerjaan harus dilakukan dengan kehati-hatian secukupnya. Tapi berhati-hati tidaklah berarti membiarkan diri terhambat dan kehi-

⁹ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet XII, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 763.

¹⁰ Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, cet I, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), h. 318.

¹¹ Dhiauddin Rais, Teori politik Islam, bab V, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 43

langan tenaga untuk melangkah, sebab jelas pembicaraan harus dilakukan juga, mengingat berbagai alasan dan keperluan. Karena itu, untuk memulai kajian ini, kita bisa mengungkapkan hal-hal yang terjadi pada masa Orde Baru. Apakah yang didapati dalam Orde Baru? Ada beberapa hal yang mungkin diingkari mengenai Orde Baru, yaitu stabilitas sosial politik dan pembangunan ekonomi.¹²

Peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Presiden Soeharto memberikan optimisme politik yang besar kepada Natsir dan para mantan aktivis Masyumi. Optimisme itulah yang memotivasi mereka untuk merehabilitasi Masyumi, partai yang dibubarkan Soekarno 1960 akibat keterlibatan mereka dalam gerakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia). Optimisme itu kandas ditengah jalan. Sebab ternyata pemerintah Orde Baru tidak merestui rehabilitas partai Islam itu. Karena seperti ditulis Wertheim, pemerintahan Orde Baru Soeharto lebih khawatir dan takut terhadap Islam dibandingkan dengan Soekarno. Natsir semakin menyadari bahwa kebijakan-kebijakan awal politik Orde Baru memojokkan kalangan Islam disatu sisi dan menempatkan kelompok kecil elite terdidik non-Muslim dalam posisi strategis dalam Negara. Bahkan ia melihat adanya usaha sistematis dan terarah untuk mengeliminasi umat Islam secara sosial, politik dan kebudayaan melalui fusi partai-partai Islam awal 1970-an, intervensi pemerintah yang besar dalam persoalan-persoalan internal dalam partai-partai Islam, perumusan rencana undang-undang perkawinan, dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN, pelarangan libur bagi pelajar dibulan suci Ramadhan dan lain-lain. Natsir juga mengamati strategi pembangunan ekonomi Orde Baru, yang sekalipun diakuinya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ternyata telah memperlebar kesenjangan sosial ekonomi antara orang kaya dan miskin. Yang kaya makin kaya dan miskin makin menderita. Mereka yang tergolong miskin itu sebagian besar adalah kaum Muslimin, sedangkan yang kaya adalah penduduk non-pribumi.¹³

¹² Dr. Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam*, (Jakarta, cetakan kedua, PARAMADINA 2009), h. 3

¹³ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta:PT.Pustaka LP3ES Indonesia,1982), h.126.

Setelah Orde Lama hancur, kepemimpinan Indonesia berada ditangan Orde Baru. Tumbangnya Orde Lama yang umat Islam ikut berperan besar didalam menumbangkannya, memberikan harapan-harapan baru kepada kaum Muslimin. Namun kekecewaan muncul di masa tersebut. Umat Islam merasa, meskipun musuh bebuyutannya, komunis, telah tumbang kenyataan berkembang tidak seperti yang diharapkan. Rehabilitasi Masyumi, partai Islam berpengaruh yang dibubarkan Soekarno, tidak diperkenankan. Bahkan, tokoh-tokohnya juga tidak diizinkan aktif dalam partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang didirikan kemudian.¹⁴

Orde Baru memang sejak semula mencanangkan pembaruan sistem politik. Pada tanggal 26 November 1966, dengan sebuah amanat dari presiden disampaikan kepada DPRGR: RUU kepartaian, RUU pemilu dan RUU susunan MPR, DPR dan DPRD. Yang kedua dan ketiga ditetapkan 22 November 1969. sedang yang pertama terhenti. Pada 9 Maret 1970, fraksi-fraksi parpol di DPR dikelompokkan. Tiga tahun kemudian, parpol difusikan ke dalam PPP dan PDI (5 Februari 1973). Pada 14 Agustus 1975 RUU kepartaian disahkan. Penataan kehidupan kepartaian berikutnya adalah penetapan asas tunggal, pancasila untuk semua parpol, Golkar, dan organisasi lainnya, tidak ada asas cirri, tidak ada idiologi Islam, dan oleh karena itu tidak ada partai Islam. Asas tunggal merupakan awal dari era baru peran Islam dalam kehidupan berbangsa ini. Peran politik (formal) Islam tidak ada lagi, tetapi sebagai agama yang mengaku tidak memisahkan diri dari persoalan politik, tentu peran itu akan terus berlangsung mungkin dengan pendekatan yang berbeda.¹⁵

Meskipun umat Islam merupakan 87 persen penduduk Indonesia, ide Negara Islam secara terus menerus dan konsisten ditolak. Bahkan, partai-partai Islam, kecuali diawal pergerakan nasional, mulai dari masa penjajahan hingga masa kemerdekaan, selalu mengalami kekalahan. Malah dengan pembaharuan politik bangsa sekarang ini, partai-partai (berideologi) Islam pun lenyap.

¹⁴ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 1996), h. 126

¹⁵ Ma'rif Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3S,1987), h.108-109.

Menjelang Pancasila diputuskan Sidang Umum MPR 1983 sebagai satu-satunya asas kekuatan politik itu, banyak kalangan yang melontarkan suara-suara kontra. Suara-suara itu makin tajam tatkala Pancasila pada akhirnya, bukan saja diputuskan sebagai satu-satunya asas bagi kekuatan-kekuatan politik, tetapi juga terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi keagamaan di Indonesia. Adalah sangat wajar kalau suara kontra itu banyak yang berasal dari umat Islam. Bukan saja karena latar belakang sejarah yang pernah dilaluinya, tetapi karena pada saat gagasan itu dilontarkan, sub-sub ideologi yang pernah ada di Indonesia sudah “terkena” gagasan itu. Hanya partai persatuan pembangunan (PPP), fusi dari empat partai Islam Parmusi, NU, PSII, dan Perti, yang masih mempunyai ideologi atau asas ciri, yaitu Islam.¹⁶

Dengan pengasastunggalan, sebagian umat Islam menganggap bahwa penyalur aspirasi politik Islam hilang. Terdapat kekhawatiran di kalangan sebagian mereka terhadap ancaman sekularisasi politik dan kehidupan sosial di Indonesia. Kekhawatiran itu muncul dari perasaan keagamaan mereka. Ada anggapan bahwa dengan asas tunggal bagi kekuatan politik dan organisasi kemasyarakatan, identitas keislaman mereka akan semakin memudar. Amal usaha organisasi-organisasi keagamaan Islam pun dirasakan sia-sia. Untuk merumuskan situasi baru itu sekaligus memasyarakatkan kebijaksanaan tersebut, beberapa kalangan yang sejak semula tidak melihat kemungkinan lain, menyelenggarakan forum-forum yang berkenaan dengan aspirasi politik Islam. Dengan menyelenggarakan kebijaksanaan dan forum-forum tersebut dimaksudkan sebagai upaya modernisasi politik bangsa itu, umat Islam diuntungkan karena dapat melepaskan diri dari ikatan primodialismenya, pindah dari dunianya yang sempit ke dunia yang lebih luas. Banyak pemikir Islam yang beranggapan, dengan ditariknya Islam dari level politik, perjuangan kultural dalam pengertian luas menjadi sangat relevan, bahkan mungkin dianggap justru lebih efektif.¹⁷

¹⁶ *Ibid.* h. 113

¹⁷ Soekarno, Bung Karno, *Negara Nasional dan Cita-cita Islam*, (Jakarta: Seridokumentar, 2003), h. 103

Apa yang dimaksudkan dengan kebangkitan kembali Islam akhir-akhir ini bisa jadi merupakan hasil kerja dari organisasi-organisasi Islam yang ada. misalkan sejak dekade 1970-an, banyak bermunculan apa yang disebut intelektual muda Muslim yang meskipun sering kontroversial, melontarkan ide-ide segar untuk masa depan umat. Kebanyakan mereka adalah intelektual Muslim yang berpendidikan umum. Yang terakhir ini sangat mungkin adalah buah dari kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi mahasiswa Islam seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI, 1947) yang sangat dominan diperguruan tinggi umum, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan lain-lain. Setelah berlakunya asas tunggal, umat Islam dengan segala keberaniannya telah melepaskan suatu wadah politik. Dengan lapang dada, mereka menerima Pancasila dan berharap dapat mengisinya dengan nilai-nilai agama. Mereka ingin agar pihak-pihak lain yang selama ini memandang curiga terhadap Islam, dapat mempercayai ulama-ulama dan tokoh-tokoh Islam lainnya.¹⁸

E. ISU-ISU AKTUAL POLITIK ISLAM DI INDONESIA

1. PARTAI POLITIK ISLAM

Salah satu isu menarik dalam perkembangan Islam di Indonesia di masa modern adalah kembali berkiprahnya Partai-Partai politik Islam dalam pemilihan umum. Ada dua macam Partai yang dapat disebut sebagai Partai Islam, yaitu; pertama, Partai yang berazaskan Islam. Termasuk dalam kelompok ini adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan (PK, yang kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera, PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Nahdatul Ummah (PNU, yang kemudian berubah menjadi Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia, PPNUI), kedua, Partai yang tidak mencantumkan Islam sebagai azaznya tetapi konstituen utamanya adalah umat Islam. Termasuk dalam kelompok ini adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang konstituenya adalah warga NU, dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang konsituan utamanya adalah warga Muhammadiyah.

¹⁸ Deliar Noer, *Partai-partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, (Jakarta: PT. Pustaka Grafiti, 1987), h. 354.

Fenomena munculnya kembali Partai-Partai politik Islam ini sangat menarik, sebab hampir selama masa rezim Orde Baru, Praktik politik selama rezim orde baru sangat didominasi oleh pendekatan refresif. Sepanjang periode ini, rezim orde baru memberikan pengawasan ketat terhadap pergerakan dan Partai politik Islam.

Fenomena munculnya kembali Partai-Partai politik Islam dalam dua Pemilihan Umum terakhir (sebelum 2008) menarik perhatian banyak kalangan, apalagi kehadiran mereka di kancah perpolitikan nasional ternyata tidak hanya menjadi penggembira saja, tetapi justru menjadi pendulang suara rakyat yang patut diperhitungkan. Terbukti dalam dua kali pemilihan umum 1999 dan 2004, meskipun belum berhasil menjadi pemenang, tetapi kursi ketua MPR selalu menjadi milik Partai-Partai Islam, pertama oleh Amin Rais dari PAN dan kedua Hidayat Nurwahid dari PKS. Kita tentu masih akan terus menanti-nanti gerakan apalagi yang akan dilakukan oleh Partai-Partai politik Islam di masa-masa akan datang. Mungkinkah Partai-Partai ini akan menjadi saluran aspirasi dan dipilih oleh mayoritas umat Islam di negeri ini, atautkah Partai-Partai ini hanya akan menjadi penggembira saja di kancah perpolitikan Nasional.

Pada periode pemerintahan soekarno, dikenal sebuah peristiwa dekrit dimana pada dasarnya Partai-Partai Islam yang ada menentang dikeluarkannya dekrit tersebut. Namun pada tanggal 5 juli 1959 secara resmi dekrit tersebut dikeluarkan dengan terpaksa dan dimulailah periode demokrasi terpimpin. Dekrit tersebut menyatakan berlakunya kembali UUD 45 sebagai pengganti UUD 1950 yang dinyatakan telah habis masa berlakunya. Melalui dekrit itu juga, majelis konstituante dibubarkan karena dinilai tidak mampu merampungkan tugas, terutama dalam menetapkan dasar pancasila ataupun Islam. berakhirnya era demokrasi parlementer dan dimulainya suatu tatanan politik yang disebut era Demokrasi terpimpin, pada gilirannya memberikan peluang terjadinya konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden Soekarno.

Sekalipun dekrit tersebut dikeluarkan untuk menembus jalan buntu konstitusional, pada kenyataannya lebih menguntungkan kelompok

pendukung pancasila ketimbang kelompok Islam, sekalipun kelompok terakhir sampai pada batas tertentu masih didengar tuntutannya. Spontan setelah dikeluarkannya dekrit tersebut, mereka terpecah menjadi dua kelompok, Masjumi menilai bahwa sistem demokrasi terpimpin otoriter, sistem demikian merupakan bentuk penyimpangan dari ajaran Islam. Kelompok kedua, NU, PSII dan Perti yang tergabung dalam Liga Muslimin.

Dengan demikian, Soekarno memiliki peran secara tidak langsung terkait dengan perpecahan dalam tubuh Partai politik Islam. Peran tersebut lebih didorong oleh upaya dan kepentingan politiknya, termasuk dalam rangka mempertahankan kekuasaan. Sementara telah terjadi friksi dalam tubuh umat Islam sehingga kondisi demikian mampu ditangkap dan dimanfaatkan untuk melemahkannya¹⁹.

2. EKONOMI ISLAM

Perkembangan ekonomi islam yang semakin cerah dewasa ini, dengan ditandai dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di indonesia baik lembaga perbankan maupun non bank. Tidak hanya itu di dunia pendidikan, semakin bermunculan program studi ekonomi islam di beberapa universitas di indonesia. Perkembangan ekonomi islam yang semakin marak ini merupakan cerminan jawaban atas gairah dan kerinduan umat islam di Indonesia ini akan suatu sistem perekonomian yang mampu mensejahterahkan bangsa dan membebaskan bangsa dari terpuruknya perekonomian indonesia oleh beberapa sebab, diantaranya krisis ekonomi, kemiskinan, pengangguran, juga sebagai pembaharuan ekonomi dalam negeri yang masih penuh kerusakan ini, serta awal kebangkitan ekonomi islam di Indonesia maupun di seluruh dunia, misalnya di Indonesia berdiri Bank Muamalat tahun 1992.

Ketika membahas perkembangan ekonomi islam tak lepas dari pembahasan mengenai Perubahan ekonomi global , seperti pada krisis yang terjadi di negara Timur Tengah dan Eropa. Krisis ekonomi, politik, dan sosial yang mewarnai lingkungan makro ekonomi nasional. Dampak

¹⁹ <https://m.facebook.com/notes/kajian-intensif-islamiyah-kifayah-kairo-mesir/partai-politik-islam-di-indonesia-parpol-islam-sebuah-kebutuhan/21834657487298>.

dari situasi di luar negeri menjadi sebab utamanya. Kredit Yunani sebagai contohnya menjatuhkan mata uang Euro dan juga ikut menjatuhkan kondisi pasar uang dan pasar modal. Pemodal asing banyak yang mulai menarik uangnya karena kekhawatiran krisis Eropa. Selain krisis Eropa, krisis yang terjadi di Timur Tengah juga ikut memberikan dampak terhadap investor asing dari Timur Tengah karena kondisi di Timur Tengah yang tidak pasti.

Selain itu di tingkat ASEAN sendiri, dengan akan dicanangkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Sebagai salah satu pilar ASEAN Vision 2020 tentunya, akan banyak persiapan bagi Indonesia. Berdasarkan laporan AEC Scorecard yang diterbitkan oleh Sekretariat ASEAN pada tahun 2009, Negara yang dinilai mencapai tingkat implementasi MEA tertinggi adalah Singapura dengan nilai 93,52%. Dari 10 negara anggota, Indonesia menempati urutan ke-7 dengan nilai 80,37%. Hal tersebut mencerminkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi MEA. Terbentuknya pasar tunggal sebagai karakteristik utama MEA menyebabkan seluruh Negara ASEAN khususnya Indonesia mau tidak mau harus bersaing untuk menjadi Negara pengeksport agar neraca perdagangan Negara tetap seimbang di tengah kondisi produk-produk asing mulai membanjiri Indonesia.

Selain isu-isu global tersebut, terdapat juga beberapa isu khusus ekonomi Islam yang berkembang di Indonesia, setelah persoalan gadai emas yang kemudian menjadi berkebabun emas yang sempat menjadi perbincangan beberapa bulan lalu, hingga akhirnya diadakan pengaturan ulang mengenai gadai emas ini agar tidak menimbulkan spekulasi dan riba. Persoalan perbankan syariah masih saja menjadi topik-topik di beberapa media massa terkait perkembangan ekonomi syariah. Menurut sekjen asbisindo, Achmad K Permana mengatakan bahwa ada tiga masalah besar di perbankan syariah, antara lain masalah ketersediaan produk dan standarisasi produk perbankan syariah, tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk bank syariah, serta masalah terkait ketersediaan SDM perbankan syariah.

Mengingat Perbankan syariah Indonesia paling pesat pertumbu-

hannya yaitu 38% dibandingkan dengan pertumbuhan perbankan syariah dunia yang berkisar 10% sedangkan SDM yang ada sekarang masih mengambil dari SDM bank konvensional yang hanya di berikan beberapa kali training mengenai perbankan syariah. Selain itu Perbankan syariah saat ini masih banyak tantangan untuk menjadi sistem perekonomian Indonesia. Bank syariah belum menjadi kepentingan isu nasional, hal ini berbeda dengan Malaysia yang telah didukung oleh pemerintahnya secara penuh.

Perkembangan lembaga perbankan dan keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menunjukkan ketangguhannya dalam masa krisis moneter dan menunjukkan data-data kemajuan yang fantastis. Ketika bank konvensional mengalami likuidasi, bank syariah dapat bertahan dengan sistem bagi hasilnya, sehingga tidak wajib membayar bunga pada jumlah tertentu kepada nasabah sebagaimana pada bank konvensional. FDR bank syariah yang senantiasa tinggi, menunjukkan bahwa dana pihak ketiga bersifat produktif yang di investasikan kepada usaha-usaha masyarakat kecil maupun menengah.

Perkembangan ekonomi global dan semakin meningkatnya minat masyarakat dengan ekonomi perbankan secara islami, ekonomi islam mendapat tantangan yang besar pula. Menurut Ketua I Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan Wakil Sekjen MES Pusat, Bapak Agustianto menyebutkan bahwa setidaknya ada lima masalah dan tantangan yang dihadapi ekonomi Islam saat ini. Pertama, masih minimnya pakar ekonomi Islam berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi modern dan ilmu-ilmu syariah secara integratif. Kedua, ujian atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuangannya, ketiga, perangkat peraturan, hukum dan kebijakan, baik dalam skala nasional maupun internasional masih belum memadai . Keempat, masih terbatasnya perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam dan masih minimnya lembaga tranining dan consulting dalam bidang ini, sehingga SDM di bidang ekonomi dan keuangan syariah masih terbatas dan belum memiliki pengetahuan ekonomi syariah yang memadai. Kelima , peran pemerintah baik ekse-

kutif maupun legislatif, masih rendah terhadap pengembangan ekonomi syariah, karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang ilmu ekonomi Islam²⁰.

20 http://nurul-ain-feb10.web.unair.ac.id/artikel_detail-77657-Artikel%20Ekonomi%20Islam-FoSSEI%20dan%20Perkembangan%20Ekonomi%20Islam%20di%20Indonesia.html

BAB X

HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

A. HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

1. Pengertian Hukum Ekonomi Internasional

Hukum ekonomi internasional adalah semua subjek hukum yang memiliki unsur internasional dan unsur ekonomi. Yang artinya tidak melihat adanya kaitan yang khusus tara hukum ekonomi internasional dengan hukum internasional publik. Selain itu, hukum internasional tidak mudah atau sulit untuk di pahami tanpa memahami dengan baik teori ekonomi.¹

2. Peran Hukum Ekonomi Internasional

Kajian hukum internasional semakin penting. Perkembangan di bidang hukum ini mungkin paling progresif dibandingkan dengan hukum yang lain. Hukum internasional dan hukum ekonomi internasional memainkan perannya dalam melindungi para pihak, agar hubungan tersebut adil. Peran utama hukum ekonomi internasional sangat penting. ia membatasi atau mengatur agar tindakan-tindakan negara tidak merugikan kepentingan-kepentingan Negara lain atau kepentingan warga Negara.

Dalam pengaturan nasional, regional, dan dunia hubungan-hubungan ekonomi transnasional di bedakan menjadi lima kategori utama dalam transaksi ekonomi internasional:

¹ Harry Waluya, *Ekonomi Internasional*, (Jakarta : RINEKA CIPTA, 1995), h. 10

- a. Pergerakan internasional barang-barang (perdagangan nasional)
- b. Pergerakan internasional jasa-jasa(perdagangan jasa)
- c. Pergerakan orang-orang yang melintasi batas-batas Negara. Misalnya kebebasan bekerja, kebebasan bekerja bagi badan hukum
- d. Pergerakan internasional modal yang mensyaratkan investor-investor asing untuk dapat mengawasi modal secara langsung (penanaman modal asing, misalnya mendirikan perusahaan)
- e. Pembayaran internasional dalam transaksi ekonomi (tukar-menukar mata uang asing).²

3. Sumber - Sumber Hukum Ekonomi Internasional

a. Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional merupakan sumber hukum terpenting dalam hukum ekonomi internasional. Masyarakat internasional umumnya menempuh cara pembentukan perjanjian ini untuk menciptakan hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan ekonomi internasional. Perjanjian internasional pertama yang tercatat di bidang ekonomi adalah *The International Telegraph Convention of 1865*. Kemudian perjanjian internasional selanjutnya terus berkembang.

Pada umumnya perjanjian-perjanjian ekonomi internasional memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

- 1) Perjanjian-perjanjian tersebut mempengaruhi secara luas, tidak saja hubungan-hubungan antar negara, tetapi juga mempengaruhi sistem hukum Negara-negara yang menjadi peserta perjanjian tersebut.
- 2) Efektivitas dari perjanjian-perjanjian tersebut pada analisis akhirnya bergantung pada kesepakatan dari pada peserta perjanjian.
- 3) Efektivitas dari perjanjian-perjanjian tersebut bergantung kepada

² Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998), h. 3

efektivitas isi perjanjian tersebut.³

b. Hukum kebiasaan Internasional

Hukum kebiasaan internasional lahir sebagai akibat dari adanya dua faktor, yaitu :

- 1) Adanya suatu tindakan yang di lakukan berulang-ulang dan terus-menerus.
- 2) Masyarakat internasional memandang tindakan tersebut sebagai pengikat.

Kedua persyaratan mutlak ini pertama kali dinyatakan secara tegas oleh Mahkamah Internasional dalam kasus *North Sea continental Shelf Case* pada tahun 1969.⁴ Menurut Schwarzenberger dalam Huala Adolf, hukum kebiasaan internasional mempunyai tiga fungsi penting :

1. Hukum kebiasaan internasional memberikan latar belakang dan dasar-dasar bagaimana hukum ekonomi internasional yang sifatnya konsensual harus ditafsirkan.
2. Pengaturan-pengaturan hukum internasional yang berkaitan dengan tujuan, dan peranannya di darat dan di laut, hukum kebiasaan internasional memberikan berbagai aturan yang mengatur hukum-hukum ekonomi mengenai hukum TORT dalam hukum ekonomi internasional dan sengketa-sengketa ekonomi.
3. Mengatur hukum hukum kebiasaan internasional mengenai kebebasan di laut di waktu damai dan perang, dan bagi aturan-aturan mengenai standar minimum bagi perlakuan terhadap orang-orang asing.⁵

c. Prinsip-Prinsip Hukum Umum

Prinsip-prinsip hukum umum merupakan sumber hukum yang cuk-

3 *Ibid*, h. 103

4 *Ibid*, h. 117

5 *Ibid*, h. 119

up penting dalam hukum ekonomi internasional. Contoh prinsip-prinsip umum dalam publik yang penting pula bagi hukum ekonomi internasional misalnya, prinsip *good faith* (iktikat baik) di dalam merundingkan dan melaksanakan perjanjian.

d. Jurisprudensi dan Doktrin Sebagai Hukum Tambahan

Ajaran atau doktrin-doktrin dari sarjana di kemukakan mengenai hukum ekonomi internasional perannya masih kecil. Hal ini disebabkan oleh sulitnya bagi para sarjana untuk melepaskan dirinya dari kepentingan ekonomi negaranya guna menyetujui atau menghasilkan jurisprudensi atau doktrin-doktrin sebagai sumber hukum.⁶

a. Resolusi

Organisasi internasional yang berfungsi mengatur hubungan-hubungan ekonomi internasional juga mengeluarkan cukup banyak resolusi. Namun sifat hukum resolusi-resolusi ini tidaklah jelas. Selama ini terdapat berbagai pendapat yang menyatakan bahwa resolusi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sedangkan ada pula yang menyatakan bahwa resolusi tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali.

b. Keputusan-Keputusan (*Decisions*)

Peranan keputusan-keputusan ini dalam perkembangannya sangat penting .Hal ini berkaitan dengan semakin meningkatnya dan banyaknya organisasi-organisasi internasional yang mengeluarkan bentuk keputusan guna mengatur hubungan-hubungan internasional.

c. Codes of Conduct (Aturan tingkah laku)

Dalam hubungan-hubungan internasional , pengertian *codes of conduct* muncul dan mulai di gunakan pada tahun 1970-an. *Codest of conduct* di gunakan untuk menunjuk kepada suatu perangkat aturan bagi hubungan-hubungan bisnis transnasional yang

⁶ *Ibid*, h. 120-124

di bentuk bukan oleh Negara saja, organisasi antara pemerintah, tetapi juga oleh perusahaan-perusahaan swasta serta organisasi internasional.⁷

B. PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Perdagangan internasional didefinisikan terdiri dari kegiatan perniagaan dari suatu Negara asal yang melintasi perbatasan menuju suatu Negara tujuan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan perpindahan barang dan jasa, perpindahan modal, **perpindahan tenaga kerja**, perpindahan teknologi, dan perpindahan merk dagang.⁸

Perdagangan internasional dapat juga diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.

1. Faktor Penentu Perdagangan

Pasar tekstil adalah tempat yang paling bagus untuk mengkaji keuntungan dan kerugian dari perdagangan internasional. Tekstil di buat di banyak negara di dunia dan ada banyak perdagangan untuk produk tekstil. Pasar tekstil adalah tempat dimana para pembuat kebijakan sering kali mempertimbangkan hambatan perdagangan untuk melindungi produsen tekstil lokal dari pesaing luar negeri.

Menurut N. Gregory Mankiw, dkk yang menjadi faktor penentu perdagangan internasional ada enam faktor,⁹ antara lain:

⁷ *Ibid*, h. 125-127

⁸ Faisal Afif, *Menuju Pemasaran Global*, (Bandung : Eresco, 1994), h. 2

⁹ N. Gregory Mankiw, dkk, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Jakarta; Salemba Empat, 2008), h. 176

a. Keseimbangan tanpa perdagangan

Pasar tekstil tidak ada hubungan dengan dunia internasional. Dengan peraturan pemerintah, tidak seorang pun di Islandia diizinkan untuk mengekspor dan mengimpor tekstil dan hukuman untuk pelanggaran peraturan sangatlah berat.

b. Harga dunia dan keunggulan komparatif

Pada dasarnya, membandingkan harga dunia dan harga domestik dalam negeri sebelum perdagangan menunjukkan apakah Islandia memiliki keunggulan komparatif dalam produksi tekstil. Harga domestik menunjukkan biaya kesempatan dari tekstil. Jika harga domestik rendah maka biaya produksi tekstil rendah. Perdagangan antara Negara di dunia pada akhirnya berdasarkan keunggulan komparatif, artinya adalah perdagangan menguntungkan karena hal itu membuat setiap Negara melakukan spesialisasi.¹⁰

c. Keuntungan dan kerugian bagi Negara pengekspor

Harga keseimbangan domestik sebelum adanya perdagangan adalah di bawah harga dunia. Dengan harga domestik ini sama dengan harga dunia maka di dalam negeri jumlah penawaran barang berbeda dengan jumlah permintaannya. Walaupun jumlah penawaran dan permintaan di dalam negeri berbeda, pasar tekstil masih berada dalam titik keseimbangan.

d. Keuntungan dan kerugian bagi Negara pengimpor

Harga domestik sebelum perdagangan berada di atas harga dunia. Dalam hal ini jumlah penawaran barang kurang dari jumlah permintaannya.¹¹

e. Dampak Pemberlakuan tarif

Para ekonom menyadari bahwa kebijakan tarif terhadap tekstil tidak akan berpengaruh bagi pengekspor tekstil. Perubahan da-

10 *Ibid*, h. 177

11 *Ibid*, h. 178

lam harga mempengaruhi perilaku pembeli dan penjual domestik. Sebelum tarif di diterapkan, harga domestik sama dengan harga dunia. Karena tarif meningkat harga domestik maka penjual domestik akan menikmati keuntungan, sedangkan pembeli domestik akan mengalami kerugian.

f. Dampak pemberlakuan Kuota Impor

Para ekonom mempertimbangkan dampak di terapkannya kuota impor, yaitu pembatasan jumlah impor. Setelah pemerintah menerapkan kuota impor dan mengeluarkan lisensi impor, harga domestik di atas harga dunia.¹²

2. Argumen-Argumen Untuk Membatasi Perdagangan

a. Argumen lapangan pekerjaan

Para penentang perdagangan bebas sering kali berpendapat bahwa perdagangan dengan Negara lain akan menghancurkan pekerjaan domestik. Pekerja di setiap Negara pada akhirnya akan memperoleh pekerjaan di industri di mana Negara memiliki keunggulan komparatif.

b. Argumen keamanan Nasional

Suatu industri domestik terancam dengan adanya pesaing dari Negara lain. Perdagangan bebas sering kali berpendapat bahwa industri yang terancam itu sangat penting untuk keamanan Negara.

c. Argumen industri kecil

Industri yang baru berdiri kadang kala berpendapat bahwa mereka harus di lindungi untuk sementara agar dapat tumbuh. Industri ini akan menjadi dewasa dan mampu bersaing dengan pesaing dari negeri lain. Untuk memilih industri adalah hal yang sangat sulit.

12 *Ibid*, h. 180

d. **Argument kompetisi yang tidak adil**

Suatu argumen yang sering kali didengar adalah perdagangan bebas dapat dilakukan hanya jika semua menuruti peraturan yang sama. Jika perusahaan di Negara-negara lain mengikuti peraturan dan hukum yang berbeda maka tidak akan adil, jika mengharapkan perusahaan tersebut bersaing di pasar internasional.

e. **Argument perlindungan sebagai alat Tawar-menawar**

Argument untuk membatasi perdagangan berkaitan dengan strategi penawaran. Masalah dari strategi tawar-menawar adalah ancaman, mereka dapat melanjutkan ancaman mereka dan menerapkan pembatasan perdagangan yang pada akhirnya akan mengurangi kesejahteraan ekonomi mereka.¹³

3. **Manfaat Perdagangan Internasional**

Dalam perputarannya dari masa ke masa selalu mengalami **perkembangan fluktuatif**, baik dari objek maupun subjeknya. Perdagangan internasional dipermudah oleh pasar keuangan internasional yang menyebabkan **perdagangan valas** dan aliran modal berjalan lancar antar negara. Pada era globalisasi seperti sekarang ini akses masuk ke pasar keuangan dalam konteks perdagangan internasional menjadi teramat sangat mudah dengan berkembangnya teknologi informasi moderen.

Adapun manfaat-manfaat yang diperoleh dari perdagangan internasional adalah sebagai berikut:

a. **Memperoleh devisa**

Jika kita mengeksport suatu komoditas, kita mendapat mata uang asing seperti dolar Amerika, yen, atau jenis mata uang lainnya. Mata uang asing ini biasa disebut devisa. Devisa dapat digunakan misalkan untuk mengimpor barang modal dan konsumsi.

13 *Ibid*, h. 189-193

b. Memperluas kesempatan kerja

Untuk menghasilkan barang ekspor dibutuhkan tenaga kerja. Coba bayangkan jika barang tambang, hasil pertanian, dan hasil kerajinan tidak diekspor? Tentu saja orang yang bekerja di sektor itu akan menganggur.

c. Menstabilkan harga-harga

Jika harga jenis barang dalam negeri mahal atau jumlahnya kurang dan tidak memenuhi permintaan pasar, maka barang tersebut harus diimpor. Dengan adanya impor, harga barang jenis tersebut akan stabil dan permintaan pun dapat terpenuhi.¹⁴

d. Meningkatkan kualitas konsumsi

Melalui perdagangan internasional, penduduk dapat membeli barang-barang yang belum dihasilkan di dalam negeri atau mutunya belum sebaik produk luar negeri. Perdagangan internasional dapat memacu industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan agar dapat bersaing di pasar internasional. Di Indonesia, barang seperti itu beragam, antara lain televisi, pakaian, sepatu, dan perabot.¹⁵

e. Mempercepat alih teknologi

Untuk menggunakan barang-barang yang diimpor dari luar negeri, dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Oleh karena itu, pihak penjual perlu mengadakan bimbingan atau pelatihan untuk menggunakannya. Hal seperti itu akan mempercepat alih teknologi. Alih teknologi memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih modern.¹⁶

Aktifitas-aktifitas perdagangan internasional perusahaan dari waktu ke waktu semakin penting. Tren ini terutama disebabkan oleh

¹⁴ Mudrajad kuncoro. *Manajemen Keuangan Internasional: pengantar bisnis global*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), h. 12

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*, h. 13

ditemukannya cara baru oleh bank-**bank komersial** untuk membiayai perdagangan internasional. Walaupun bank-bank membiayai perdagangan domestik, peranan mereka dalam membiayai perdagangan internasional memiliki posisi yang lebih penting karena adanya komplikasi-komplikasi tambahan yang terlibat.

C. PERKEMBANGAN EKONOMI DI INDONESIA

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian Indonesia tidak terlepas dari permasalahan kesenjangan dalam pengelolaan perekonomian, dimana para pemilik modal besar selalu mendapatkan kesempatan yang lebih luas dibandingkan dengan para pengusaha kecil dan menengah yang kekurangan modal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara umum yaitu:

1. Faktor produksi, yaitu harus mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada dan penggunaan bahan baku industri dalam negeri semaksimal mungkin.
2. Faktor investasi, yaitu dengan membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak pada pasar.
3. Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, harus surplus sehingga mampu meningkatkan cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah.
4. Faktor kebijakan moneter dan inflasi, yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga ini juga harus di antisipatif dan diterima pasar.
5. Faktor keuangan negara, yaitu berupa kebijakan fiskal yang konstruktif dan mampu membiayai pengeluaran pemerintah.

Kebanyakan negara berkembang menghadapi banyak masalah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hambatan-hambatan terpenting yang dialami adalah:

1. Kegiatan sektor pertanian masih tetap tradisonal dan produktivitasnya sangat rendah.
2. Kebanyakan negara masih menghadapi masalah kekurangan dana modal dan barang modal (peralatan produksi) yang modern.
3. Tenaga terampil, terdidik dan keahlian keusahawanan penawarannya masih jauh dibawah jumlah yang diperlukan.
4. Perkembangan penduduk sangatlah pesat.
5. Berbagai masalah institusi, sosial, kebudayaan dan politik yang sering dihadapi.

Beberapa teori telah dikemukakan yang menerangkan mengenai hubungan diantara berbagai faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi. Pandangan teori tersebut adalah:

1. Teori klasik: menekankan tentang pentingnya faktor-faktor produksi dalam menaikkan pendapatan nasional dan mewujudkan pertumbuhan. Akan tetapi yang terutama diperhatikan ahli ekonomi klasik adalah peranan tenaga kerja. Menurut mereka tenaga kerja yang berlebihan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
2. Teori Schumpeteer: menekankan tentang peranan usahawan yang akan melakukan inovasi dan investasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi.
3. Teori Harrod-Domar: menekankan peranan investasi sebagai faktor yang menimbulkan pertambahan pengeluaran agregat. Teori ini pada dasarnya menekankan peranan segi permintaan dalam mewujudkan pertumbuhan.
4. Teori neo klasik: melaluinkajian empirikal teori ini menunjukkan

bahwa perkembangan teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat merupakan faktor yang terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi

Kebijakan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dilakukan pemerintah adalah:

Kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memodernkan kegiatan ekonomi yang ada.¹⁷ Sedangkan langkah penting yang harus dilakukan adalah mengembangkan kegiatan ekonomi yang baru yang dapat mempercepat informasi kegiatan ekonomi yang bersifat tradisional kepada kegiatan ekonomi yang modern. Mengembangkan infrastruktur, modernisasi pertumbuhan ekonomi memerlukan infrastruktur yang modern pula. Berbagai kegiatan ekonomi memerlukan infrastruktur yang berkembang, seperti jalan, jembatan, lapangan terbang, pelabuhan, kawasan perindustrian, irigasi dan penyediaan air, listrik dan jaringan telepon.

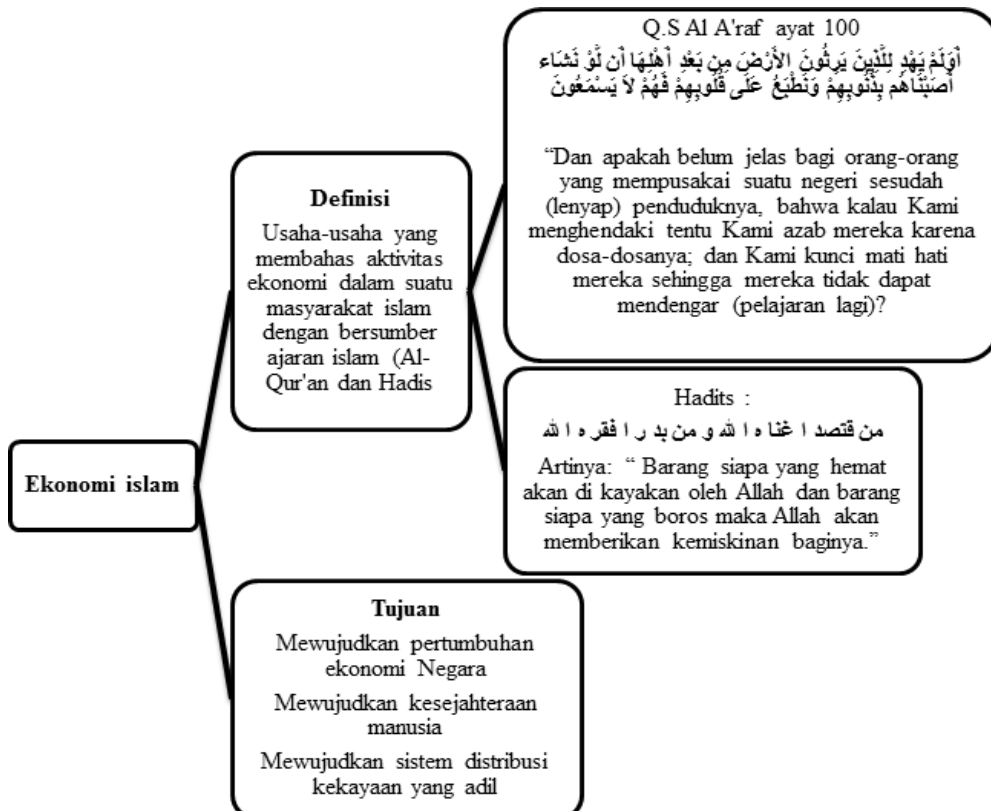
Meningkatkan tabungan dan investasi, pendapatan masyarakat yang rendah menyebabkan tabungan masyarakat rendah. Sedangkan pembangunan memerlukan tabungan yang besar untuk membiayai investasi yang dilakukan. Kekurangan investasi selalu dinyatakan sebagai salah satu sumber yang dapat menghambat pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu syarat penting yang perlu dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan tabungan masyarakat.

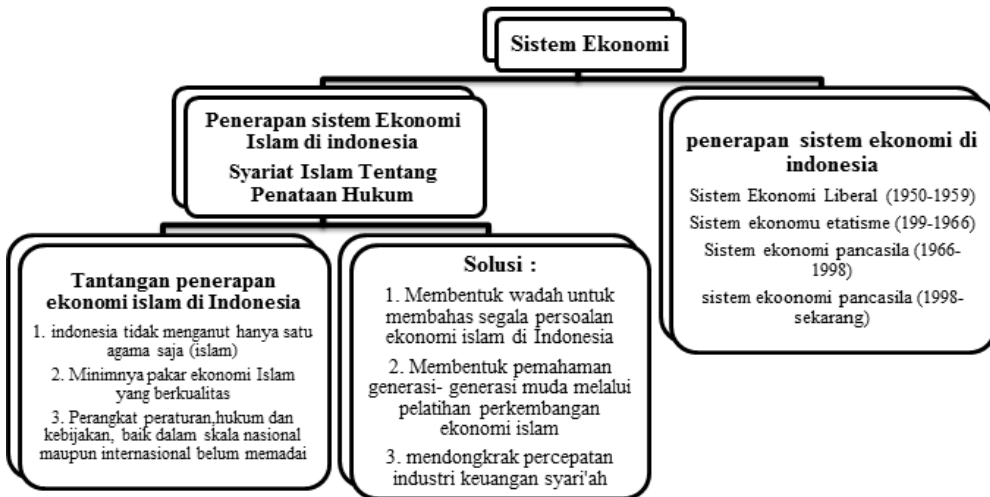
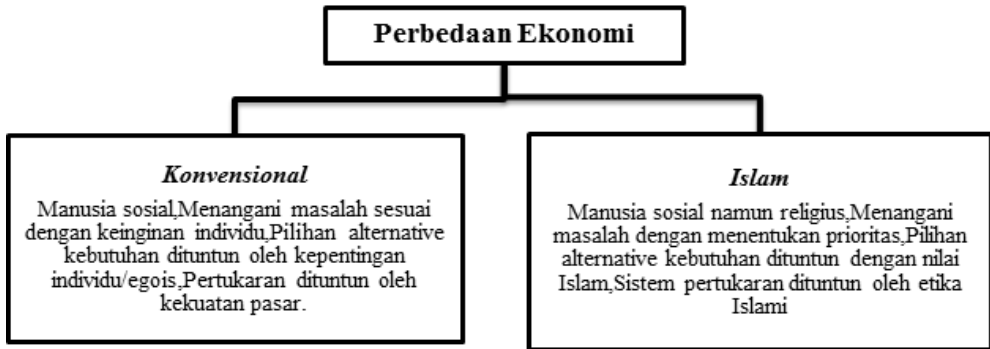
Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, dari segi pandangan individu maupun dari segi secara keseluruhan, pendidikan merupakan satu investasi yang sangat berguna dalam pembangunan ekonomi. Individu yang memperoleh pendidikan tinggi cenderung akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, jadi semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh. Merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi, kebijakan pemerintah yang konvensional

¹⁷ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998), h. 35

yaitu kebijakan fiskal dan moneter tidak dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.¹⁸ Untuk mengatasinya pada tahap mula dari pembangunan ekonomi perencanaan pembanguana perlu dilakukan. Melalui perencanaan pembangunan dapat pula ditentukan sejauh mana investasi swasta dan pemerintah perlu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pertumbuhan yang telah ditentukan.

KESIMPULAN





BUMN

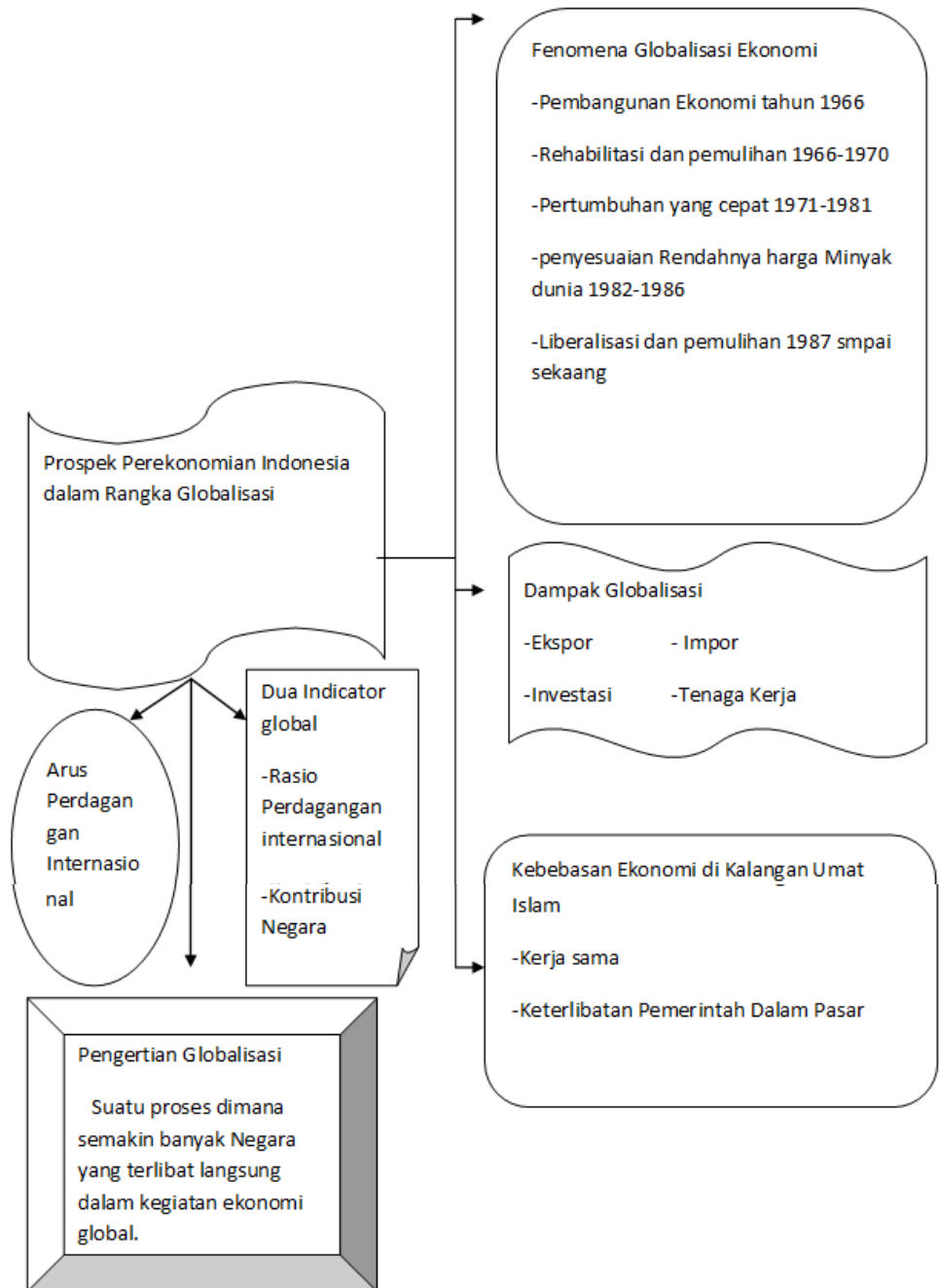
PENGERTIAN BUMN :
BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

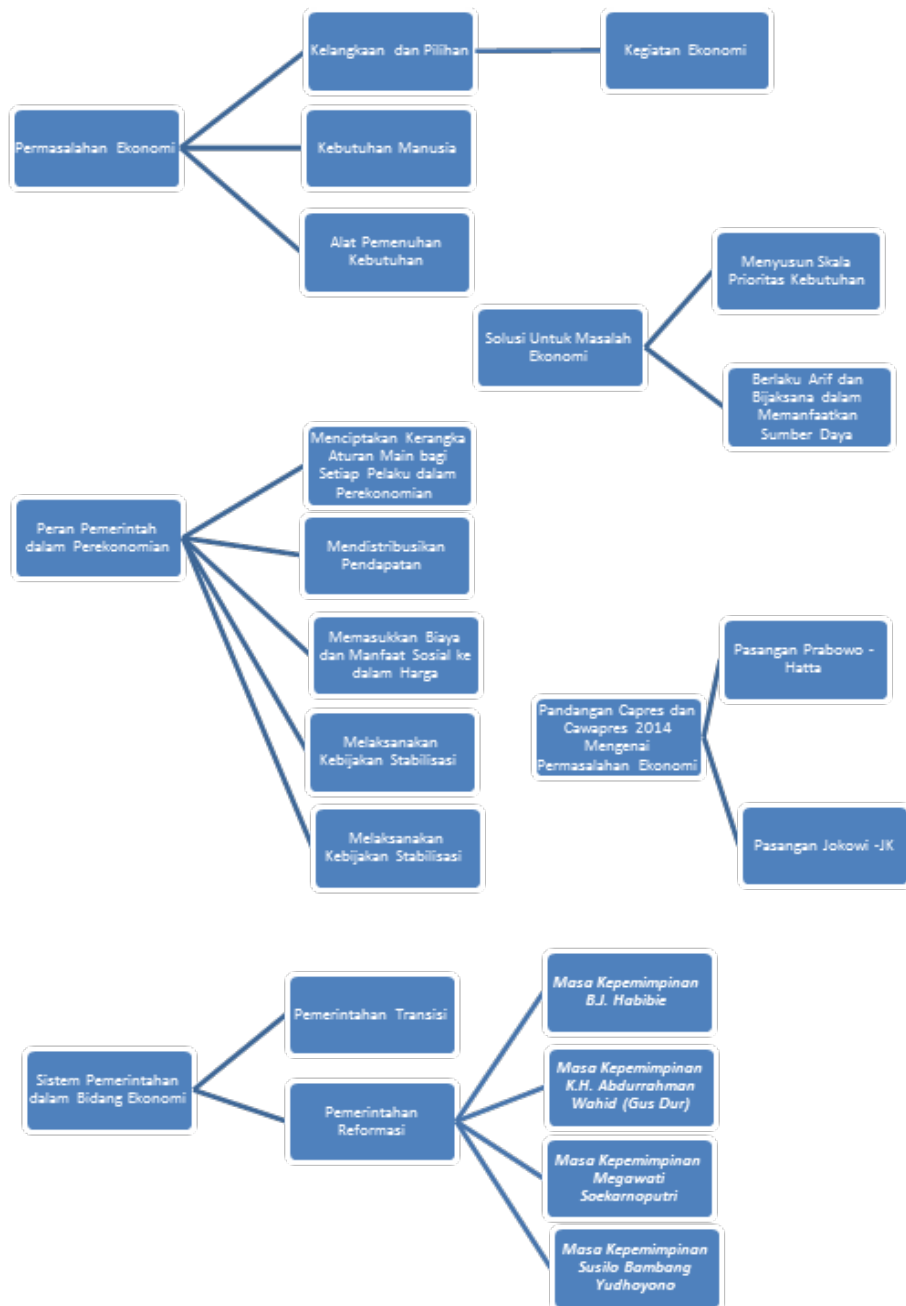
DASAR DAN HAKIKAT KEBERADAAN BUMN
Dalam perekonomian di Indonesia dibutuhkan campur tangan pemerintah dimana pemerintah dapat mengatur dan menyelesaikan masalah ekonomi dalam Negara. Akan tetapi pemerintah belum berhasil membuat perekonomian membaik. Tidak seperti Negara Asing yang justru sangat baik. Dalam hal ini BUMN juga ikut berperan sebagai pemegang sektor perekonomian nasional, setoran laba tahunannya bagi Negara, dan penyumbang kas Negara.

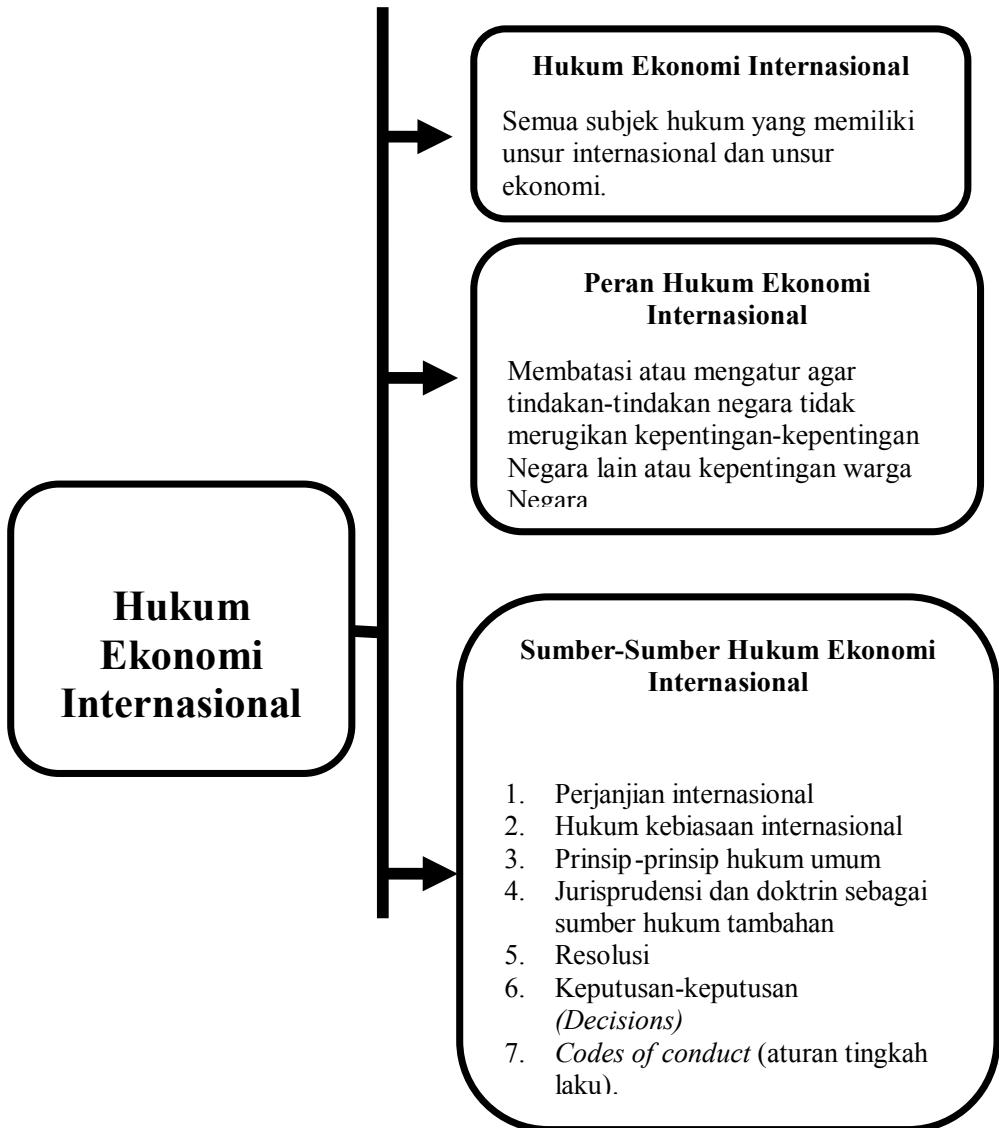
ARTI BUMN:
Dilihat dari kepemilikannya, ada tiga pelaku utama dalam perekonomian Indonesia, yakni BUMN, perusahaan swasta (BUMS, Badan Usaha Milik Swasta) dan koperasi. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah unit usaha yang seluruh modalnya dimiliki Negara atau yang tidak seluruh sahamnya dimiliki Negara, tetapi statusnya disamakan dengan BUMN, yaitu perusahaan patungan antara pemerintah dan pemerintah daerah; perusahaan patungan antara pemerintah dan BUMN lainnya; serta perusahaan patungan dengan swasta nasional maupun asing di mana Negara memiliki saham mayoritas (minimal 51 persen)

REKOMENDASI PENGELOLAAN DAN PEM BINAAN BUMN
Seandainya tidak ada tiga masalah berat yang melilitnya, BUMN sebenarnya tidak perlu diperlakukan secara khusus. Kedudukannya sama saja dengan perusahaan swasta dan koperasi. Bahkan seperti dibayangkan Bung Hatta, pada hakikatnya keberadaan BUMN itu hanya sementara saja. Ketika warga negara biasa sudah bisa menjadi pelaku ekonomi andal melalui perusahaan swasta maupun koperasi, maka BUMN secara alamiah harus minggir sehingga peran pemerintah hanya sebatas sebagai regulator dan pembina saja, tidak perlu lagi menjadi pelaku langsung dalam perekonomian. Namun dalam kenyataannya BUMN di Indonesia terus hadir dan diperlakukan secara khusus.

PERAN BUMN DALAM SEJARAH INDONESIA
Peran sebagai menjaga kelestarian alam/ lingkungan
BUMN, karena milik negara, kepanjangan tangan pemerintah sehingga bisa menjalankan semua kebijakan pemerintah sesuai UU lingkungan hidup.
Peran sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi
Sampai awal tahun 1980-an BUMN memegang peranan penting.



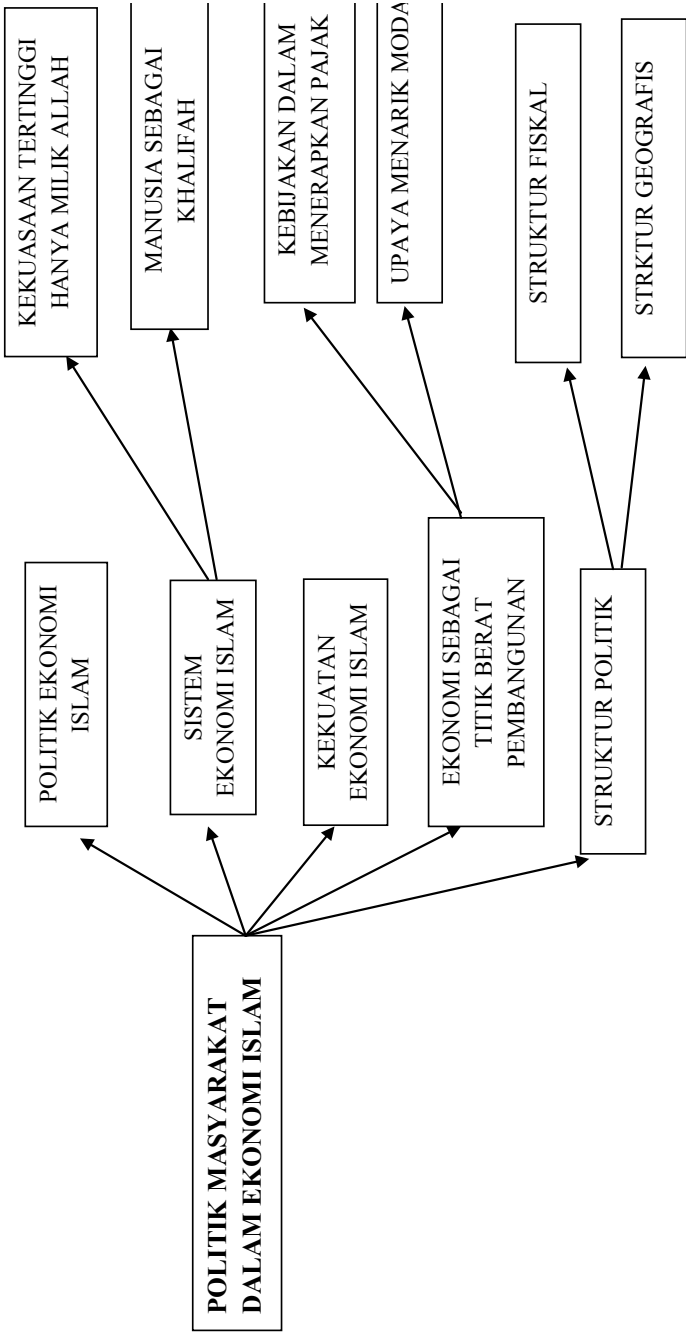






POLITIK EKONOMI ISLAM

Suatu jaminan untuk tercapainya pemenuhan semua kebutuhan (basic needs) tiap orang secara keseluruhan tanpa mengabaikan kemungkinan seseorang dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersierinya sesuai dengan keadaan kadar potensi yang dimilikinya sebagai seorang individu yang hidup ditengah komunitas manusia.



DAFTAR PUSTAKA

Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006

Abdullah. Daud Vicary, *Pintar Keuangan Syariah*, Jakarta : Bumi Aksara, 1998

Adolf. Huala, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998,

Afan Gaffari, *Politik Indonesia Tradisi Menuju Demokrasi*, cet. kedua, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000

Afif. Faisal, *Menuju Pemasaran Global*, Bandung : Eresco, 1994

Afrida BR, M.S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003

Agustianto, Casmudi, *Potensi Dan Tantangan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta : 2013

Amir. Amri, *Sistem Ekonomi Syariah* Jakarta : CiptaPustaka, 2008

Arifin. Bustanul, *Strategi Makro-mikro Ekonomi Indonesia*. Surabaya: Ghalia Indonesia, 2005

Azyumardi. Azra, 1996. *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina.

Bakar. Abu, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Aktivitas Ekonomi* Jakarta Cipta Pustaka, 2009.

- Basri, Faisal dan Haris Munandar. *Lanskap Ekonomi Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2009
- Basri. Faisal. *Lanskap Ekonomi Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2009
- Beling, Totten, *Modernisasi Masalah Model Pembangunan*, Jakarta CV. Rajawali, 1980.
- Budiardjo. Miriam, *Demokrasi Indonesia, Dempkrasi Perlementer dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Dipoyudo. Kirdi, *Keadilan Sosial*, Jakarta, CV. Rajawali, 1985
- Donal Eugene Smith, *Agama dan Modernisasi Politik*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985
- Hadis. Syafil, *Ekonomi Internasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996
- Hal Hill, *Ekonomi Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Huda. Ni'matul, *Ilmu Negara*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011
- Idri, Titik Triwulan Tutik, *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta : Lintas Pustaka Publisher, 2008.
- Joko. Dwi, *Ilmu Ekonomi*, Solo : Usaha Makmur, 1998
- Karim. Adiwarmarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2010
- Khaldun. Ibn, *Filsafat Islam Tentang Sejarah*, (terj.) Charles Issawi, dari judul asli *an Arab Philosophy of History*, cet. II, Jakarta: Tintamas,

1976

Kuncoro. Mudrajad. *Menejemen Keuangan Internasional: pengantar bisnis global*, Yogyakarta: BPFE, 2001

Louis Irving Horowitz, *Revolusi, Militerisasi dan Konsolidasi Pembangunan*, Jakarta PT. Bina Aksara, 1985

Madjid. Nurcholish, *Cita-cita Politik Islam*, cetakan kedua, Jakarta: PARAMADINA 2009

Mankiw. N. Gregory, dkk, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Jakarta; Salemba Empat, 2008.

Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah* Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Monzer Kafh, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Muhaimin. Yahya, Colin MacAndrews, *Masalah-Masalah Pembangunan Politik*.

Munawar. Fansuri, *Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pustaka Pintar, 2001

Nasroen. M., *Ilmu Perbandingan Pemerintahan*, Jakarta Aksara Baru, 1986

Nasution. Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, jilid II, cet. I, Jakarta: UI Press, 1979

Nata. Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, cet I, Jakarta: Grafindo Persada, 2010.

Noer. Deliar, *Partai-partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, Jakarta: PT.

- Pustaka Grafiti, 1987.
- , *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1982
- Poerwadarminta. W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet XII, Jakarta: Balai Pustaka, 1991
- Qardhawi. Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1987
- Rais. Dhiauddin, *Teori politik Islam*, bab V, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Rosydi. Suherman, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: PT Grafindo, 2004
- , *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, Jakarta : Rajawali Pers, 2003
- Sinaga. Osbert, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Medan ; Penerbit Unimed Press, 2014
- Sjadzali. Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, sejarah dan pemikiran*, cet. I, Jakarta: UI Press, 1990
- Soekarno, Bung Karno, *Negara Nasional dan Cita-cita Islam*, Jakarta: Seridokumentar, 2003
- Sugiarto, *Peran Strategis BUMN*. Jakarta: BUMN Club 2007
- Sukirno. Sadono, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: PT Grafindo,

do,2004

Suryanegara. Ahmad Mansur , *Menemukan Sejarah*, Bandung : Mizan, 1995

Suwiknyo. Dwi, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010

Syafi'i. Ma'rif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3S,1987

Taqiyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Surabaya : Risalah Gusti, 1999

Taupan. Muhamad, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung ; Yrama Widya, 2011.

Thaba. Abdul Azis, *Islam dan Negara*, Jakarta : Gema Insani Pers, 1996

Tulus T.H. Tambunan, *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004

Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat madani*, Jakarta ; ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.

Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, Jakarta: Bumi aksara, 2009

Waluya. Harry, *Ekonomi Internasional*, Jakarta : RINEKA CIPTA, 1995.

Zamharir. Muhammad Hari, *Agama dan Negara*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2004

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Zulham, S.H.I. M.Hum. e-mail: zulham@uinsu.ac.id, lahir di Timbang Lawan pada 21 Maret 1977. Menyelesaikan pendidikan SDN I 050643 di Bohorok tahun 1989, MTs Pesantren Darularafah tahun 1992, MAS Pesantren Darularafah tahun 1995, Program S1 Fakultas Syari'ah IAIN SU Medan tahun 2001, Program S2 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2005, dan Program S3 Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2015. Pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU, dan Wakil Koordinator Kopertais Wilayah IX Sumatera Utara. Aktif dalam kegiatan akademik sebagai dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU, hingga melahirkan sejumlah karya ilmiah yang bereputasi, baik nasional maupun internasional, baik dalam bentuk buku, penelitian, dan jurnal. Aktif dalam kegiatan sosial sebagai Wakil Ketua Yayasan Al-Ishlahiyah Binjai.



A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Wulan Dayu, SE., ME.
NIK : 12710440101850014
NIDN : 0101018504
Tempat, tgl. Lahir : Binjai Baru 01 Januari 1985
Agama : Islam
Alamat : Jl. Karya Jaya Perumahan Taman Citra Mandiri
Blok E No. 3 Medan Johor
Pendidikan Terakhir : S2
: Mahasiswa Progra Doktor (S3) Ekonomi
Syariah UIN SU TA 2022
Status : Menikah

B. Pendidikan

- a. SD Negeri 015887, Binjai Baru, 1997
- b. SMP Pesantren Darul Ulum Asahan Kisaran, 2000
- c. SMA MAN 2 Moden Medan, 2003
- d. S-1, Fak Ekonomi UMSU Medan, 2008
- e. S-2, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Program Studi Ekonomi Islam, 2019

C. Pengalaman Kerja

- a. 2010, PT Kebayoran Lama Pharma, Operator Sales
- b. 2011-2013, PT Hexalab Sumatera, Staff Keuangan

- c. 2013-2017, PT Hexalab Sumatera, Spv Administrasi
- d. 2017, PT. Karya Medika Bersama, Direktur Utama
- e. 2017- sekarang, Dosen Tidak Tetap UIN SU
- f. 2019 – 2020 dosen tidak tetap Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
- g. 2021- sekarang Dosen tetap Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

D. Karya

- a. Pengantar Kewirausahaan, Buku, Penerbit Dinas Perpustakaan Daerah Sumatera Utara, 2018
- b. Dialektika Gerakan Ekonomi dalam Berbagai Analisa, Buku, Penerbit Dinas Perpustakaan Daerah Sumatera Utara 2019

E. Pengalaman Narasumber

- a. Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa UIN SU, 2018, Sertifikat
- b. Bimtek Kondusifitas Menuju Pilpres 2019, Polresta Deli Serdang, 2019, Sertifikat
- c. Quantum Leadership Ramadhan YPSA, Manajemen Kepemimpinan, Sertifikat
- d. Bimtek Manajemen Konflik Anti SARA, FKUB Kota Medan, 2019, Sertifikat
- e. Pelatihan Ekonomi Mandiri bagi Ibu Rumah Tangga, MUI Kota Medan, 2020, Sertifikat
- f. Webiner Nasional Nusantara Bangkit, Dampak Penerapan PPKM Terhadap Ekonomi Masyarakat, UIN-SU 2021, Sertifikat
- g. Literasi Digital Bijak Ber Media Sosial, Kemen Kominfo, 2021. Sertifikat

F. Pelatihan Profesional

- a. Pendidikan Komputer, Tricom, 2004
- b. English Cours, Basic Conversation, one, two, three, 2011

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

